



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PEREKONOMIAN

Provinsi Kalimantan Utara

MEI 2026





**LAPORAN
PEREKONOMIAN**
Provinsi Kalimantan Utara

MEI
2026

Visi

Menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging market* untuk Indonesia Maju.

Misi

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
2. Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
3. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional;
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
6. Turut meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia; dan
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.

Kata Pengantar

Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara merupakan hasil asesmen rutin yang dilakukan setiap triwulan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Utara. Kajian ini mengulas asesmen terkini mengenai kondisi ekonomi makro daerah, inflasi, pembiayaan daerah dan akses keuangan UMKM, sistem pembayaran, ketenagakerjaan dan kesejahteraan, serta prospek perekonomian ke depan. Laporan diharapkan menjadi bahan referensi bagi stakeholders di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dalam melakukan penyusunan kebijakan baik di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara.

Perekonomian Kalimantan Utara pada triwulan I 2026 tetap tumbuh positif meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya akibat kontraksi pada Lapangan Usaha Pertambangan seiring penurunan produksi batubara pasca pembatasan RKAB tahun 2026. Pertumbuhan ekonomi tetap ditopang oleh kinerja Lapangan Usaha Konstruksi yang didukung pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI), Lapangan Usaha Perdagangan yang meningkat selama periode HBKN Ramadan dan Idulfitri, serta Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan sejalan dengan peningkatan belanja pegawai dan belanja modal pemerintah. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh meningkatnya investasi dan kinerja net ekspor, terutama dari ekspor produk olahan kayu dan investasi barang modal di KIHI, meskipun tertahan oleh kenaikan impor barang masuk.

Analisis pada laporan perekonomian menggunakan data primer, data sekunder, serta informasi dari berbagai pihak baik dari kalangan pemerintah daerah/pusat maupun swasta. Melalui kesempatan ini, perkenalkan kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan. Besar harapan kami bahwa hubungan kemitraan strategis yang terjalin selama ini dapat terus terjaga dan lebih ditingkatkan di masa yang akan datang. Kami juga senantiasa mengharapkan kritikan, masukan, dan saran untuk lebih meningkatkan kualitas kajian sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal di masa yang akan datang bagi semua kalangan, khususnya dalam pengambilan kebijakan terkait perekonomian Provinsi Kaltara.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kelancaran dan kesuksesan kepada kita semua dalam upaya mengembangkan ekonomi Kalimantan Utara guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia maju.

Tarakan, 3 Juni 2026
Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Kalimantan Utara

Hasiando G. Manik
Kepala Perwakilan

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Grafik	v
Daftar Tabel	viii
Ringkasan Eksekutif	x
Tabel Indikator	xii

4.4. Pembiayaan Sektor Rumah Tangga	41
4.5. Pengembangan Akses Keuangan UMKM	42
Boks 3	45
Sinergi Karya Kreatif Benuanta (KKB) 2025: Memperkuat Kapabilitas UMKM, Pelestarian Budaya, dan Ketangguhan Ekonomi Daerah	

01

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

1.1. Gambaran Umum	2
1.2. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha	2
1.3. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pengeluaran	8
Boks 1	13
<i>Benuanta Investment and Economic Summit (BIES) 2025</i>	
“Kalimantan Utara sebagai Episentrum Pertumbuhan Baru: Menakar Peran Hilirisasi, Industrialisasi, dan Konektivitas Global terhadap Perekonomian Daerah”	

02

Perkembangan Inflasi Daerah

3.1. Gambaran Umum	26
3.2. Perkembangan Inflasi Bulanan (mtm)	26
3.3. Inflasi Tahunan (yoy)	28
3.4. Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	29
3.5. Upaya Pengendalian Inflasi Daerah	31
3.6. <i>Tracking</i> Inflasi Triwulan I 2026	31
3.7. Prakiraan Inflasi Triwulan I 2026	33
Boks 2	34
<i>Launching Mini Distribution Center (MDC) : Inovasi Pengendalian Inflasi Menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru 2026</i>	

03

Pembiayaan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

4.1. Intermediasi dan Pertumbuhan Aset Perbankan	38
4.2. Pembiayaan Daerah	40
4.3. Pembiayaan Sektor Korporasi	41

04

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

5.1. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Non Tunai	50
5.2. Pengelolaan Uang Rupiah	50
5.3. Perkembangan QRIS	53
5.4. Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Provinsi Kalimantan Utara	54
5.5. Perkembangan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)	55
Boks 4	55
Kaltara Digital QRIS (KATALIS) Bendibang Tahun 2025	

05

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

6.1. Ketenagakerjaan	61
6.2. Kesejahteraan	62
6.2.1. Kemiskinan	62
6.2.2. Nilai Tukar Petani	63
6.2.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	64
6.2.4. <i>GINI Ratio</i>	65

06

Prospek Perekonomian Daerah

7.1. Prospek Perekonomian Global	70
7.2. Prospek Perekonomian Indonesia	70
7.3. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Kaltara	71
7.4. Prospek Inflasi Kalimantan Utara	73

Daftar Grafik

01

Grafik I.1	Pangsa Ekonomi Kalimantan Triwulan IV 2025	2
Grafik I.2	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara dan Nasional	2
Grafik I.3	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Triwulan IV 2025	2
Grafik I.4	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Lapangan Usaha Pertambangan	3
Grafik I.5	Volume Ekspor Batu Bara Tiongkok dan India	4
Grafik I.6	Volume Impor Batu Bara Tiongkok	4
Grafik I.7	Harga Batubara Acuan	4
Grafik I.8	Kredit Pertambangan Kaltara	4
Grafik I.9	Ekspor Batu Bara	5
Grafik I.10	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara - Pertanian	5
Grafik I.11	Volume Ekspor Udang	5
Grafik I.12	Volume Ekspor Rumput Laut	5
Grafik I.13	Volume Ekspor Ikan	5
Grafik I.14	Harga TBS	6
Grafik I.15	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Perdagangan	6
Grafik I.16	IKK, IKE, dan IEK Kaltara	6
Grafik I.17	Volume Penjualan Kendaraan Roda Dua	6
Grafik I.18	Volume Penjualan Kendaraan Roda Empat	6
Grafik I.19	Kredit Perdagangan Kaltara	6
Grafik I.20	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Konstruksi	7
Grafik I.21	Penjualan Semen Kaltara	7
Grafik I.22	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Industri Pengolahan	7
Grafik I.23	Volume Ekspor <i>Plywood</i>	7
Grafik I.24	Kredit Industri Kaltara	8
Grafik I.25	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Konsumsi Rumah Tangga	8
Grafik I.26	Indeks Survei Konsumen	9
Grafik I.27	Kredit Konsumsi	9
Grafik I.28	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – PMTB	9
Grafik I.29	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	9
Grafik I.30	Penanaman Modal Asing (PMA)	9
Grafik I.31	Impor Barang Modal	10
Grafik I.32	Kredit Investasi Kaltara	10
Grafik I.33	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Konsumsi Pemerintah	10
Grafik I.34	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Ekspor Luar Negeri	10
Grafik I.35	Neraca Perdagangan Luar Negeri Kaltara	11
Grafik I.36	Ekspor Batu bara	11
Grafik I.37	Ekspor <i>Plywood</i>	11
Grafik I.38	Ekspor Udang	11
Grafik I.39	Ekspor Ikan	11

Grafik I.40	Komoditas Utama Ekspor Triwulan IV 2025	11
Grafik I.41	Negara Utama Tujuan Ekspor Triwulan IV 2025	12
Grafik I.42	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Impor Luar Negeri	12
Grafik I.43	Komoditas Utama Impor Triwulan IV 2025	12
Grafik I.44	Negara Utama Asal Impor Triwulan IV 2025	12

02

Grafik II.1	Inflasi Gabungan Kota IHK di Kaltara & Nasional	26
Grafik II.2	Perbandingan Inflasi Gabungan Kota IHK di Kalimantan Triwulan IV2025	26
Grafik II.3	Perkembangan Inflasi Bulanan Kalimantan Utara	33
Grafik II.4	Perkembangan Harga Bulanan Pangan Strategis Kalimantan Utara	33

03

Grafik III.1	Perkembangan Intermediasi Perbankan	38
Grafik III.2	Perkembangan Pertumbuhan Aset Perbankan Kaltara, Kalimantan, dan Nasional	38
Grafik III.3	Perkembangan Pertumbuhan DPK Perbankan Kaltara, Kalimantan, dan Nasional	38
Grafik III.4	Perkembangan Pertumbuhan Komponen DPK Perbankan Kaltara	38
Grafik III.5	Perkembangan Komponen DPK Perbankan Kaltara	38
Grafik III.6	Perkembangan Pertumbuhan Kredit Kaltara, Kalimantan, dan Nasiona	39
Grafik III.7	Perkembangan NPL Kredit Kaltara, Kalimantan, dan Nasional	39
Grafik III.8	Perkembangan Kredit Jenis Penggunaan Kaltara	40
Grafik III.9	Perkembangan Pertumbuhan Kredit Jenis Penggunaan Kaltara	40
Grafik III.10	Perkembangan Kredit Kaltara Berdasarkan Lapangan Usaha	40
Grafik III.11	Perkembangan Kredit Korporasi Kaltara	41
Grafik III.12	Pangsa Kredit Korporasi	41
Grafik III.13	LS Kap. Utilisasi, LSP. Domestik dan PDRB Ekspor LN (RHS)	41
Grafik III.14	LS Harga Jual dan Harga Batu bara	41
Grafik III.15	Perkembangan Kredit Rumah Tangga Kaltara	42
Grafik III.16	Perkembangan Kredit Rumah Tangga Kaltara Berdasarkan Jenisnya	42
Grafik III.17	Perkembangan Kredit Rumah Tangga dan NPL RT Kaltara	42
Grafik III.18	Perkembangan Rasio Kredit UMKM Terhadap Total Kredit Kaltara	43
Grafik III.19	Perkembangan Kredit UMKM Kaltara	43
Grafik III.20	Perkembangan Kredit UMKM Kaltara Berdasarkan Jenisnya	43
Grafik III.21	Komposisi Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Penggunaan Kaltara	43
Grafik III.22	Komposisi Kredit UMKM Berdasarkan Lapangan Usaha Kaltara	44
Grafik III.23	KUR Kaltara	44
Grafik III.24	Komposisi KUR Berdasarkan Lapangan Usaha Kaltara	44
Grafik III.25	Komposisi KUR Berdasarkan Kab/Kota di Kaltara	44

04

Grafik IV.1	Perkembangan Nominal Transaksi Kliring Kaltara	50
Grafik IV.2	Perkembangan Volume Transaksi Kliring Kaltara	50
Grafik IV.3	Perkembangan Nominal BI-RTGS Kaltara	50
Grafik IV.4	Perkembangan Volume BI-RTGS Kaltara	50
Grafik IV.5	Perkembangan Aliran Uang Keluar/Masuk	51
Grafik IV.6	Denominasi <i>Outflow</i> Uang Kartal Kaltara Triwulan IV 2025	51
Grafik IV.7	Denominasi <i>Outflow</i> Uang Logam Kaltara Triwulan IV 2025	51
Grafik IV.8	Denominasi <i>Inflow</i> Uang Kartal Kaltara Triwulan IV 2025	51
Grafik IV.9	Penyediaan Uang Rupiah Layak Edar (ULE)	52
Grafik IV.10	Kontribusi <i>Merchant</i> QRIS berdasarkan wilayah di Provinsi Kalimantan Utara	53
Grafik IV.11	Kontribusi <i>Merchant</i> QRIS berdasarkan Kategori di Provinsi Kalimantan Utara	53
Grafik IV.12	Perkembangan APMK	54

05

Grafik V.1	Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja	60
Grafik V.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kaltara	60
Grafik V.3	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kaltara periode 2022 – 2025	62
Grafik V.4	Perkembangan Penduduk Miskin Kaltara di Perkotaan dan Desa periode 2024 dan 2025	63
Grafik V.5	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Periode 2020-2025	63
Grafik V.6	NTNP, Indeks Harga yang Diterima dan Dibayar Nelayan dan Pembudidaya Ikan	64
Grafik V.7	NTNP, NTN, dan NTPI	64
Grafik V.8	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kaltara	64

Daftar Tabel

Tabel I.1	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara Berdasarkan Lapangan Usaha (yoy)	3
Tabel I.2	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara Berdasarkan Pengeluaran (yoy)	8
Tabel I.3	Nilai Perdagangan Internasional Kaltara	10
Tabel II.1	Perbandingan Inflasi Kaltara Triwulan III 2025 dan Triwulan IV 2025 (mtm)	26
Tabel II.2	Komoditas Utama Penyumbang Deflasi Bulanan Gabungan 3 Kab/Kota IHK Kaltara selama Triwulan IV 2025 (mtm)	27
Tabel II.3	Komoditas Utama Penyumbang Deflasi Bulanan Gabungan 3 Kab/Kota IHK Kaltara selama Triwulan IV 2025 (mtm)	28
Tabel II.4	Inflasi Umum/Total Tahunan Kaltara 2024-2025 (yoy)	28
Tabel II.5	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Gabungan Triwulan IV 2025 (yoy)	29
Tabel II.6	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Triwulan IV 2025 (yoy)	29
Tabel II.7	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Triwulan IV 2025 (yoy)	30
Tabel II.8	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau Triwulan IV 2025 (yoy)	30
Tabel II.9	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin RT Triwulan IV 2025 (yoy)	31
Tabel II.10	Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah selama Triwulan IV 2025	32
Tabel III.1	Perkembangan DPK secara spasial	39
Tabel III.2	Perkembangan Kredit Secara Spasial	39
Tabel III.3	Klasifikasi Penyaluran Kredit Kaltara Berdasarkan Nilai	40
Tabel III.4	Akses Keuangan UMKM Binaan dan Mitra KPw BI Provinsi Kalimantan Utara	43
Tabel IV.1	Perkembangan NMR Provinsi Kaltara	53
Tabel IV.2	Perkembangan Indeks ETPD Provinsi Kalimantan Utara	54
Tabel V.1	Angkatan Kerja dan Pengangguran Provinsi Kaltara	60
Tabel V.2	Persentase Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha Provinsi Kaltara	61
Tabel V.3	Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan	62
Tabel V.4	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	62
Tabel V.5	Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kaltara	63
Tabel V.6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Utara Menurut Dimensi Penyusunnya	65
Tabel V.7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Regional se Kalimantan	65
Tabel V.8	<i>GINI Ratio</i> Penduduk di Kaltara Menurut Daerah	65
Tabel V.9	Perbandingan <i>GINI Ratio</i> Se-Kalimantan	66
Tabel VII.1	Perbandingan Ekonomi Negara Lain	70



Ringkasan Eksekutif

Mei 2026



Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Perekonomian Kalimantan Utara triwulan I 2026 tetap mencatatkan pertumbuhan positif, meskipun mengalami moderasi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya akibat kinerja Lapangan Usaha (LU) Pertambangan yang berkontraksi. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kaltara yang positif ditopang oleh kinerja LU Konstruksi, Perdagangan, dan Administrasi Pemerintahan. Kinerja LU Pertambangan berkontraksi akibat penurunan produksi batubara paska implementasi kebijakan pembatasan RKAB tahun 2026. Kendati demikian, aktivitas ekonomi domestik tetap terjaga didukung oleh kinerja sejumlah lapangan usaha utama lainnya. LU Konstruksi masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi didorong oleh aktivitas pembangunan di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI). Sejalan dengan itu, kinerja LU Perdagangan utamanya didukung oleh peningkatan output produksi dan permintaan pada masa HBKN Ramadhan dan Idul Fitri. LU Administrasi Pemerintahan juga menunjukkan pertumbuhan yang solid didorong peningkatan belanja pegawai dalam rangka pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) serta akselerasi belanja modal APBN dan APBD se-Kaltara. Dari sisi permintaan, perekonomian Kalimantan Utara pada triwulan I 2026 juga termoderasi akibat peningkatan impor barang masuk yang lebih tinggi, namun masih tumbuh positif didorong oleh meningkatnya kinerja investasi dan net ekspor seiring dengan peningkatan aktivitas ekspor dari hasil olahan kayu maupun investasi pembelian barang modal di KIHI

Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi gabungan 3 kabupaten/kota IHK Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 3,12% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV 2025 yang sebesar 2,57% (yoy), dan juga lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,29% (yoy). Meskipun mengalami peningkatan, inflasi secara tahunan tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional. Tekanan inflasi terutama dipengaruhi oleh kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, khususnya komoditas emas perhiasan, sejalan dengan berlanjutnya penguatan harga emas global di tengah eskalasi ketidakpastian kebijakan perdagangan internasional dan tingginya permintaan terhadap aset lindung nilai. Selain itu, inflasi juga didorong oleh kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, khususnya dari komoditas tarif listrik yang mencatat inflasi tahunan tinggi akibat efek basis rendah paska kebijakan diskon tarif listrik yang diterapkan pemerintah pada awal 2025. Tekanan dari sisi pangan juga tercatat, terutama dari komoditas daging ayam ras dan cabai rawit yang meningkat, sejalan dengan lonjakan permintaan selama Ramadan dan menjelang Idulfitri. Namun demikian, tekanan inflasi lebih lanjut tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas hortikultura secara tahunan, terutama cabai rawit, jagung manis, dan sawi hijau, yang mencerminkan normalisasi pasokan dari sentra produksi.

Pembiayaan Daerah Serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara turut didukung oleh kinerja intermediasi perbankan yang tetap solid. Penyaluran kredit tumbuh di atas capaian regional Kalimantan dan Nasional. Penyaluran kredit dalam bentuk kredit konsumsi dan modal kerja masing-masing tumbuh 7,04 % (yoy) dan 35,39% (yoy). Kuatnya pertumbuhan kredit modal kerja mencerminkan meningkatnya optimisme pelaku usaha dan masyarakat terhadap prospek perekonomian, khususnya pada sektor-sektor bisnis. Sejalan dengan hal tersebut, meningkatnya investasi sejalan dengan optimisme pelaku usaha terhadap pemulihan ekonomi nasional dan Kaltara serta akselerasi beberapa proyek strategis. Realisasi investasi yang sudah dilakukan selama triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar Rp11 Triliun atau 56,01 % dari target investasi 2026 yang ditetapkan sebesar Rp30,55 Triliun.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Penyelenggaraan sistem pembayaran tunai maupun nontunai di Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan I 2026 menunjukkan kinerja yang tetap terjaga di tengah berlanjutnya proses digitalisasi transaksi ekonomi dan keuangan. Transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) pada Triwulan I 2026 menunjukkan kinerja yang relatif terjaga. Transaksi SKNBI mengalami kontraksi baik dari sisi nominal maupun volume, sejalan dengan pergeseran preferensi masyarakat dan pelaku usaha ke instrumen pembayaran digital yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Di sisi lain, transaksi BI-RTGS tetap mencatat pertumbuhan positif baik dari sisi nominal maupun volume, mencerminkan masih kuatnya aktivitas transaksi bernilai besar. Dari sisi pengelolaan uang Rupiah, aliran uang kartal mencatatkan *net inflow* seiring meningkatnya setoran uang kartal pasca periode kebutuhan uang tunai akhir tahun. Distribusi Uang Layak Edar (ULE) tetap didominasi oleh pecahan besar, sementara proses penarikan dan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) terus dilakukan sebagai bagian dari implementasi *Clean Money Policy* (CMP), yang disertai edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah kepada masyarakat. Sejalan dengan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, jumlah pengguna dan *merchant* QRIS terus meningkat dengan dominasi pada segmen Usaha Mikro dan penyebaran yang semakin luas di seluruh wilayah Kalimantan Utara. Selain itu, kinerja Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tetap solid, tercermin dari seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Utara yang masih berada pada tahap Digital.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Perkembangan ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Kalimantan Utara pada Triwulan IV 2025 tetap menunjukkan kondisi yang terjaga dan cenderung membaik. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 tercatat sebesar 3,85%, menurun dibandingkan 3,90% pada Agustus 2024. Penurunan ini mengindikasikan perbaikan berkelanjutan di pasar tenaga kerja, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk bekerja serta membaiknya serapan tenaga kerja pada berbagai lapangan usaha. Kualitas hidup masyarakat juga terus meningkat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Utara pada tahun 2025 tercatat sebesar 74,04, meningkat dibandingkan 73,41 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak masyarakat. Sementara itu, tingkat ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan. Selain itu, Gini Ratio Kalimantan Utara pada September 2025 tercatat sebesar 0,251, menurun dibandingkan 0,261 pada Maret 2025. Penurunan ini didukung oleh membaiknya distribusi pengeluaran masyarakat, tercermin

dari meningkatnya porsi pengeluaran kelompok 40% terbawah menjadi 24,89%, yang menunjukkan ketimpangan tetap berada pada kategori rendah. Secara keseluruhan, kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Kalimantan Utara pada Triwulan I 2026 tetap solid, ditopang oleh penurunan tingkat pengangguran, peningkatan kualitas pembangunan manusia, serta ketimpangan pendapatan yang relatif rendah dan semakin membaik.

Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Prov. Kaltara 2026 diperkirakan tumbuh lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi 2025, yaitu dalam kisaran 5,0%-5,5% (yoy). Proyeksi tersebut terutama didorong oleh kinerja LU Perdagangan, LU Industri Pengolahan, dan LU Konstruksi. LU Perdagangan diperkirakan akan memiliki andil besar dalam PDRB 2026 sejalan dengan peningkatan aktivitas perdagangan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan di Prov. Kaltara serta adanya komoditas ekspor baru yaitu Aluminium. LU Industri Pengolahan diperkirakan tumbuh meningkat sejalan dengan realisasi investasi dan operasi smelter aluminium, produksi pabrik pengolahan kertas di Kota Tarakan, dan peningkatan target produksi CPO oleh beberapa perusahaan kelapa sawit. LU Konstruksi juga diperkirakan akan tetap tumbuh positif didukung oleh finalisasi pembangunan kawasan KIHI dan berlanjutnya konstruksi beberapa proyek strategis di Prov. Kaltara lainnya. Namun demikian, LU dengan pangsa terbesar di Prov. Kaltara, yaitu LU Pertambangan diperkirakan tumbuh terbatas akibat perlambatan permintaan energi dari negara besar pengguna batu bara (a.l Tiongkok, India, dan beberapa negara di Asia Tenggara) di tengah perlambatan prospek ekonomi akibat perang tarif dagang, pengembangan sumber energi terbarukan serta upaya pemenuhan sumber energi secara domestik.

Dari sisi harga, inflasi Prov. Kaltara 2026 diperkirakan berada di dalam target inflasi nasional yaitu $2,5 \pm 1\%$. Prov. Kaltara diperkirakan dapat mengalami tekanan harga yang lebih tinggi pada 2026, sejalan dengan berlanjutnya kenaikan harga komoditas global seperti emas, potensi kenaikan harga minyak, berkurangnya subsidi ongkos angkut akibat efisiensi anggaran, dan peningkatan permintaan komoditas pangan di tengah pelaksanaan program MBG. Ke depan, sinergi pengendalian inflasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan akan konsisten dilakukan guna menjaga stabilitas harga serta mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.



Tabel Indikator

A. Pertumbuhan Ekonomi

%YOY	2024					2025					2026
	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I
PDRB Total	4,82	4,78	4,55	4,78	4,73	3,98	4,36	4,35	5,49	4,56	5,23
Berdasarkan Lapangan Usaha											
Pertanian	4,94	1,73	2,80	-2,27	1,75	1,29	3,42	3,84	1,79	2,60	2,23
Pertambangan	0,48	0,10	-0,33	0,88	0,28	0,31	-0,78	-2,71	-1,17	-1,09	-3,13
Industri Pengolahan	2,43	5,47	6,35	6,69	5,26	9,68	8,34	8,02	9,89	8,99	6,48
Listrik dan Gas	12,72	-5,32	3,97	-8,23	0,01	6,80	3,29	0,55	6,01	4,07	3,52
Air	7,29	8,82	6,20	7,17	7,36	6,33	2,44	0,35	0,63	2,39	-0,32
Konstruksi	11,17	11,97	8,20	16,22	11,95	3,69	11,86	13,83	14,38	11,17	17,62
Perdagangan	10,17	10,67	9,59	9,12	9,87	9,08	10,35	9,35	10,55	9,84	9,92
Transportasi dan Pergudangan	6,16	6,44	7,12	2,54	5,51	7,34	4,50	6,57	5,46	5,94	3,29
Akomodasi dan Makan Minum	9,16	10,53	12,94	12,44	11,30	9,34	9,17	10,04	11,27	9,99	15,90
Informasi dan Komunikasi	6,92	4,89	4,69	4,08	5,12	2,38	4,12	6,21	5,48	4,56	5,07
Jasa Keuangan	9,06	6,82	6,23	3,72	6,41	4,19	0,03	-0,44	11,58	3,85	4,41
Real Estate	3,68	3,98	4,41	5,64	4,44	3,38	5,45	5,04	10,64	6,17	13,13
Jasa Perusahaan	1,41	3,49	3,38	4,14	3,12	3,01	-0,78	0,26	7,45	2,52	8,29
Adm. Pemerintahan	-0,29	5,02	4,69	7,25	4,37	8,75	-5,52	-2,61	0,57	-0,03	13,56
Jasa Pendidikan	3,59	3,42	7,42	7,31	5,46	1,36	-0,28	-1,38	6,71	1,65	2,72
Jasa Kesehatan dan Sosial	1,55	2,97	3,43	4,15	3,03	2,24	5,96	3,70	5,36	4,32	1,05
Jasa lainnya	7,78	7,06	6,86	5,60	6,81	2,87	5,65	5,22	9,65	5,89	6,72
Berdasarkan Pengeluaran											
Konsumsi Rumah Tangga	5,67	5,77	5,61	5,87	5,73	5,83	5,47	5,65	5,99	5,74	5,96
Konsumsi LNPR	19,79	12,87	7,78	6,94	11,60	2,88	6,43	4,73	4,64	4,66	4,59
Konsumsi Pemerintah	8,34	4,65	9,03	12,65	8,89	9,06	-10,07	-2,59	-6,53	-3,79	16,88
PMTB	10,80	7,41	4,31	5,18	6,84	0,39	4,92	5,95	6,49	4,47	6,01
Perubahan Inventori	1,48	2,62	-2,36	-8,87	-1,82	0,46	-0,24	-4,63	8,58	0,84	-7,55
Ekspor	-0,83	2,46	3,09	3,34	2,01	2,53	2,74	2,88	3,74	2,98	4,24
Impor	-1,81	2,34	2,63	3,91	1,78	0,31	0,08	1,92	1,03	0,84	5,15

Sumber: BPS, diolah

B. Inflasi

Inflasi SBH 2018	2022				2023			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
IHK Umum	4,61	5,17	6,64	4,74	4,17	2,91	2,16	2,44
Makanan, Minuman dan Tembakau	5,12	6,52	5,52	3,25	3,16	1,39	2,66	3,70
Pakaian dan Alas Kaki	0,22	0,56	0,59	0,64	0,70	0,37	0,14	-0,08
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,27	0,41	1,19	1,23	0,88	0,97	1,39	0,96
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	3,95	6,05	6,39	7,31	4,15	1,98	0,92	-0,17
Kesehatan	1,91	1,42	1,46	1,55	0,58	0,95	0,84	0,85
Transportasi	15,65	14,20	27,88	15,74	16,11	12,33	4,69	5,10
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,23	0,27	0,39	0,41	0,13	0,04	0,09	0,16
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,60	0,29	0,44	0,44	0,32	0,29	0,29	0,24
Pendidikan	0,44	0,44	0,63	0,63	0,63	0,63	0,36	0,36
Penyediaan Makanan dan Minuman/restoran	3,19	3,76	3,75	2,57	2,23	1,71	1,06	1,07
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	6,46	6,44	7,20	8,19	6,16	4,91	3,88	4,50

Sumber: BPS, diolah

Inflasi SBH 2022	2024				2025				2026
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
IHK Umum	2,62	2,39	1,74	1,29	1,24	1,38	2,32	2,57	3,12
Makanan, Minuman dan Tembakau	6,28	4,78	2,87	1,56	3,01	1,36	3,50	2,32	1,44
Pakaian dan Alas Kaki	3,08	2,84	2,86	4,54	0,80	0,16	-0,10	0,08	-0,01
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,00	0,09	-0,33	-0,44	-3,38	0,63	2,73	3,12	6,67
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	-0,20	-0,24	-0,30	-0,20	0,05	-0,11	-0,50	-0,64	-0,41
Kesehatan	0,49	0,59	0,63	0,77	1,55	1,41	8,31	8,40	8,01
Transportasi	0,92	1,90	0,79	0,05	-0,17	-0,60	-2,04	0,03	0,87
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,19	-0,23	-0,27	-0,15	-0,06	-0,20	-0,11	-0,22	-0,37
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,74	0,81	-0,29	-0,07	0,14	-0,83	1,11	1,39	125
Pendidikan	0,24	0,24	0,30	0,30	0,72	0,74	0,88	0,92	072
Penyediaan Makanan dan Minuman/restoran	1,92	2,07	3,02	2,81	2,86	3,56	2,08	1,92	263
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	2,82	4,24	5,66	5,38	7,01	8,10	8,47	12,95	14,60

Sumber: BPS, diolah

*) Inflasi Kaltara dihitung menggunakan inflasi Kota Tarakan & Tanjung Selor hingga akhir 2023 (dengan SBH 2018), namun terhitung bulan Januari tahun 2024 telah ditambah Inflasi Kabupaten Nunukan (dengan SBH 2022).

C. Perbankan

%YOY	2024				2025				2026
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
DPK dan Aset									
Dana Pihak Ketiga (KC/KCP)	7,70	5,18	8,89	2,28	-3,10	-6,22	-4,49	-3,78	-2,13
Giro	46,12	24,95	30,67	8,89	-5,07	-5,83	-6,17	-8,90	-24,55
Tabungan	7,03	6,80	5,32	4,33	6,18	4,37	3,79	6,48	8,57
Deposito	-17,84	-11,16	-0,80	-10,19	-19,66	-25,79	-22,49	-23,35	1,56
Aset	14,63	8,89	9,00	7,47	-2,14	-3,71	-1,31	16,76	16,66
Kredit									
Penyaluran Kredit (Lokasi Proyek)	22,66	23,57	9,51	20,14	27,51	41,53	55,67	68,24	75,88
Non Performing Loans (Lokasi Proyek)	0,98	1,12	0,94	0,92	1,04	0,98	0,95	2,14	0,72
Berdasarkan Jenis Penggunaan									
Modal Kerja	39,47	37,64	15,70	17,52	17,79	17,79	32,81	25,87	35,39
Investasi	20,30	23,27	-0,18	28,98	55,07	104,58	131,75	162,05	168,02
Konsumsi	9,84	10,96	13,23	14,01	13,09	11,60	9,95	7,89	7,04
Berdasarkan Sektor Ekonomi									
Pertanian dan Kehutanan	-9,69	-9,21	-12,10	-12,11	-9,43	-12,84	-9,26	-8,72	-25,31
Perikanan	31,77	12,98	2,54	-7,60	-10,71	-12,76	-16,59	-16,60	-15,58
Pertambangan	0,76	58,36	-6,59	-4,76	96,59	248,69	484,69	345,77	191,39
Industri Pengolahan	404,72	473,25	100,21	155,66	199,24	209,27	153,85	223,17	209,73
Listrik, Gas dan Air	1.469,73	1.767,47	-2,62	204,42	204,03	502,75	829,44	199,74	296,31
Konstruksi	32,73	3,69	-39,55	-48,81	-54,96	-54,62	-35,54	-18,47	22,78
Perdagangan Besar dan Eceran	13,33	10,04	-7,71	-10,28	-12,40	-8,83	6,96	1,79	1,30
Akomodasi dan Makan Minum	34,23	33,12	32,86	23,66	25,88	19,79	14,28	12,40	1,29
Transportasi, Gudang dan Komunikasi	187,64	205,33	50,33	59,44	13,64	8,89	-4,44	22,07	7,33
Jasa Keuangan	-47,13	-63,98	-34,50	-0,10	55,96	114,57	139,08	69,49	14,68
Real Estate dan Jasa Perusahaan	31,52	26,91	9,46	-12,05	-17,98	-23,35	-1,56	7,24	27,96
Administrasi Pemerintahan	-48,86	-40,85	39,15	117,60	244,42	275,81	90,38	29,85	11,04
Jasa Pendidikan	66,67	62,26	86,24	46,07	14,71	1,89	-15,15	-15,84	-16,49
Jasa Kesehatan dan Sosial	-40,58	-22,21	-5,49	124,54	71,26	69,77	60,93	8,39	37,33
Jasa Kemasyarakatan	23,07	13,57	7,94	2,18	11,02	30,12	22,41	19,62	15,64
Jasa Perorangan	1,28	4,17	-5,62	-19,61	-3,05	-2,73	3,95	10,00	-8,07
Badan Internasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rumah Tangga	9,84	10,96	13,23	14,01	13,09	11,60	9,95	7,89	7,04







01

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah



Perekonomian Kalimantan Utara triwulan I 2026 tetap tumbuh positif meskipun termoderasi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya akibat kinerja Lapangan Usaha (LU) Pertambangan yang berkontraksi. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kaltara yang positif ditopang oleh kinerja LU Konstruksi, Perdagangan, dan Administrasi Pemerintahan. Kinerja LU Pertambangan berkontraksi akibat penurunan produksi batubara pasca kebijakan pembatasan RKAB tahun 2026. Sementara itu, LU Konstruksi juga masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi didorong oleh aktivitas pembangunan di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI). Sejalan dengan itu, kinerja LU Perdagangan utamanya didukung oleh peningkatan output produksi dan permintaan pada masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri. LU Administrasi Pemerintahan juga tumbuh positif sejalan dengan peningkatan belanja pegawai dalam rangka pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan meningkatnya belanja modal APBN dan APBD se-Kaltara. Dari sisi permintaan, perekonomian Kalimantan Utara pada triwulan I 2026 juga termoderasi akibat peningkatan impor barang masuk namun masih tumbuh positif didorong oleh meningkatnya kinerja investasi dan net ekspor seiring dengan peningkatan aktivitas ekspor dari hasil olahan kayu maupun investasi pembelian barang modal di KIHI.

1.1 Gambaran Umum

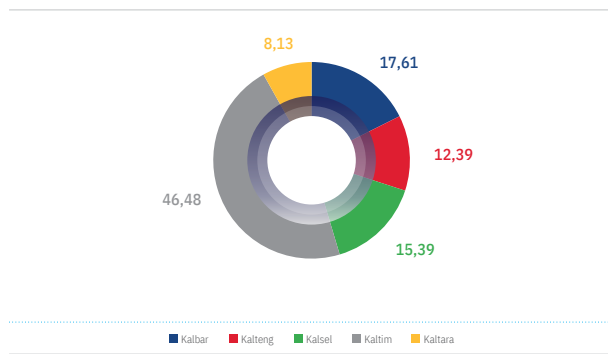
Pertumbuhan ekonomi Kalimantan triwulan I 2026 tercatat tumbuh positif namun termoderasi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Ekonomi Kalimantan tercatat sebesar 4,08% (yoy), tumbuh melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 5,19% (yoy). Melambatnya kinerja ekonomi Kalimantan didorong oleh perlambatan kinerja LU Pertambangan yang didominasi oleh penurunan produksi batubara.

Pangsa ekonomi Kalimantan Utara di Pulau Kalimantan mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan IV 2025.¹ Pangsa Kalimantan Utara terhadap wilayah Kalimantan tercatat sebesar 8,13%, menurun terbatas dibandingkan dengan triwulan IV 2025 dengan pangsa 8,18%. Pangsa ekonomi Kalimantan Utara relatif menjadi yang terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya di Kalimantan. Selanjutnya, pangsa perekonomian terbesar wilayah Kalimantan masing-masing terdiri dari Provinsi Kalimantan Timur (46,48%), diikuti oleh Provinsi Kalimantan Barat (17,61%), Provinsi Kalimantan Selatan (15,39%), dan Provinsi Kalimantan Tengah (12,39%). (Grafik I.1)

PDRB Kalimantan Utara triwulan I 2026 tercatat tumbuh positif namun melambat. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB Kalimantan Utara pada triwulan I 2026 tercatat Rp40,06 Triliun (ADHB) atau Rp19,30 Triliun (ADHK). Secara tahunan, PDRB tersebut tumbuh 5,23% (yoy), positif namun melambat dibandingkan capaian triwulan sebelumnya sebesar 5,49% (yoy). Kinerja ekonomi Kaltara masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mampu tumbuh sebesar 5,61% (yoy) (Grafik I.2).

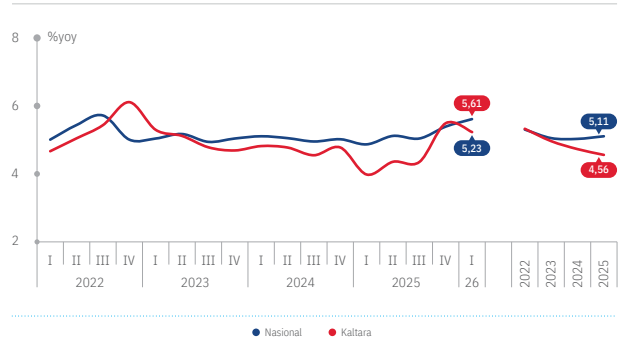
Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 Kalimantan Utara didorong sebagian besar komponen Lapangan Usaha. LU Konstruksi, LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan LU Administrasi Pemerintahan yang

Grafik I.1. Pangsa Ekonomi Kalimantan Triwulan I 2026



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.2. Pertumbuhan Ekonomi Kaltara dan Nasional

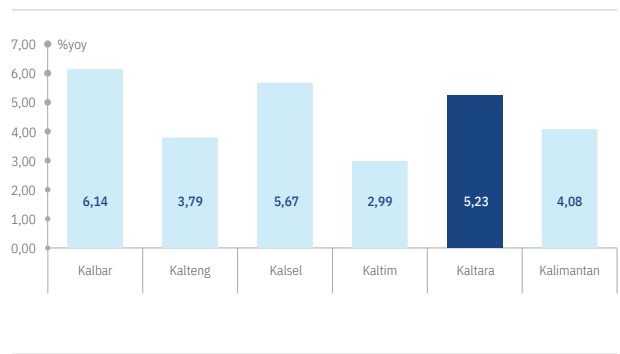


Sumber: BPS, diolah

menunjukkan kinerja positif dan menopang pertumbuhan ekonomi kaltara pada triwulan I 2026. Positifnya kinerja LU Konstruksi didorong oleh aktivitas finalisasi pembangunan salah satu tenant (smelter aluminium) di KIHI. Sementara itu, Momentum HBKN Ramadhan dan Idul Fitri juga menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Kaltara. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tertahan oleh kinerja LU Pertambangan yang mengalami kontraksi sebesar 3,13 % (yoy), seiring dengan penurunan produksi batu bara akibat pembatasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Nasional.

Dari sisi pengeluaran, termoderasinya perekonomian Kalimantan Utara triwulan I 2026 diakibatkan oleh impor barang yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja net ekspor menjadi kontributor utama dalam perhitungan PDRB dengan andil sebesar 46,13% (yoy). Impor yang meningkat didorong oleh meningkatnya permintaan bahan pangan pada momentum HBKN Ramadhan dan Idul Fitri. Namun demikian, kinerja belanja pemerintah menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Kaltara akibat meningkatnya realisasi belanja pegawai dan belanja modal yang bersumber dari APBN ataupun APBD.

Grafik I.3. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Triwulan I 2026



Sumber: BPS, diolah

1. Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2010

Tabel I.1. Pertumbuhan Ekonomi Kaltara Berdasarkan Lapangan Usaha (yoy)

Berdasarkan Lapangan Usaha	2024					2025					2026
	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I
	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,94	1,73	2,80	-2,27	1,75	1,29	3,42	3,84	1,79	2,60	2,23
Pertambangan dan Penggalian	0,48	0,10	-0,33	0,88	0,28	0,31	-0,78	-2,71	-1,17	-1,09	-3,13
Industri Pengolahan	2,43	5,47	6,35	6,69	5,26	9,68	8,34	8,02	9,89	8,99	6,48
Pengadaan Listrik, Gas	12,72	-5,32	3,97	-8,23	0,01	6,80	3,29	0,55	6,01	4,07	3,52
Pengadaan Air	7,29	8,82	6,20	7,17	7,36	6,33	2,44	0,35	0,63	2,39	-0,32
Konstruksi	11,17	11,97	8,20	16,22	11,95	3,69	11,86	13,83	14,38	11,17	17,62
Perdagangan Besar & Eceran	10,17	10,67	9,59	9,12	9,87	9,08	10,35	9,35	10,55	9,84	9,92
Transportasi dan Pergudangan	6,16	6,44	7,12	2,54	5,51	7,34	4,50	6,57	5,46	5,94	3,29
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,16	10,53	12,94	12,44	11,30	9,34	9,17	10,04	11,27	9,99	15,90
Informasi dan Komunikasi	6,92	4,89	4,69	4,08	5,12	2,38	4,12	6,21	5,48	4,56	5,07
Jasa Keuangan	9,06	6,82	6,23	3,72	6,41	4,19	0,03	-0,44	11,58	3,85	4,41
Real Estate	3,68	3,98	4,41	5,64	4,44	3,38	5,45	5,04	10,64	6,17	13,13
Jasa Perusahaan	1,41	3,49	3,38	4,14	3,12	3,01	-0,78	0,26	7,45	2,52	8,29
Administrasi Pemerintahan	-0,29	5,02	4,69	7,25	4,37	8,75	-5,52	-2,61	0,57	-0,03	13,56
Jasa Pendidikan	3,59	3,42	7,42	7,31	5,46	1,36	-0,28	-1,38	6,71	1,65	2,72
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,55	2,97	3,43	4,15	3,03	2,24	5,96	3,70	5,36	4,32	1,05
Jasa lainnya	7,78	7,06	6,86	5,60	6,81	2,87	5,65	5,22	9,65	5,89	6,72
Produk Domestik Regional Bruto	4,82	4,78	4,55	4,78	4,73	3,98	4,36	4,35	5,49	4,56	5,23

Sumber: BPS, diolah

1.2 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha

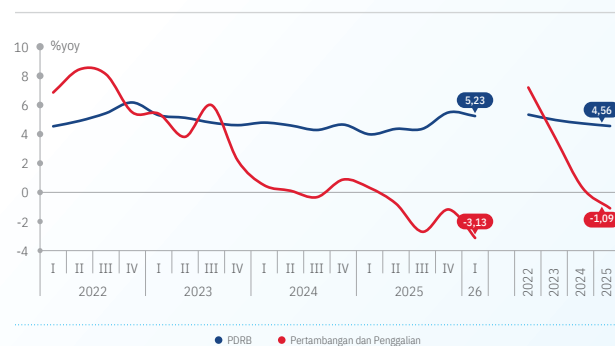
LU Konstruksi, LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta LU Administrasi Pemerintahan menunjukkan kinerja yang positif lebih tinggi dari triwulan sebelumnya dan menopang pertumbuhan pada triwulan I 2026. LU Konstruksi mengalami peningkatan seiring dengan percepatan dan finalisasi pembangunan perusahaan smelter aluminium di KIHI. LU Perdagangan tumbuh positif didorong oleh aktivitas belanja masyarakat yang terjaga pada momentum HBKN Ramadhan dan Idul Fitri disertai dengan peningkatan output produksi dari LU pertanian dan LU industri pengolahan. Sejalan dengan itu, aktivitas Administrasi Pemerintahan juga meningkat ditopang oleh pembayaran THRASN.

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara yang lebih tinggi tertahan oleh kinerja LU Pertambangan. Kinerja LU Pertambangan berkontraksi sebesar -2,23% (yoy), disebabkan hasil produksi batu bara yang menurun akibat pembatasan RKAB disertai dengan masih lemahnya permintaan negara mitra seperti Tiongkok. Meski demikian, struktur perekonomian Kaltara masih didominasi oleh LU Pertambangan dengan pangsa mencapai 23,44%, diikuti LU Pertanian (15,60%), LU Konstruksi (14,98%), dan LU Perdagangan Besar dan Eceran (13,29%). Secara akumulatif, keempat LU tersebut memiliki pangsa sebesar 67,31% terhadap perekonomian Kaltara.

Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian

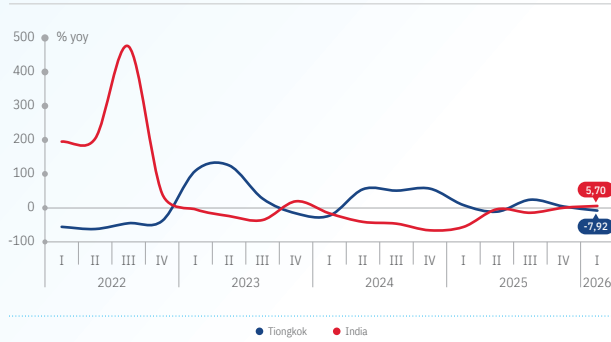
Kinerja LU Pertambangan pada triwulan laporan berkontraksi sebesar 3,13% (yoy), menurun lebih dalam dibandingkan triwulan IV 2025 yang tercatat -1,09% (yoy) dengan andil tahunan sebesar -0,79% terhadap PDRB Kaltara. Meskipun berkontraksi, LU Pertambangan dan Penggalian masih menjadi penyumbang terbesar struktur ekonomi Kaltara dengan pangsa 23,44% (Grafik I.4).

Kondisi perlambatan ini tercermin dari aktivitas produksi yang menurun, diakibatkan oleh kebijakan pembatasan RKAB disertai dengan penurunan permintaan dari negara mitra dagang utama (khususnya Tiongkok) akibat menurunnya kinerja

Grafik I.4. Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Lapangan Usaha Pertambangan

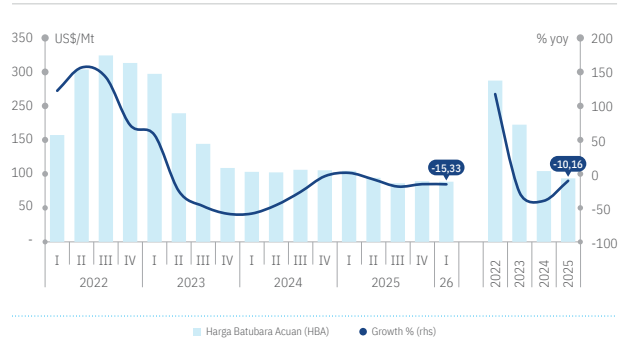
Sumber: BPS, diolah

Grafik I.5. Volume Ekspor Batu Bara Tiongkok dan India



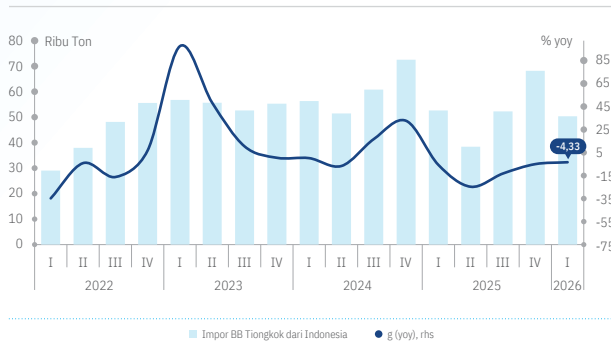
Sumber: Kubus, diolah

Grafik I.7. Harga Batubara Acuan



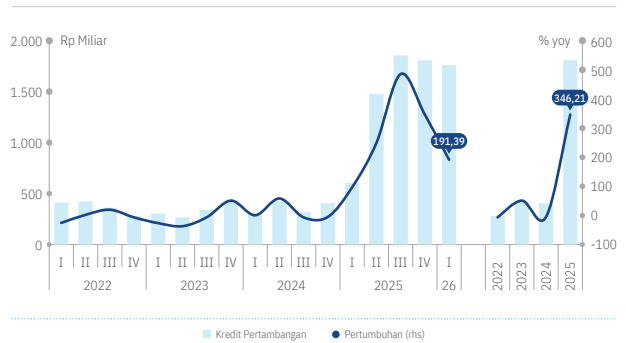
Sumber: Kementerian ESDM, diolah

Grafik I.6. Volume Impor Batu Bara Tiongkok



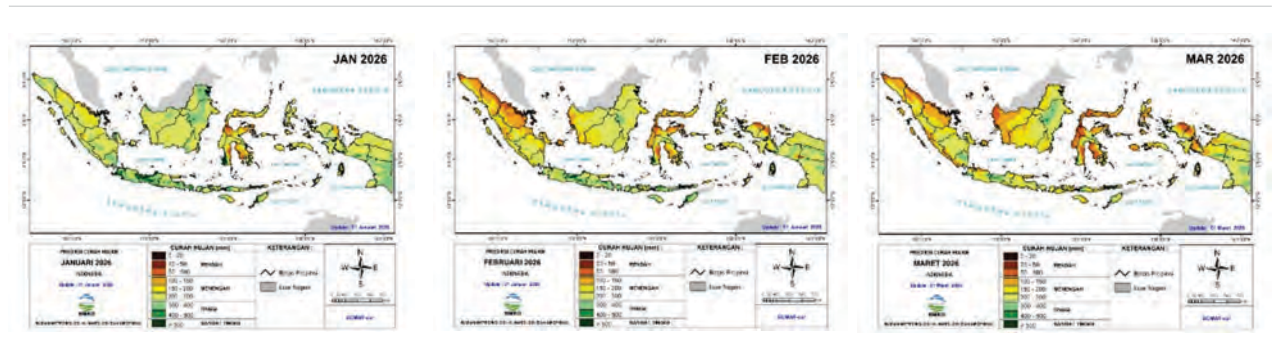
Sumber: McCloskey, diolah

Grafik I.8. Kredit Pertambangan Kaltara



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Gambar I.1. Prediksi Curah Hujan per Provinsi

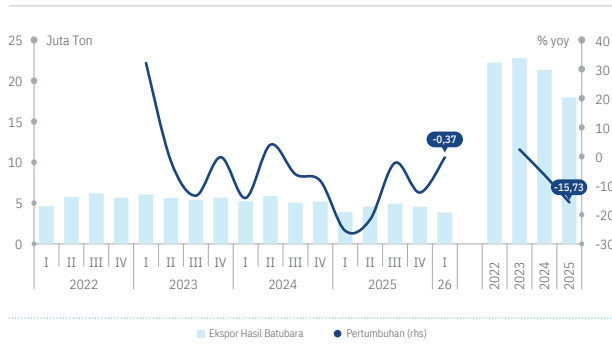


Sumber: BMKG

perekonomian. Selain itu, peningkatan intensitas curah hujan di Kaltara juga mempengaruhi penurunan hasil produksi. Gambar I.1 menunjukkan bahwa Kaltara berada pada kondisi curah hujan menengah-tinggi pada triwulan IV 2025. Di sisi lain, kondisi hujan yang terjadi di wilayah Kaltara selama triwulan I 2026 menghambat proses penambangan dan pengangkutan batu bara. Selain itu, permintaan global khususnya dari negara mitra dagang utama seperti Tiongkok pada triwulan I 2026 mengalami penurunan sebesar -7,92% (yoy) (Grafik I. 5). Berdasarkan data dari McCloskey, volume impor batu bara Tiongkok dari Indonesia pada triwulan I 2026 menurun menjadi 50,31 juta ton dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 52,59 juta ton atau turun -4,33% (yoy) (Grafik I. 6).

Dari sisi Harga Batu bara Acuan (HBA), pada triwulan I 2026 masih berada pada nilai yang rendah sebesar USD103,3/MT (Grafik I. 7) atau turun sebesar -15,33% (yoy). Selain itu, beberapa pelaku usaha juga menyampaikan bahwa penurunan permintaan ekspor batubara juga sejalan dengan transisi ke ekonomi hijau serta peningkatan hasil produksi batu bara secara mandiri. Berdasarkan data Kementerian ESDM, ekspor batu bara Kaltara pada triwulan I 2026 tercatat mengalami penurunan sebesar -0,37% (yoy) (Grafik I. 9). Meskipun demikian, permintaan domestik masih terjaga terutama digunakan untuk bahan bakar pembangkit listrik, industri semen serta *smelter* nikel di Sulawesi.

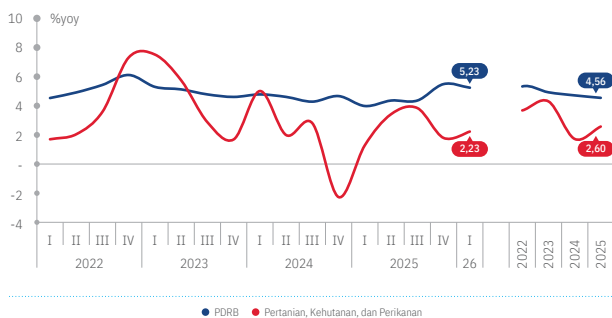
Grafik I.9. Ekspor Batu Bara



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Dari sisi pembiayaan, penyaluran kredit ke LU Pertambangan mengalami pertumbuhan sebesar 191,39% (yoy), termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 346,21% (yoy). Kinerja LU Pertambangan yang melambat pada triwulan I 2026 diperkirakan akan terus mengalami perlambatan sepanjang tahun 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh adanya pembatasan produksi batubara yang dihadapi pelaku usaha pertambangan, sehingga rencana ekspansi usaha maupun peningkatan kapasitas produksi masih belum menjadi prioritas. Hal ini terindikasi dari kredit korporasi pertambangan yang termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik I. 8). Pembiayaan pada sektor pertambangan umumnya digunakan untuk mendukung kegiatan operasional usaha, terutama dalam rangka pemeliharaan (maintenance) alat dan fasilitas produksi agar kegiatan produksi tetap berjalan lancar. Pembiayaan tersebut juga diperlukan untuk menjaga keberlanjutan operasional di tengah dinamika produksi dan harga komoditas.

Grafik I.10. Pertumbuhan Ekonomi Kaltara - Pertanian



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.11. Volume Ekspor Udang



Sumber: Dinas Bea Cukai, diolah

Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 2,23% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan IV 2025 sebesar 1,79% (yoy) (Grafik I. 10). LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki pangsa mencapai 16,66% dari total PDRB Kaltara. Sektor Pertanian juga memberikan andil pertumbuhan tahunan terhadap perekonomian Kaltara triwulan I 2026 sebesar 0,38%.

Meningkatnya kinerja LU Pertanian didorong oleh meningkatnya produksi padi dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan masuknya masa panen.

Pada triwulan laporan, produksi padi tercatat mencapai 22,45 ribu ton atau tumbuh sebesar 35,20% (yoy) yang didorong oleh program Optimasi Lahan (OPLAH) pemerintah seluas 2.119 ha. Sementara itu, pada triwulan I 2026, harga Tandan Buah Segar (TBS) termoderasi menjadi Rp3.133 per kg, atau tumbuh sebesar 6,33% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 16,06% (yoy) (Grafik I. 14). Produk TBS secara umum digunakan memenuhi pasar domestik dan diolah menjadi CPO untuk diekspor ke wilayah lain baik dalam bentuk oleochemical maupun turunannya.

Selain itu, kinerja LU Pertanian tumbuh lebih tinggi didorong oleh subsektor perikanan.

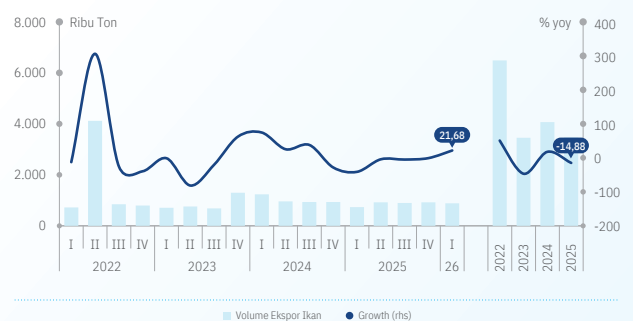
Pada triwulan laporan, komoditas perikanan tercatat tumbuh positif akibat meningkatnya permintaan ekspor dari Amerika Serikat dan India. Volume ekspor ikan mengalami peningkatan menjadi sebesar 21,68% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -0,80% (yoy) (Grafik I. 13) yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi

Grafik I.12. Volume Ekspor Rumput Laut



Sumber: Ditjen Bea Cukai, diolah

Grafik I.13. Volume Ekspor Ikan



Sumber: Ditjen Bea Cukai, diolah

Grafik I.14. Harga TBS



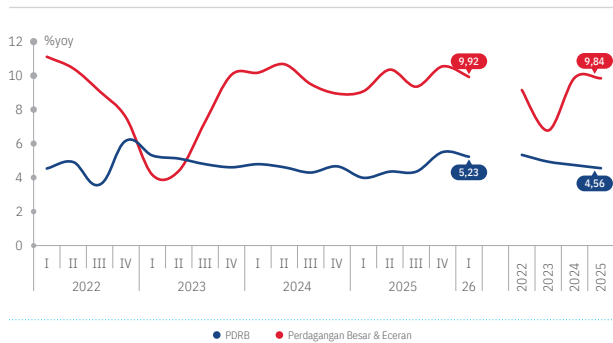
Sumber: Dinas Perkebunan, diolah

perikanan utamanya ikan budidaya (antara lain ikan bandeng). Namun demikian, volume ekspor udang masih berkontraksi sebesar 6,18% (yoy), membaik jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 17,39% (yoy) (Grafik I. 11). Komoditas perikanan lain seperti rumput laut juga mengalami penurunan, dengan ekspor tercatat mengalami kontraksi sebesar 26,49% (yoy), yang disebabkan oleh harga rumput laut yang masih pada level yang rendah. (Grafik I. 12).

Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran

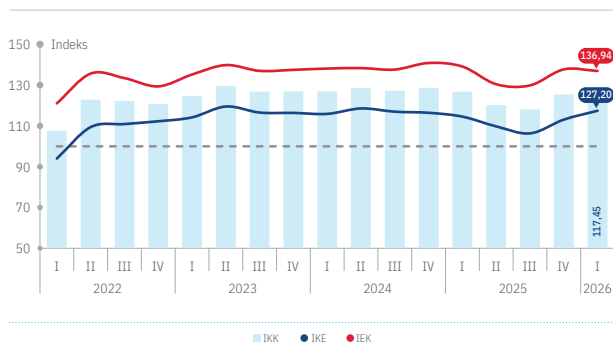
LU Perdagangan Besar dan Eceran (PBE) tumbuh positif mencapai 9,92% (yoy), termodeerasi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,55% (yoy) (Grafik I. 15). LU PBE memberikan kontribusi sebesar 13,86% terhadap struktur perekonomian Kaltara dengan andil pertumbuhan tahunan mencapai 1,32%.

Grafik I.15. Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Perdagangan



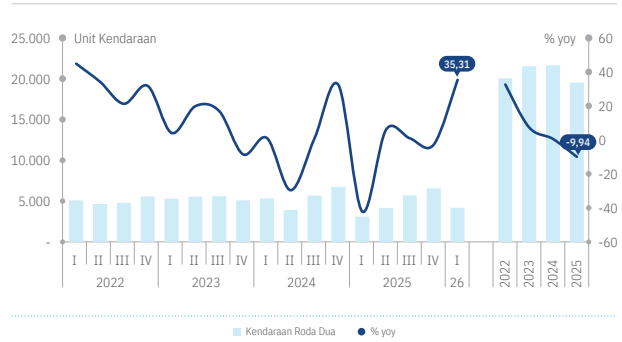
Sumber: BPS, diolah

Grafik I.16. IKK, IKE, dan IEK Kaltara



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik I.17. Volume Penjualan Kendaraan Roda Dua

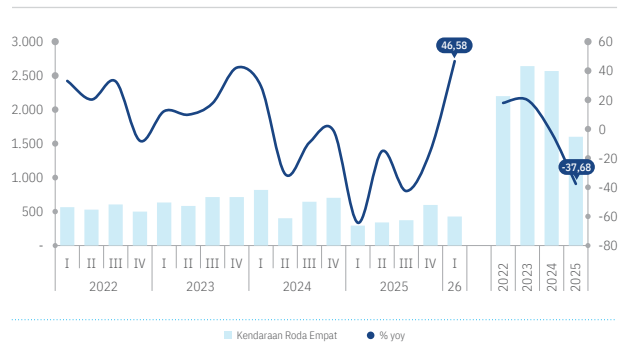


Sumber: BPPRD, diolah

LU PBE tetap tumbuh positif pada triwulan laporan didorong meningkatnya hasil output produksi pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan yang mendorong meningkatnya aktivitas belanja masyarakat di tengah meningkatnya konsumsi masyarakat pada periode HBKN Ramadhan dan Idul Fitri. Tumbuh positifnya kinerja LU Perdagangan salah satunya tercermin dari indeks keyakinan konsumen (IKK) yang optimis pada level 127,20 (Grafik I. 16). Sejalan dengan itu, positifnya pertumbuhan LU PBE didorong oleh meningkatnya volume penjualan kendaraan roda dua yang tumbuh sebesar 35,31% (yoy) diikuti penjualan kendaraan roda empat yang tumbuh sebesar 46,58% (yoy) (Grafik I.17 dan Grafik I.18).

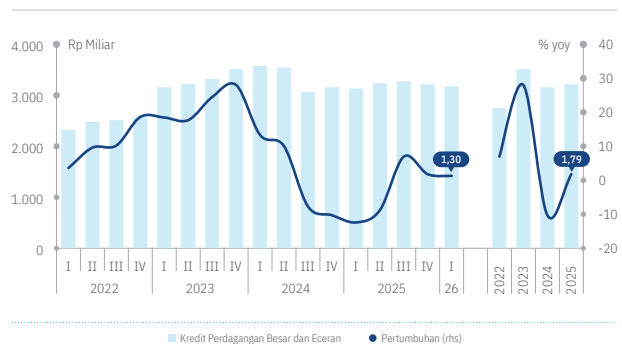
Meskipun demikian, penyaluran kredit ke LU Perdagangan tumbuh sebesar 1,30% (yoy) atau sebesar Rp3,17 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2025 sebesar Rp3,21 triliun

Grafik I.18. Volume Penjualan Kendaraan Roda Empat



Sumber: BPPRD

Grafik I.19. Kredit Perdagangan Kaltara



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

(1,79%, yoy) (Grafik I. 19). Termoderasinya kinerja kredit perdagangan diakibatkan oleh beberapa pengusaha besar yang masih wait and see dalam perencanaan investasi maupun peningkatan produksi bisnis di tengah kondisi ketidakpastiaan ekonomi global.

Lapangan Usaha Konstruksi

LU Konstruksi tumbuh sebesar 17,62% (yoy) (Grafik I. 20). Kinerja LU Konstruksi tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,38% (yoy). LU Konstruksi menguasai 13,65% pangsa perekonomian Kaltara dengan andil pertumbuhan terhadap PDRB sebesar 2,15%.

Peningkatan kinerja LU Konstruksi didorong oleh aktivitas pembangunan salah satu perusahaan di KIH Tanahkuning yang memasuki tahap finalisasi. Pembangunan infrastruktur kawasan industri seperti *jetty* kapal untuk bongkar muat pembangunan, *Water Treatment Plant* (WTP), *Dormitory* untuk pekerja serta smelter aluminium telah selesai di awal tahun 2026 sehingga ditargetkan operasional smelter aluminium tahap I akan dimulai pada tahun 2026. Pertumbuhan sektor konstruksi yang positif juga diperkirakan akan memberikan efek *multiplier* terhadap beberapa sektor seperti perdagangan dan *real estate*. Terdapat beberapa proyek infrastruktur bernilai besar di Kaltara yang masih berlanjut serta menopang sustainabilitas pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Proyek tersebut diantaranya adalah (i) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

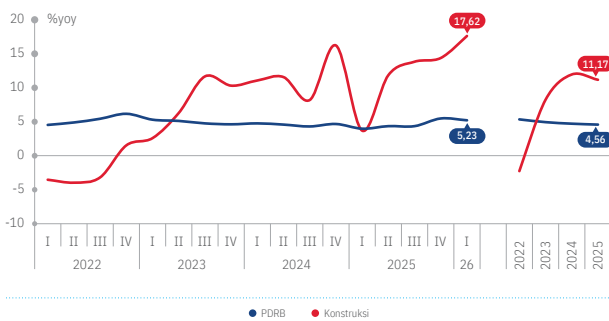
Kayan dan Sei Mentarang dengan potensi kapasitas energi mencapai 1.375 MW akan menjadi pemasok listrik di daerah KIH yang direncanakan menjadi salah satu pemasok kebutuhan listrik di Ibu Kota Nusantara (IKN); serta (ii) Pembangunan Tahap II pabrik bubur kertas di Tarakan. Namun demikian, penjualan semen masih berkontraksi sebesar -11,50% (yoy) (Grafik I. 21). Hal ini didorong oleh tahapan finalisasi pembangunan proyek fisik di KIH yang lebih banyak memanfaatkan material besi, baja, maupun bahan konstruksi lainnya.

Perkembangan Lapangan Usaha Industri Pengolahan

LU Industri Pengolahan tumbuh positif sebesar 6,48% (yoy), termoderasi dibandingkan dengan triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 9,89% (yoy) (Grafik I. 22). LU Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 8,96% dalam struktur perekonomian Kaltara dengan andil pertumbuhan tahunan sebesar 0,57%.

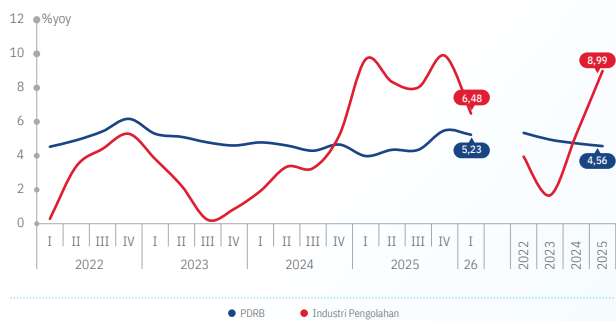
Perlambatan kinerja LU Industri Pengolahan terutama didorong oleh menurunnya produksi hasil olahan kayu. Produksi bubur kertas mengalami normalisasi sejalan dengan base year effect dimulainya produksi pada tahun sebelumnya. Sejalan dengan itu, produksi CPO Kaltara pada triwulan I 2026 mencapai 126.597 ton atau 0,23%(yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 129.050 ton (0,99, yoy). Perlambatan produksi tersebut terutama disebabkan oleh curah

Grafik I.20. Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Konstruksi



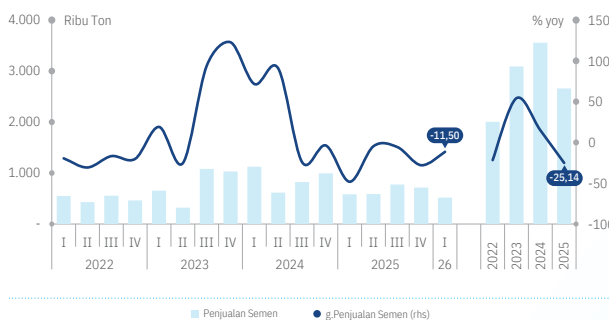
Sumber: BPS, diolah

Grafik I.22. Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Industri Pengolahan



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.21. Penjualan Semen Kaltara



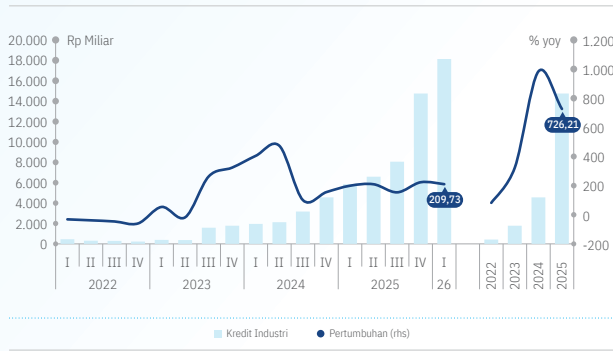
Sumber: Asosiasi Semen, diolah

Grafik I.23. Volume Ekspor Plywood



Sumber: Worldbank, diolah

Grafik I.24. Kredit Industri Kaltara



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

hujan yang tinggi, yang mengakibatkan tertahannya pasokan tandan buah segar (TBS) dari area panen ke fasilitas pengolahan. Sejalan dengan itu, terkontraksinya ekspor *plywood* sebesar 8,73% (yoy) pada triwulan I 2026 sejalan dengan menurunnya permintaan ekspor.

Termoderasinya pertumbuhan LU Industri pengolahan terkonfirmasi dari kinerja penyaluran kredit dan hasil liaison Bank Indonesia. Penyaluran kredit ke LU Industri Pengolahan mencapai Rp18,13 triliun atau tumbuh sebesar 209,17% (yoy) melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp14,74 triliun (223,17%, yoy) (Grafik I. 24). Masih tetap tumbuh positifnya penyaluran kredit ke LU Industri Pengolahan didorong oleh kegiatan operasional industri pengolahan yang meningkatkan produksi dan adanya perencanaan pembangunan Tahap II pabrik bubur kertas di Tarakan. Sejalan dengan itu, sejumlah kontak liaison menyatakan bahwa permintaan sepanjang tahun 2026 diprakirakan tetap positif seiring dengan optimisme permintaan masyarakat yang meningkat dan adanya komoditas ekspor baru yaitu Aluminium.

1.3 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pengeluaran

Dari sisi pengeluaran, perekonomian Kalimantan Utara pada triwulan I 2026 mencatat pertumbuhan positif meskipun mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja tersebut terutama disebabkan oleh termoderasinya

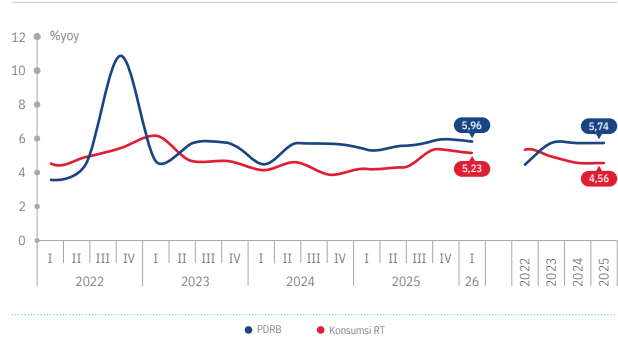
pertumbuhan Investasi dan Net Ekspor. Perlambatan investasi terutama dipengaruhi oleh mulai terbatasnya laju investasi meskipun masih ditopang oleh realisasi investasi bangunan, seiring dengan berlanjutnya pembangunan Tahap II pabrik kertas di Tarakan serta pembangunan tenant KIH di Tanah Kuning. Sementara itu, net ekspor mengalami perlambatan akibat penurunan hasil ekspor batubara ke negara mitra dagang utama. Lebih lanjut, positifnya kinerja PDRB Kaltara pada triwulan I 2026 ditopang oleh kinerja Belanja Pemerintah yang tumbuh positif sejalan dengan meningkatnya belanja pegawai dalam rangka pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) di awal tahun 2026 (Tabel I.2).

Berdasarkan pangsa, Net Ekspor dan PMTB masih mendominasi perekonomian Kaltara, dengan total sebesar 76,16%. Net ekspor menjadi penyumbang tertinggi pangsa PDRB triwulan I 2026 mencapai 46,13%, meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 43,93%. Sementara itu, pangsa PMTB terhadap perekonomian Kaltara terpantau menurun terbatas dibandingkan dengan triwulan sebelumnya menjadi 30,03% dari 30,66%. Sementara itu, konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan konsumsi LNPRM masing-masing memiliki pangsa sebesar 16,47%, 6,25%, dan 0,81%.

Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi Rumah Tangga (RT) pada triwulan I 2026 tumbuh positif meskipun termoderasi terbatas. Konsumsi RT Kalimantan Utara tumbuh sebesar 5,96% (yoy), meningkat dari

Grafik I.25. Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Konsumsi Rumah Tangga



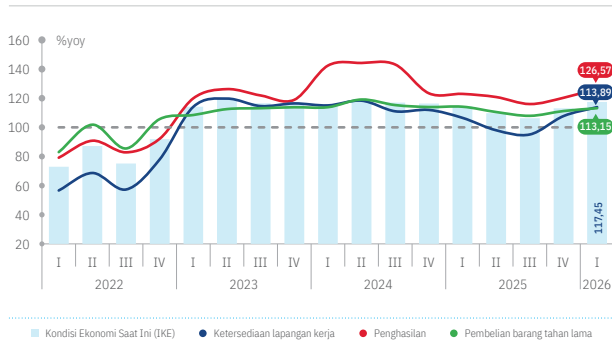
Sumber: BPS, diolah

Tabel I.2. Pertumbuhan Ekonomi Kaltara Berdasarkan Pengeluaran (yoy)

Berdasarkan Pengeluaran	2024					2025					2026
	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I
	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%
Konsumsi RT	5,78	5,77	5,61	5,87	5,73	5,83	5,47	5,65	5,99	5,74	5,96
Konsumsi LNPRM	20,24	12,87	7,78	6,94	11,60	2,88	6,43	4,73	4,64	4,66	4,59
Konsumsi Pemerintah	4,63	4,65	9,03	12,65	8,89	9,06	-10,07	-2,59	-6,53	-3,79	16,88
PMTB	10,86	7,41	4,31	5,18	6,84	0,39	4,92	5,95	6,49	4,47	6,01
Perubahan Inventori	1,48	2,62	-2,36	-8,87	-1,82	0,46	-0,24	-4,63	8,58	0,84	-7,55
Ekspor LN	-0,72	2,46	3,09	3,34	2,01	2,53	2,74	2,88	3,74	2,98	4,24
Impor LN	-1,83	2,34	2,63	3,91	1,78	0,31	0,08	1,92	1,03	0,84	5,15
Produk Domestik Regional Bruto	4,78	4,78	4,55	4,78	4,73	3,98	4,36	4,35	5,49	4,56	5,23

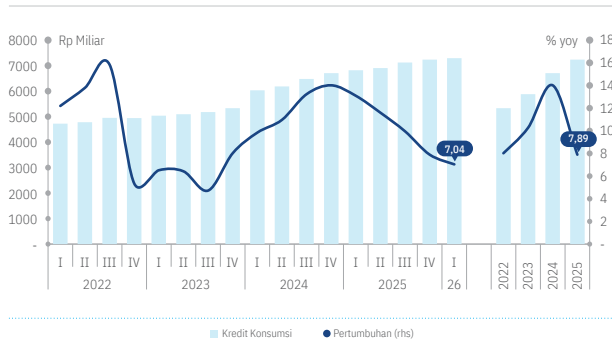
Sumber: BPS, diolah

Grafik I.26. Indeks Survei Konsumen



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik I.27. Kredit Konsumsi



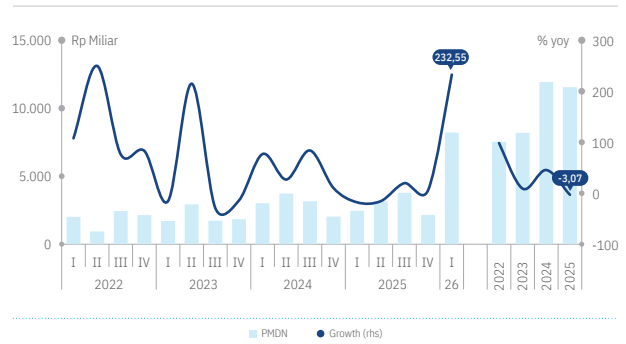
Sumber: BPS, diolah

triwulan IV 2025 sebesar 5,99% (Grafik I. 25). Adapun andil konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara sebesar 0,98%. Pertumbuhan Konsumsi RT yang positif didorong oleh terjaganya konsumsi masyarakat pada momentum HBKN Ramadhan dan Idul Fitri. Kinerja Konsumsi RT ini juga sejalan Survei Konsumen yang dilakukan Bank Indonesia dengan perkembangan Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) pada triwulan I 2026 yang mencapai pada level 117,45 (Grafik I. 26) atau masih berada di level optimis dan meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Selain itu, kinerja konsumsi RT yang termoderasi sejalan dengan pertumbuhan Kredit Konsumsi yang masih positif sebesar 7,04% (yoy) (Grafik I. 27). Masih tumbuhnya Kredit Konsumsi sejalan dengan indikator keyakinan konsumen yang berada pada zona optimis (indeks lebih besar dari 100) khususnya terhadap ekspektasi penghasilan masyarakat kedepan.

Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) - Investasi

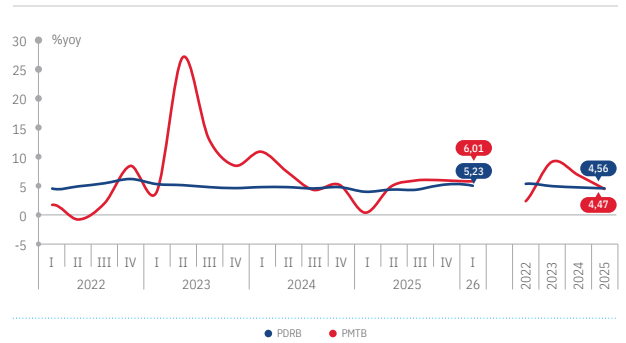
Kinerja PMTB pada triwulan I 2026 masih tumbuh tinggi sejalan dengan pembangunan proyek strategis di Kaltara. Kinerja investasi tumbuh sebesar 6,01% (yoy), termoderasi dari triwulan sebelumnya sebesar 6,49% (yoy) (Grafik I. 28). Kinerja PMTB tersebut memberikan andil sebesar 1,79% terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara pada triwulan I 2026.

Grafik I.29. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)



Sumber: BKPM, diolah

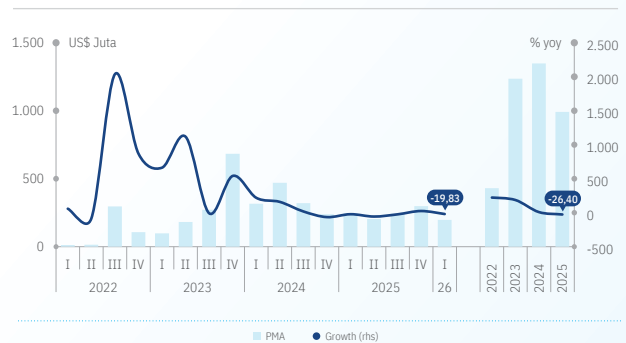
Grafik I.28. Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – PMTB



Sumber: BPS, diolah

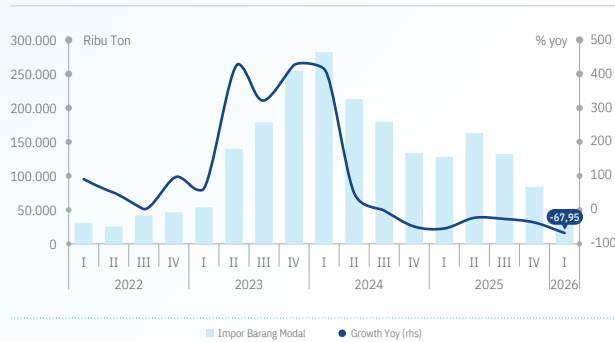
Realisasi investasi Provinsi Kalimantan Utara triwulan I 2026 tumbuh lebih tinggi secara nominal pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sementara pada Penanaman Modal Asing (PMA) cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan IV 2025. Berdasarkan data BKPM, nilai realisasi PMDN triwulan I 2026 mencapai sebesar Rp8,21 Triliun, tumbuh sebesar 232,55% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik I. 29). Berbanding terbalik, nilai realisasi PMA sebesar USD197,29 juta, atau terkontraks sebesar -19,83% (yoy) (Grafik I. 30). Sejalan dengan PMA, pertumbuhan impor barang modal pada triwulan I 2026 juga masih terkontraksi sebesar -67,95% (yoy).

Grafik I.30. Penanaman Modal Asing (PMA)



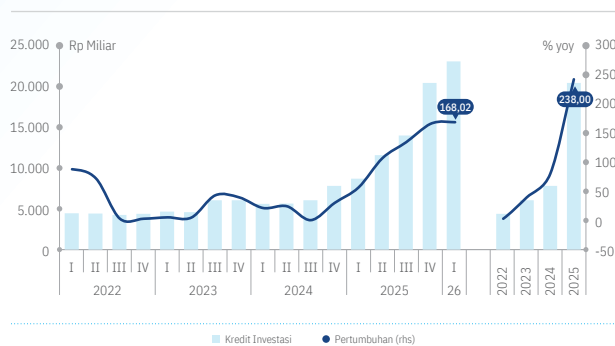
Sumber: BKPM, diolah

Grafik I.31. Impor Barang Modal



Sumber: Kubus Eksim Bank Indonesia, diolah

Grafik I.32. Kredit Investasi Kaltara



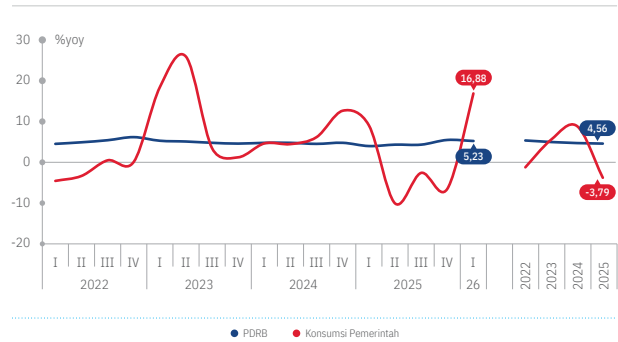
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Kredit Investasi menjadi salah satu indikator kinerja adanya investasi yang baru sehingga berdampak bagi pertumbuhan ekonomi Kaltara. Dari sisi pembiayaan, penyaluran kredit investasi triwulan I 2026 tumbuh positif lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Realisasi kredit investasi triwulan laporan tercatat sebesar Rp22,99 Triliun atau tumbuh sebesar 168,02% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp xx triliun (xx%, yoy) (Grafik I. 3232). Kondisi tersebut sejalan dengan informasi sejumlah kontak liaison KPwBI Kaltara yang optimis terhadap berlanjutnya pertumbuhan ekonomi ke depan dan adanya ekspansi pembangunan tahap selanjutnya pada beberapa proyek strategis di Kaltara.

Perkembangan Konsumsi Pemerintah

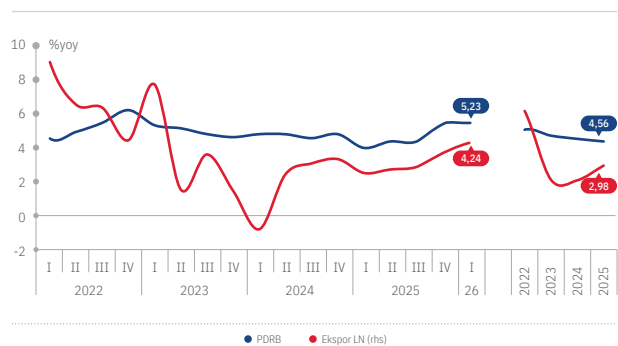
Konsumsi pemerintah triwulan I 2026 tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Konsumsi Pemerintah di Kalimantan Utara tumbuh sebesar 16,88 (yoy) dari triwulan sebelumnya sebesar -6,53% (Grafik I. 33). Realisasi konsumsi

Grafik I.33. Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Konsumsi Pemerintah



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.34. Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Ekspor Luar Negeri



Sumber: BPS, diolah

pemerintah tersebut memberikan andil sebesar 0,95% terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara triwulan I 2026. Meningkatnya pertumbuhan konsumsi pemerintah Kalimantan Utara didorong oleh realisasi belanja pegawai melalui pembayaran THR kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi maupun Kota/Kabupaten.

Perkembangan Ekspor

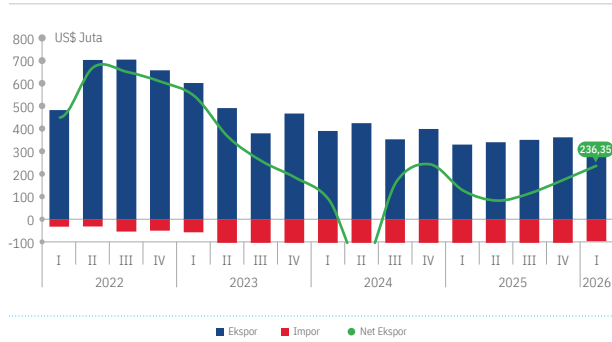
Kinerja ekspor triwulan I 2026 termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu tumbuh sebesar 4,24% (yoy) dari triwulan sebelumnya sebesar 4,61% (yoy) (Grafik I. 34). Realisasi ekspor tersebut memberikan andil sebesar 4,26% terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara pada triwulan I 2026. Termoderasinya kinerja ekspor tersebut disebabkan oleh menurunnya ekspor batu bara kepada negara mitra dagang utama sejalan dengan penurunan kuota RKAB batubara tahun 2026.

Tabel I.3. Nilai Perdagangan Internasional Kaltara

Wilayah	2024				2025				2026
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Kaltara (US\$ Juta)									
Ekspor	389,19	424,05	352,61	398,23	329,20	339,38	350,28	361,45	321,70
Impor	303,68	626,57	188,31	155,63	203,47	257,11	234,65	184,87	85,34
Net Ekspor	85,51	-202,52	164,30	242,59	125,72	82,27	115,63	176,58	236,35

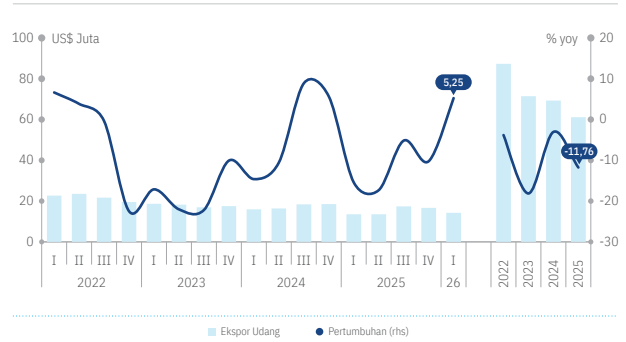
Sumber: BPS, diolah

Grafik I.35. Neraca Perdagangan Luar Negeri Kaltara



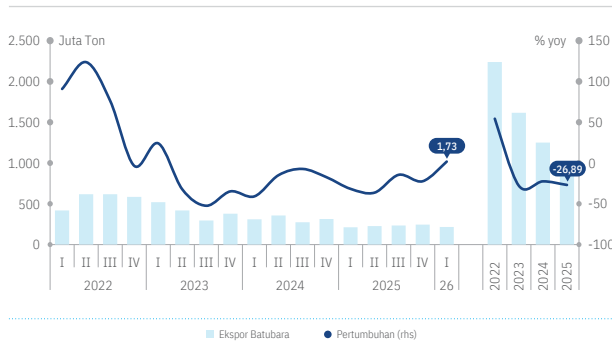
Sumber: BPS, diolah

Grafik I.38. Ekspor Udang



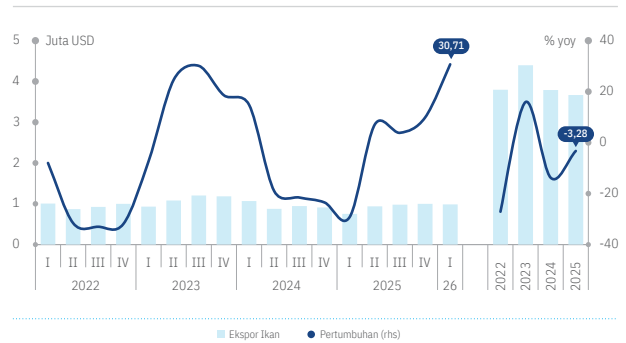
Sumber: Ditjen Bea Cukai, diolah

Grafik I.36. Ekspor Batu bara



Sumber: Kubus Eksim, diolah

Grafik I.39. Ekspor Ikan



Sumber: Ditjen Bea Cukai, diolah

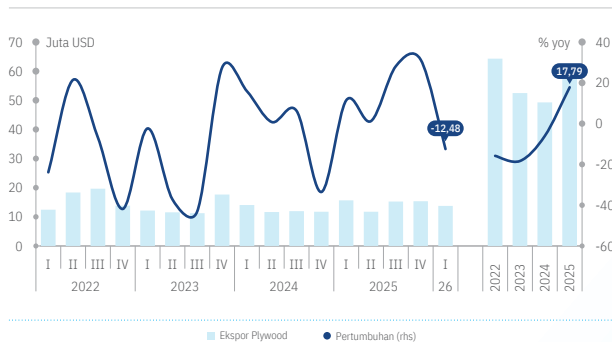
Secara nilai, kinerja ekspor juga tercatat melambat. Total ekspor tercatat sebesar USD321,70 juta, menurun dari triwulan sebelumnya sebesar USD380,45 juta (Tabel I.3). Sejalan dengan itu, nominal impor juga tercatat mengalami perlambatan dari sebelumnya USD194,09 juta menjadi USD85,34 juta.

Perlambatan kinerja ekspor Kaltara ini terutama disebabkan oleh LU Pertambangan (komoditas batubara) dan Industri Pengolahan (normalisasi ekspor komoditas bubuk kayu ke Tiongkok). Namun demikian, kinerja ekspor yang masih tumbuh positif ini berbanding terbalik dengan ekspor batu bara nasional yang tercatat tumbuh positif sebesar 1,73% (yoy) didorong oleh faktor *base year effect* yang rendah pada triwulan yang sama pada tahun lalu (Grafik I. 36).

Selain itu, pendorong tetap tumbuh positifnya kinerja ekspor triwulan I 2026 dipengaruhi oleh kinerja ekspor komoditas udang dan ikan yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Ekspor udang tumbuh sebesar 5,25% (yoy) dari triwulan sebelumnya -5,75% (yoy) (Grafik I. 38). Sejalan dengan itu, ekspor ikan juga tumbuh sebesar 30,71% (yoy) sejalan dengan meningkatnya permintaan ikan bandeng lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 9,82% (yoy) (Grafik I. 39).

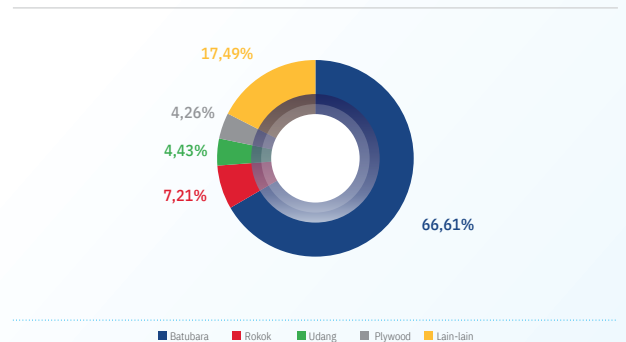
Ekspor Provinsi Kalimantan Utara didominasi komoditas mineral nonmigas dengan tujuan negara ekspor utama adalah Tiongkok, India, dan Korea Selatan. Berdasarkan kelompoknya, ekspor

Grafik I.37. Ekspor Plywood



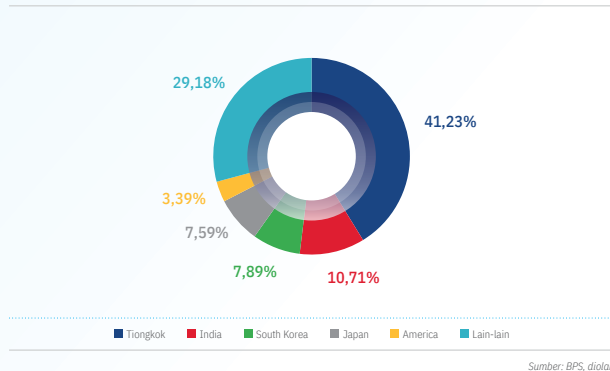
Sumber: Kubus Eksim, diolah

Grafik I.40. Komoditas Utama Ekspor Triwulan I 2026



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.41. Negara Utama Tujuan Ekspor Triwulan I 2026

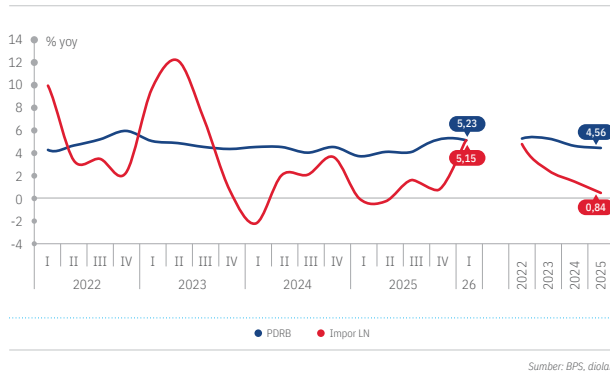


Kaltara pada triwulan I 2026 masih didominasi oleh komoditas mineral nonmigas, terutama batu bara yang memiliki pangsa sebesar 66,61% dari total nominal ekspor. Sementara itu, ekspor rokok, udang, dan kayu lapis (*plywood*) memiliki pangsa masing-masing sebesar 7,21%, 4,43%, dan 4,26% (Grafik I. 40). Berdasarkan negara tujuan ekspor, Tiongkok, India, dan Korea Selatan merupakan negara tujuan utama ekspor utama Kaltara, masing-masing dengan pangsa 41,23%, 10,71%, dan 7,89% (Grafik I. 41).

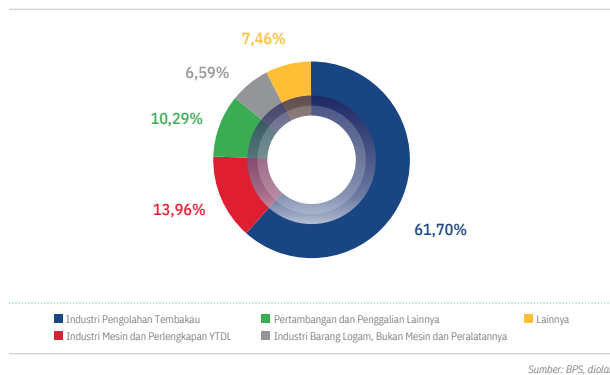
Perkembangan Impor

Impor Kaltara triwulan I 2026 tercatat meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kinerja impor tumbuh sebesar 5,15% (yoy) lebih tinggi/rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,03% (yoy).

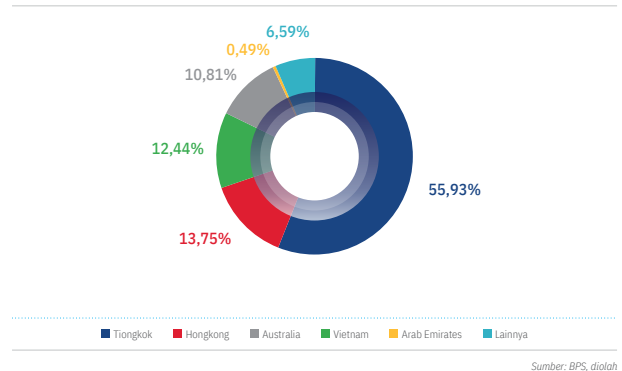
Grafik I.42. Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Impor Luar Negeri



Grafik I.43. Komoditas Utama Impor Triwulan I 2026



Grafik I.44. Negara Utama Asal Impor Triwulan I 2026



Berdasarkan komoditas, impor Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan I 2026 didominasi oleh industri pengolahan tembakau sebesar 61,70%, diikuti oleh industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar 13,96%, dan pertambangan dan penggalian lainnya sebesar 10,29% (Grafik 1. 43). Peningkatan impor diperkirakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan konstruksi sejalan dengan pembangunan proyek strategis di Kaltara. Kinerja impor yang masih tumbuh positif sejalan dengan finalisasi pembangunan salah satu *tenant* di KIHI serta sejumlah proyek lainnya di Kaltara. Hal ini mendorong peningkatan nilai dan volume impor komoditas benda-benda dari besi dan baja, mesin/peralatan listrik, dan lainnya. Berdasarkan negara asalnya, mayoritas impor berasal dari Tiongkok dengan pangsa 55,93% diikuti dengan Hongkong sebesar 13,75%, dan Australia sebesar 12,44%.

1.4 Kondisi Fiskal - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Pagu anggaran pendapatan dan belanja APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan I 2026 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sejalan dengan kebijakan efisiensi dan penyesuaian alokasi anggaran pemerintah. Pagu anggaran pendapatan tercatat sebesar Rp9,05 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan I 2025 sebesar Rp11,29 triliun atau berkontraksi sebesar 19,84% (yoy). Penurunan tersebut sejalan dengan berkurangnya alokasi transfer pemerintah pusat serta penyesuaian target pendapatan daerah.

Sejalan dengan itu, pagu anggaran belanja juga mengalami penurunan dari Rp12,99 triliun pada triwulan I 2025 menjadi Rp10,56 triliun pada triwulan I 2026 atau berkontraksi sebesar 18,66% (yoy). Penurunan pagu belanja terutama dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi belanja pemerintah, khususnya pada komponen belanja operasional dan belanja modal.

Dari sisi realisasi, pendapatan APBD hingga triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp1,92 triliun, sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar

Tabel I.4. Pagu dan Realisasi APBD Pemprov Kaltara Triwulan I 2025 dan Triwulan I 2026

Uraian	Anggaran (Rp Juta)		Realisasi (Rp Juta)		% Realisasi thdp Pagu		g.2026 (yoy)
	I 2025	I 2026	I 2025	I 2026	I 2025	I 2026	
Pendapatan	11.294.360	9.053.247	2.068.145	1.922.254	18,31	21,23	-7,05%
PAD	1.787.159	1.832.580	219.854	255.463	12,30	13,94	16,20%
Pendapatan Transfer	9.487.574	7.194.811	1.848.097	1.666.104	19,48	23,16	-9,85%
Lain-lain Pendapatan yang Sah	19.627	25.856	194	687	0,99	2,66	254,12%
Belanja	12.986.736	10.563.398	1.391.018	1.371.011	10,71	12,98	-1,44%
Belanja Operasional	8.525.161	7.328.392	1.182.175	1.220.031	13,87	16,65	3,20%
Belanja Modal	2.783.239	1.916.163	9.079	76.790	0,33	4,01	745,80%
Belanja Tidak Terduga	73.893	77.303	1.789	1.914	2,42	2,48	6,99%
Transfer	1.604.443	1.241.540	197.975	72.276	12,34	5,82	-63,49%

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltara

Rp2,07 triliun atau terkontraksi sebesar 7,05% (yoy). Meskipun demikian, persentase realisasi terhadap pagu meningkat menjadi 21,23%, lebih tinggi dibandingkan capaian triwulan I 2025 sebesar 18,31%. Peningkatan rasio realisasi tersebut menunjukkan bahwa kinerja penyerapan pendapatan daerah relatif lebih baik di tengah penurunan pagu anggaran.

Dari sisi belanja, realisasi belanja pada triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp1,37 triliun, sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,39 triliun atau mengalami kontraksi sebesar 1,44% (yoy). Namun demikian, persentase realisasi belanja terhadap pagu meningkat menjadi 12,98% dari sebelumnya 10,71% pada triwulan I 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan belanja pemerintah daerah mulai menunjukkan perbaikan efektivitas penyerapan anggaran meskipun masih berada dalam fase awal tahun anggaran.

Secara umum, kondisi tersebut mencerminkan bahwa kebijakan efisiensi fiskal masih memengaruhi kapasitas APBD Provinsi Kalimantan Utara pada awal tahun 2026. Namun, peningkatan rasio realisasi terhadap pagu baik pada sisi pendapatan maupun belanja menunjukkan adanya perbaikan kualitas pengelolaan anggaran dan akselerasi penyerapan dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp1,92 triliun atau 21,23% dari total pagu anggaran pendapatan tahun 2026. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan persentase realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 18,31%, meskipun secara nominal mengalami penurunan dibandingkan triwulan I 2025 sebesar Rp2,07 triliun. Secara tahunan, realisasi pendapatan mengalami kontraksi sebesar 7,05% (yoy), terutama dipengaruhi oleh menurunnya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi hingga triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp255,46 miliar atau 13,94% dari pagu, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp219,86 miliar atau 12,30% dari pagu. Secara tahunan, PAD tumbuh sebesar 16,20% (yoy). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh membaiknya realisasi Pajak Daerah serta meningkatnya kontribusi komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Persentase realisasi Pajak Daerah terhadap pagu meningkat dari 17,10% menjadi 18,42%, sementara realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meningkat signifikan dari 1,76% menjadi 36,59%. Di sisi lain, realisasi Retribusi Daerah masih relatif rendah sebesar 2,88% dari pagu.

Sementara itu, Pendapatan Transfer tercatat sebesar Rp1,67 triliun atau 23,16% dari pagu, lebih rendah dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,85 triliun. Secara tahunan, Pendapatan Transfer mengalami kontraksi sebesar 9,85% (yoy), terutama dipengaruhi oleh menurunnya realisasi Transfer Pemerintah Pusat. Namun demikian, persentase realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pagu meningkat menjadi 32,53% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 26,57%, menunjukkan penyaluran DAU yang relatif lebih baik pada awal tahun.

Adapun realisasi komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah tercatat sebesar Rp687 juta atau 2,66% dari pagu, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp194 juta. Secara tahunan, komponen ini tumbuh sebesar 254,12% (yoy), meskipun kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih relatif terbatas.

Dalam rangka mendorong akselerasi penerimaan PAD, khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah, Bank Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara terus memperkuat implementasi elektronifikasi transaksi melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah

Tabel I.5. Realisasi Pendapatan APBD Pemprov Kaltara Triwulan I 2025 dan Triwulan I 2026

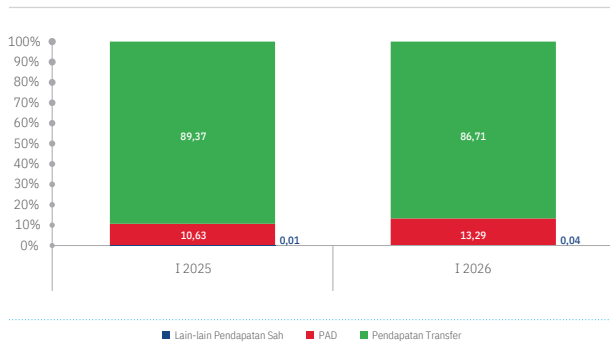
Uraian	Anggaran (Rp Juta)		Realisasi (Rp Juta)		% Realisasi thdp pagu		g.2026 (yoy)
	I 2025	I 2026	I 2025	I 2026	I 2025	I 2026	
Pendapatan (I+II+III)	11.294.360	9.053.247	2.068.146	1.922.253	18,31	21,23	-7,05%
I. PAD	1.787.158	1.832.580	219.855	255.462	12,30	13,94	16,20%
Pajak daerah	1.105.337	1.082.393	189.041	199.386	17,10	18,42	5,47%
Retribusi daerah	52.490	426.721	9.958	12.295	18,97	2,88	23,47%
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	54.395	68.194	959	24.949	1,76	36,59	2501,56%
Lain-lain PAD yang sah	574.936	255.272	19.897	18.832	3,46	7,38	-5,35%
II. Pendapatan Transfer	9.487.575	7.194.811	1.848.097	1.666.104	19,48	23,16	-9,85%
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	9.144.243	6.792.115	1.848.097	1.666.104	20,21	24,53	-9,85%
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	4.037.178	1.333.617	776.765	215.994	19,24	16,20	-72,19%
Dana Alokasi Umum	3.940.961	4.351.056	1.047.071	1.415.560	26,57	32,53	35,19%
Dana Alokasi Khusus	756.464	774.333	24.260	34.549	3,21	4,46	42,41%
Transfer Antar Daerah	343.332	402.696	-	-	-	-	-
III. Lain-lain Pendapatan yang sah	19.627	25.856	194	687	0,99	2,66	254,12%

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Kaltara

(TP2DD). Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kanal pembayaran digital, optimalisasi penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), serta perluasan pembayaran non-tunai pada sektor layanan publik dan transportasi. Ke depan, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan penerimaan daerah, memperkuat transparansi transaksi, serta mendukung peningkatan PAD secara berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah, Pendapatan Transfer masih mendominasi struktur pendapatan Pemprov Kalimantan Utara hingga triwulan I 2026 dengan pangsa sebesar 86,71%, relatif menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 89,37%. Sementara itu, pangsa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat meningkat menjadi 13,29% pada triwulan I 2026, dibandingkan dengan 10,63% pada periode yang sama tahun 2025. Peningkatan ini ditopang oleh realisasi positif pada komponen Retribusi Daerah yang menunjukkan adanya perbaikan pada aspek kemandirian fiskal daerah.

Grafik I.45. Komponen Realisasi Pendapatan APBD Pemprov Kaltara Triwulan I 2025 dan Triwulan I 2026



Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Kaltara

Adapun lain-lain Pendapatan yang sah mengalami kenaikan dengan pangsa mencapai 0,04% pada triwulan I 2026, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 0,01%. Secara keseluruhan, komposisi pendapatan ini menunjukkan bahwa meskipun ketergantungan terhadap dana Transfer Pemerintah Pusat masih cukup besar, terdapat perbaikan kontribusi PAD dan lain-lain Pendapatan yang Sah yang meningkat. Oleh karena itu, penguatan upaya digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui forum TP2DD diharapkan dapat terus mendorong peningkatan PAD sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Realisasi Belanja Daerah

Penyerapan anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara hingga triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp1,37 triliun atau 12,98% dari total pagu anggaran belanja tahun 2026. Capaian tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,39 triliun, namun secara persentase terhadap pagu mengalami peningkatan dibandingkan triwulan I 2025 sebesar 10,71%. Secara tahunan, realisasi belanja mengalami kontraksi terbatas sebesar 1,44% (yoy).

Berdasarkan komponennya, Belanja Operasional tercatat sebesar Rp1,22 triliun atau 16,65% dari pagu, meningkat dibandingkan triwulan I 2025 sebesar Rp1,18 triliun atau 13,87% dari pagu. Secara tahunan, Belanja Operasional tumbuh sebesar 3,20% (yoy), mencerminkan terjaganya realisasi belanja rutin pemerintah daerah pada awal tahun anggaran.

Sementara itu, Belanja Modal terealisasi sebesar Rp76,79 miliar atau 4,01% dari pagu, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp9,08 miliar atau

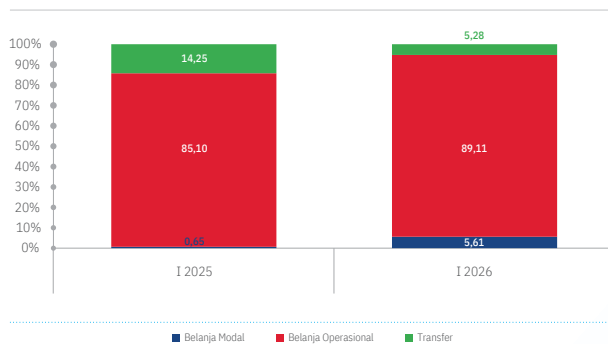
Tabel I.6. Realisasi Belanja APBD Pemprov Kaltara Triwulan I 2025 dan Triwulan I 2026

Uraian	Anggaran (Rp Juta)		Realiasi (Rp Juta)		% Realisasi thdp pagu		g.2026 (yoy)
	I 2025	I 2026	I 2025	I 2026	I 2025	I 2026	
BELANJA (I+II+III+IV)	12.986.734	10.563.398	1.391.017	1.371.011	10,71	12,98	-1,44%
I. Belanja Operasional	8.525.159	7.328.393	1.182.175	1.220.031	13,87	16,65	3,20%
Belanja Pegawai	4.300.024	3.919.194	856.205	926.365	19,91	23,64	8,19%
Belanja Barang dan Jasa	3.637.262	3.020.918	302.635	276.571	8,32	9,16	-8,61%
Belanja Subsidi	90.673	44.550	2.586	3.683	2,85	8,27	42,42%
Belanja Hibah	476.181	332.763	20.717	13.185	4,35	3,96	-36,36%
Belanja Bantuan Sosial	21.019	10.968	32	227	0,15	2,07	609,38%
II. Belanja Modal	2.783.239	1.916.163	9.078	76.791	0,33	4,01	745,90%
Belanja Tanah	47.521	10.406	0	0	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	428.270	201.427	3.946	3.084	0,92	1,53	-21,84%
Belanja Gedung dan Bangunan	869.235	683.383	1.028	40.563	0,12	5,94	3845,82%
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.408.146	1.002.208	3.528	33.043	0,25	3,30	836,59%
Belanja Aset Tetap Lainnya	10.844	2.886	77	4	0,71	0,14	-94,81%
Belanja Aset Lainnya	19.223	15.853	499	97	2,60	0,61	-80,56%
III. Belanja tidak terduga	73.893	77.303	1.789	1.914	2,42	2,48	6,99%
Belanja tidak terduga	73.893	77.303	1.789	1.914	2,42	2,48	6,99%
IV. Transfer	1.604.443	1.241.539	197.975	72.275	12,34	5,82	-63,49%

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Kaltara

0,33% dari pagu. Secara tahunan, Belanja Modal tumbuh sebesar 745,90% (yoy), meskipun secara rasio terhadap pagu masih relatif rendah. Peningkatan ini mengindikasikan mulai berjalannya akselerasi belanja investasi pemerintah daerah pada awal tahun 2026.

Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar Rp1,91 miliar atau 2,48% dari pagu, meningkat dibandingkan triwulan I 2025 sebesar Rp1,79 miliar atau 2,42% dari pagu. Secara tahunan, komponen ini tumbuh sebesar 6,99% (yoy). Adapun Belanja Transfer tercatat sebesar Rp72,28 miliar atau 5,82% dari pagu, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp197,98 miliar atau 12,34% dari pagu, sehingga terkonsentrasi sebesar 63,49% (yoy).

Grafik I.46. Komponen Realisasi Belanja APBD Pemprov Kaltara Triwulan I 2025 dan Triwulan I 2026

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Kaltara

Secara keseluruhan, kinerja belanja daerah Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan I 2026 masih tertahan, terutama dipengaruhi oleh penurunan Belanja Transfer. Namun, peningkatan realisasi Belanja Operasional dan Belanja Modal menunjukkan adanya perbaikan awal dalam penyerapan anggaran, khususnya pada belanja rutin dan belanja investasi pemerintah daerah.

Berdasarkan pangsa realisasi belanja, struktur belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan I 2026 masih didominasi oleh Belanja Operasional dengan kontribusi sebesar 89,11% terhadap total realisasi belanja daerah. Pangsa tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 85,10%, menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah pada awal tahun masih berfokus pada pemenuhan belanja rutin dan operasional pemerintahan (Grafik I.46).

Sementara itu, kontribusi Belanja Modal meningkat signifikan menjadi 5,61% pada triwulan I 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar 0,65%. Peningkatan pangsa tersebut mencerminkan mulai meningkatnya realisasi belanja investasi pemerintah daerah pada awal tahun anggaran, khususnya untuk mendukung kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset pemerintah. Meskipun demikian, porsi masih relatif terbatas dibandingkan Belanja Operasional sehingga ruang fiskal untuk akselerasi pembangunan daerah masih perlu diperkuat.

Di sisi lain, pangsa Belanja Transfer tercatat sebesar 5,28%, lebih rendah dibandingkan triwulan I 2025 sebesar 14,25%. Penurunan kontribusi Belanja Transfer tersebut sejalan dengan melambatnya penyaluran transfer kepada pemerintah kabupaten/kota serta penyesuaian kapasitas fiskal daerah pada awal tahun 2026.

Secara keseluruhan, struktur realisasi belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan I 2026 menunjukkan dominasi Belanja Operasional yang masih cukup tinggi. Namun demikian, mulai meningkatnya porsi Belanja Modal mengindikasikan adanya perbaikan arah penyerapan anggaran menuju belanja yang lebih produktif dan mendukung pembangunan daerah.

1.5 Kondisi Fiskal - APBD Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara

Realisasi Pendapatan Spasial

Realisasi pendapatan di 5 (lima) Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara pada triwulan I 2026 secara agregat tercatat sebesar Rp1,26 triliun atau 18,65% dari total pagu anggaran pendapatan tahun 2026 sebesar Rp6,77 triliun. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun

sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp1,49 triliun atau 18,01% dari pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp8,30 triliun. Secara tahunan, realisasi pendapatan Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara mengalami perlambatan sejalan dengan menurunnya kapasitas fiskal daerah dan penyesuaian pagu anggaran pada tahun 2026.

Meskipun secara nominal realisasi pendapatan mengalami penurunan dibandingkan triwulan I 2025, persentase realisasi terhadap pagu menunjukkan sedikit peningkatan menjadi 18,65% dibandingkan periode sebelumnya sebesar 18,01%. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara masih mampu menjaga kinerja penyerapan pendapatan daerah secara relatif stabil pada awal tahun anggaran di tengah proses penyesuaian fiskal daerah.

Secara umum, kinerja pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara pada triwulan I 2026 menunjukkan bahwa peningkatan pengelolaan fiskal daerah meskipun ruang fiskal mengalami tekanan akibat penurunan pagu anggaran dan perlambatan penerimaan daerah.

Tabel I.7. Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/Kota Kaltara Triwulan I 2025 dan Triwulan I 2026

	2025			2026		
	Anggaran Tw-I	Realisasi Tw-I		Anggaran Tw-I	Realisasi Tw-I	
	Rp Miliar	Rp Miliar	% Realisasi thdp Pagu	Rp Miliar	Rp Miliar	% Realisasi thdp Pagu
PENDAPATAN						
Kota Tarakan	1.176,10	72,77	6,19%	917,76	122,29	13,32%
Kab. Bulungan	1.927,33	353,64	18,35%	1.585,22	248,15	15,65%
Kab. Malinau	2.275,73	522,67	22,97%	1.813,67	440,46	24,29%
Kab. Nunukan	1.893,76	310,67	16,41%	1.833,95	302,05	16,47%
Kab. Tana Tidung	1.027,21	234,79	22,86%	616,59	149,13	24,19%
Total Kab/Kota Kaltara	8.300,13	1.494,54	18,01%	6.767,18	1.262,08	18,65%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kaltara

Tabel I.8. Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota Kaltara Triwulan I 2025 dan Triwulan I 2026

	2025			2026		
	Anggaran Tw-I	Realisasi Tw-I		Anggaran Tw-I	Realisasi Tw-I	
	Rp Miliar	Rp Miliar	% Realisasi thdp Pagu	Rp Miliar	Rp Miliar	% Realisasi thdp Pagu
BELANJA						
Kota Tarakan	1.215,95	109,19	8,98%	623,26	135,74	21,78%
Kab. Bulungan	2.506,65	249,91	9,97%	2.010,21	254,52	12,66%
Kab. Malinau	2.828,01	301,11	10,65%	2.340,67	230,03	9,83%
Kab. Nunukan	2.152,83	264,65	12,29%	2.059,69	285,52	13,86%
Kab. Tana Tidung	1.432,96	152,33	10,63%	730,36	123,28	16,88%
Total Kab/Kota Kaltara	10.136,41	1.077,19	10,63%	7.764,19	1.029,09	13,25%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kaltara

Realisasi Belanja Spasial

Realisasi belanja di 5 (lima) Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara pada triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp1,03 triliun atau 13,25% dari total pagu APBD Kabupaten/Kota tahun 2026 sebesar Rp7,76 triliun. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp1,08 triliun atau 10,63% dari pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp10,14 triliun. Secara nominal, realisasi belanja mengalami penurunan dibandingkan triwulan I 2025, sejalan dengan kebijakan penyesuaian anggaran pada tahun 2026.

Meskipun demikian, dari sisi persentase penyerapan terhadap pagu, realisasi belanja Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara menunjukkan perbaikan menjadi 13,25%, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 10,63%. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya peningkatan efektivitas penyerapan anggaran daerah pada awal tahun anggaran, meskipun ruang fiskal pemerintah daerah relatif lebih terbatas dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum, kinerja pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara pada triwulan I 2026 menunjukkan bahwa pemerintah dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah di tengah tekanan pada ruang fiskal akibat penurunan pagu anggaran dan perlambatan penerimaan daerah.

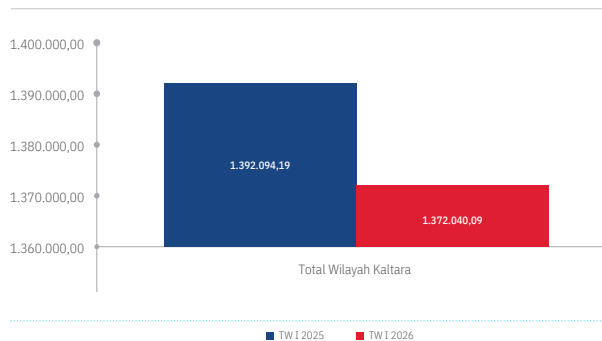
1.6 Dana Kementerian dan Lembaga (K/L) Pemerintah Pusat

Belanja K/L di Kaltara

Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Kementerian/Lembaga (K/L) di Provinsi Kalimantan Utara hingga triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp688,36 miliar atau 20,90% dari total pagu belanja K/L tahun 2026 sebesar Rp3,29 triliun. Capaian tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp496,08 miliar atau 15,21% dari pagu belanja tahun 2025 sebesar Rp3,26 triliun. Secara tahunan, realisasi belanja K/L di Kalimantan Utara tumbuh sebesar 38,76% (yoy) (Tabel I.9).

Peningkatan realisasi belanja K/L terutama didorong oleh akselerasi Belanja Modal yang tercatat sebesar Rp158,07 miliar atau 17,63% dari pagu, meningkat signifikan dibandingkan

Grafik I.47. Realisasi Belanja K/L di Wilayah Kaltara Triwulan I 2025 dan Triwulan I 2026



Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltara

periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp27,11 miliar atau 3,27% dari pagu. Secara tahunan, Belanja Modal tumbuh sebesar 483,18% (yoy), mengindikasikan mulai dilaksanakannya proyek pembangunan dan pengadaan aset pemerintah pada awal tahun 2026.

Di sisi lain, Belanja Pegawai juga menunjukkan peningkatan dengan realisasi sebesar Rp367,74 miliar atau 28,02% dari pagu, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp312,62 miliar atau 28,32% dari pagu. Secara tahunan, Belanja Pegawai tumbuh sebesar 17,63% (yoy), sejalan dengan meningkatnya kebutuhan belanja aparatur pemerintah dan penyesuaian belanja pegawai pada awal tahun anggaran dan adanya pencairan THR pada saat Bulan Ramadhan. Selain itu, Belanja Barang terealisasi sebesar Rp162,55 miliar atau 14,98% dari pagu, sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2025 sebesar Rp156,36 miliar atau 11,76% dari pagu. Secara tahunan, Belanja Barang tumbuh sebesar 3,96% (yoy), mencerminkan mulai meningkatnya aktivitas operasional K/L di wilayah Kalimantan Utara. Sementara itu, Belanja Bantuan Sosial belum menunjukkan realisasi hingga triwulan I 2026, seperti periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurun persentase realisasi terhadap pagu, serapan belanja Kementerian/ Lembaga (K/L) di Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan I 2026 terbesar berasal dari Belanja Pegawai yang mencapai 28,02% dari pagu (Grafik I.48). Tingginya serapan Belanja Pegawai mencerminkan dominasi belanja rutin

Tabel I.9. Realisasi Belanja K/L di Wilayah Kaltara Triwulan I 2025 dan Triwulan I 2026

Uraian	2025			2026			g.2025 (yoy)
	Anggaran	Realisasi Tw-I		Anggaran	Realisasi Tw-I		
	Rp Miliar	Rp Miliar	%	Rp Miliar	Rp Miliar	%	
Belanja Pegawai	1.103,97	312,62	28,32%	1.312,37	367,74	28,02%	17,63%
Belanja Barang	1.329,61	156,36	11,76%	1.085,08	162,55	14,98%	3,96%
Belanja Modal	828,90	27,11	3,27%	896,65	158,07	17,63%	483,18%
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Belanja K/L	3.262,48	496,08	15,21%	3.294,09	688,36	20,90%	38,76%

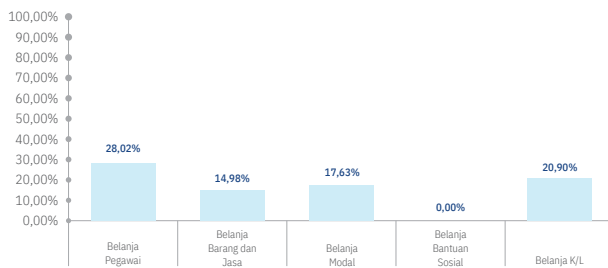
Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltara

pemerintah pusat pada awal tahun anggaran, terutama untuk pembayaran gaji dan tunjangan aparatur negara. Selanjutnya, belanja modal sebesar 17,63% dan diikuti oleh Belanja Barang dan Jasa yang tercatat sebesar 14,98%.

Sementara itu, Belanja Bantuan Sosial belum menunjukkan realisasi hingga triwulan I 2026. Hal tersebut mencerminkan bahwa penyaluran program bantuan sosial pemerintah pusat di wilayah Kalimantan Utara umumnya masih akan berlangsung pada periode berikutnya sesuai jadwal pelaksanaan program dan proses administrasi anggaran pemerintah.

Belanja K/L secara total tercatat terealisasi sebesar 20,90% dari pagu APBN, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 15,21%. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya percepatan pelaksanaan anggaran pemerintah pusat di wilayah Kalimantan Utara pada awal tahun 2026.

Grafik I.48. Tingkat Serapan Realisasi Belanja APBN Provinsi Kaltara Triwulan I 2026



Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltara

BOKS 1

Konsultasi Regional (KONREG) Kasulampua 2026 “Kedaulatan Pangan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di wilayah Kasulampua”

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersinergi dengan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua (Kasulampua) Tahun 2026 pada 15 April 2026 di Tanjung Selor. Kegiatan ini mengangkat tema “Kedaulatan Pangan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Wilayah Kasulampua” dan dihadiri oleh sekitar 135 peserta yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah se-Kasulampua, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), akademisi, dunia usaha, perbankan, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Gubernur Kalimantan Utara menyampaikan bahwa wilayah Kasulampua memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional karena didukung oleh ketersediaan sumber daya alam yang melimpah serta letak geografis yang strategis, termasuk penguasaan jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia. Namun demikian, kawasan ini masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan, antara lain ketimpangan antarwilayah, keterbatasan infrastruktur dan konektivitas, serta perlunya peningkatan kualitas data ekonomi sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antarpemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan yang lebih merata, produktif, dan berkelanjutan.

Wakil Kepala BPS RI menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah Kasulampua dalam beberapa tahun terakhir secara umum berada di atas rata-rata nasional dan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2025, wilayah Kasulampua berkontribusi sebesar 18,04% terhadap perekonomian

nasional, meningkat dibandingkan kontribusi satu dekade sebelumnya. Meskipun demikian, peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh perbaikan kesejahteraan masyarakat secara merata. Oleh sebab itu, penguatan ekonomi inklusif perlu dilakukan melalui penciptaan nilai tambah, pengembangan industri pengolahan, perluasan kesempatan kerja, serta pengurangan kemiskinan dan ketimpangan antarwilayah. Narasumber dari BPS RI, Bank Indonesia, Bappenas, dan Kementerian Keuangan RI menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif. Struktur ekonomi wilayah Kasulampua masih didominasi oleh sektor pertambangan, industri pengolahan, dan pertanian, sementara penyerapan tenaga kerja terbesar masih berada pada sektor pertanian. Di sisi lain, produktivitas sektor pertanian relatif masih rendah dan menghadapi tantangan berupa penuaan petani, rendahnya regenerasi tenaga kerja muda, serta tingginya tingkat kerentanan pangan di beberapa wilayah timur Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan transformasi sektor pertanian melalui peningkatan produktivitas, modernisasi teknologi, penguatan hilirisasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Bank Indonesia juga menyampaikan bahwa perekonomian wilayah Kalimantan dan Sulampua pada tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh positif meskipun dihadapkan pada berbagai risiko global, antara lain meningkatnya ketidakpastian geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta penyesuaian kebijakan produksi komoditas strategis seperti batu bara dan nikel. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan diperkirakan berada pada kisaran 3,9–4,7% (yoy), sedangkan wilayah Sulampua diproyeksikan tumbuh lebih tinggi pada kisaran 4,64–5,44% (yoy). Sementara itu,



Gambar Boks V.I.1 Pelaksanaan KOREG Kasulampua 2026

BOKS 1

inflasi diperkirakan tetap terjaga dalam rentang sasaran nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy) didukung oleh penguatan produksi pangan, perluasan program pertanian, serta sinergi pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Bappenas juga memaparkan arah kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan swasembada pangan, energi, dan air sebagai prioritas utama dalam RPJMN 2025–2029. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan sentra pangan, penguatan cadangan pangan, peningkatan produktivitas petani dan nelayan, serta percepatan hilirisasi komoditas unggulan daerah. Sementara itu, Kementerian Keuangan menekankan pentingnya sinergi fiskal pusat dan daerah dalam mendukung ketahanan pangan, pengurangan kesenjangan wilayah, serta peningkatan kualitas belanja pemerintah untuk memperkuat daya saing daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perindustrian yang membahas strategi penguatan kedaulatan pangan dan hilirisasi komoditas unggulan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di wilayah Kasulampua. Kementerian Pertanian menekankan pentingnya peningkatan ketahanan pangan melalui pengelolaan sumber daya air, pembangunan dan optimalisasi infrastruktur irigasi, perluasan areal tanam, penyediaan benih unggul, mekanisasi pertanian, serta penguatan penyuluhan dan regenerasi petani untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan penurunan produktivitas lahan. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyoroti potensi besar ekonomi biru di wilayah Kasulampua melalui

pengembangan komoditas perikanan unggulan seperti udang, rumput laut, tilapia, kepiting, dan lobster yang didukung oleh program prioritas, antara lain Kampung Nelayan Merah Putih, modernisasi sarana perikanan, pengembangan kawasan budidaya terintegrasi, serta hilirisasi produk perikanan guna meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Selanjutnya, Kementerian Perindustrian menyampaikan bahwa hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, khususnya komoditas strategis seperti nikel, bauksit, dan tembaga, menjadi salah satu instrumen utama transformasi ekonomi nasional yang diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah, memperkuat keterkaitan antarsektor ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing ekonomi kawasan Kasulampua.

Secara keseluruhan, Konsultasi Regional PDRB Kasulampua Tahun 2026 menghasilkan beberapa rekomendasi strategis, yaitu penguatan sektor pangan dan energi sebagai fondasi pembangunan ekonomi kawasan, percepatan hilirisasi komoditas unggulan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja, penguatan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta optimalisasi pemanfaatan data statistik sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Sebagai tindak lanjut forum tersebut, seluruh perwakilan provinsi di wilayah Kasulampua menandatangani “Kesepakatan Benuanta” sebagai komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi pembangunan ekonomi regional yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.





Perkembangan Infasi Daerah

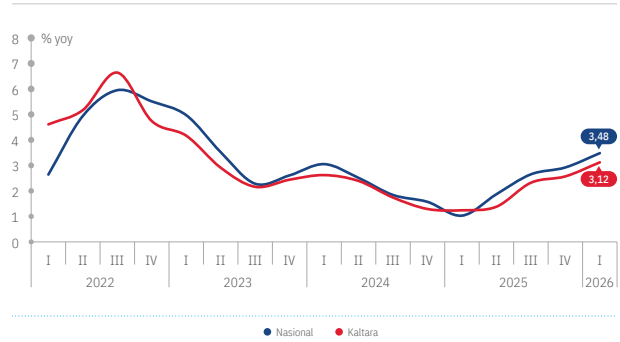
➤ Inflasi gabungan 3 kabupaten/kota IHK Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 3,12% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV 2025 yang sebesar 2,57% (yoy) dan juga lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,29% (yoy). Secara tahunan, capaian tersebut masih berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional meskipun tekanan yang lebih tinggi tercatat pada triwulan laporan. Tekanan inflasi terutama dipengaruhi oleh kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, khususnya komoditas emas perhiasan, sejalan dengan berlanjutnya penguatan harga emas global di tengah eskalasi ketidakpastian kebijakan perdagangan internasional dan tingginya permintaan aset lindung nilai. Selain itu, inflasi juga didorong oleh kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, khususnya dari komoditas tarif listrik yang mencatat inflasi tahunan tinggi akibat efek basis rendah dari kebijakan diskon tarif listrik yang diterapkan pemerintah pada awal 2025. Tekanan dari sisi pangan juga tercatat, terutama dari komoditas daging ayam ras dan cabai rawit yang meningkat, sejalan dengan lonjakan permintaan selama Ramadan dan menjelang Idulfitri. Namun demikian, tekanan inflasi lebih lanjut tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas hortikultura secara tahunan, terutama cabai rawit, jagung manis, dan sawi hijau, yang mencerminkan normalisasi pasokan dari sentra produksi.

2.1. Gambaran Umum

Inflasi triwulan I 2026 Provinsi Kalimantan Utara tetap terkendali dan berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional. Berdasarkan gabungan 3 kabupaten/kota IHK di Provinsi Kalimantan Utara, inflasi tercatat sebesar 3,12% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV 2025 yang sebesar 2,57% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi tersebut terutama bersumber dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, khususnya komoditas cabai rawit, daging ayam ras, serta angkutan udara, seiring meningkatnya permintaan masyarakat selama periode Ramadan dan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri serta adanya tekanan pada sisi pasokan akibat faktor cuaca dan distribusi. Selain itu, kelompok Transportasi turut memberikan andil inflasi, terutama didorong oleh kenaikan tarif angkutan udara pada periode libur dan mobilitas masyarakat yang meningkat. Secara spasial, inflasi tertinggi pada triwulan I 2026 terjadi di Tarakan sebesar 3,81% (yoy), diikuti Tanjung Selor sebesar 3,06% (yoy), sementara Nunukan mencatat inflasi sebesar 1,96% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi di Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan I 2026 tersebut sejalan dengan perkembangan inflasi nasional yang juga mengalami kenaikan didorong oleh faktor musiman Ramadan dan HBKN Idulfitri (Grafik II.1). Secara regional Kalimantan, posisi inflasi Kalimantan Utara tercatat terendah kedua setelah Kalimantan Barat, mencerminkan tekanan yang relatif moderat dibandingkan provinsi lain di kawasan (Grafik II.2).

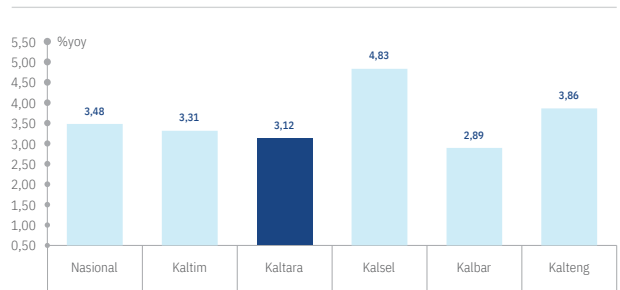
Pada triwulan II 2026, inflasi Provinsi Kalimantan Utara diperkirakan tetap terkendali dan berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1%. Tekanan inflasi pada triwulan II 2026 diperkirakan bersumber dari komoditas bahan pangan pokok, seperti gula pasir dan minyak goreng yang rentan dipengaruhi oleh gangguan distribusi, serta tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah. Selain itu, tekanan *imported inflation* diperkirakan masih berlanjut seiring tingginya harga minyak dunia yang memengaruhi harga komoditas impor dan kelompok Transportasi, khususnya tarif angkutan udara. Namun demikian, tekanan inflasi pada triwulan II 2026 diperkirakan lebih moderat dibandingkan triwulan sebelumnya seiring berakhirnya periode Ramadan dan Idulfitri yang sebelumnya mendorong peningkatan permintaan masyarakat. Normalisasi pola konsumsi pasca-HBKN serta mulai membaiknya pasokan pangan dari beberapa daerah sentra produksi diperkirakan turut menahan laju inflasi. Oleh karena itu,

Grafik II.1. Inflasi Gabungan Kota IHK di Kaltara & Nasional



Sumber: BPS, diolah

Grafik II.2. Perbandingan Inflasi Gabungan Kota IHK di Kalimantan Triwulan I 2026



Sumber: BPS, diolah

diperlukan dukungan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kaltara untuk terus melakukan pengendalian inflasi berdasarkan *framework 4K*, yaitu Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga dan Komunikasi Efektif. Bank Indonesia sebagai bagian dalam TPID juga terus konsistensi dalam mengarahkan ekspektasi inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah turut mendukung terjaganya inflasi.

2.2. Perkembangan Inflasi Bulanan (mtm)

Secara rerata bulanan, inflasi gabungan 3 kabupaten/kota IHK (Tarakan, Tanjung Selor, dan Nunukan) pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 0,38% (mtm), meningkat dibandingkan rerata triwulan IV 2025 sebesar 0,24% (mtm) (Tabel II.1). Peningkatan rerata inflasi bulanan tersebut terutama dipengaruhi oleh tekanan musiman selama periode Ramadan dan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri, khususnya pada Maret 2026 yang mencatat inflasi sebesar 0,57% (mtm).

Tabel II.1. Perbandingan Inflasi Kaltara Triwulan IV 2025 dan Triwulan I 2026 (mtm)

Kelompok Barang	Tw IV 2025				Tw I 2026			
	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Jan	Feb	Mar	Rata-rata
Umum / Total	0,08	0,11	0,54	0,24	0,10	0,47	0,57	0,38

Sumber: BPS, diolah

Perkembangan Inflasi Periode Januari 2026

Indeks Harga Konsumen Gabungan 3 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara pada Januari 2026 tercatat inflasi sebesar 0,10% (mtm), lebih rendah dibandingkan Desember 2025 yang tercatat 0,54% (mtm). Inflasi bulanan tersebut terutama didorong oleh peningkatan harga pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Secara bulanan, inflasi Januari 2026 terutama disebabkan oleh kenaikan harga pada komoditas emas perhiasan (andil 0,18% mtm), ikan layang/ikan benggol (andil 0,05% mtm), dan angkutan laut (andil 0,04% mtm). Peningkatan harga emas perhiasan sejalan dengan masih tingginya harga emas global yang dipengaruhi ketidakpastian ekonomi global dan meningkatnya permintaan aset lindung nilai. Selain itu, kenaikan harga ikan layang/ikan benggol tercatat menjadi pendorong inflasi akibat terbatasnya pasokan hasil tangkapan akibat tingginya gelombang laut. Adapun kenaikan harga angkutan laut dipengaruhi kenaikan tarif pada sejumlah rute pelayaran domestik pasca periode HBKN akhir tahun. Di sisi lain, inflasi Januari 2026 tertahan oleh deflasi pada beberapa komoditas transportasi dan hortikultura, antara lain angkutan udara (andil -0,17% mtm), ikan bandeng/ikan bolu (andil -0,06% mtm), dan cabai rawit (andil -0,05% mtm). Penurunan harga angkutan udara dipengaruhi normalisasi permintaan pasca periode libur Natal dan Tahun Baru serta meningkatnya kompetisi antar maskapai di Kalimantan Utara. Sementara itu, penurunan harga ikan bandeng dipengaruhi melimpahnya pasokan hasil panen tambak lokal. Adapun penurunan harga cabai rawit didukung oleh pasokan yang relatif terjaga dari daerah sentra produksi di Sulawesi dan Jawa.

Perkembangan Inflasi Periode Februari 2026

Indeks Harga Konsumen Gabungan 3 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara pada Februari 2026 tercatat inflasi sebesar 0,47% (mtm), meningkat dibandingkan Januari 2026 yang sebesar 0,10% (mtm). Peningkatan inflasi bulanan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga pada

kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Secara bulanan, inflasi Februari 2026 terutama disebabkan oleh kenaikan harga pada komoditas emas perhiasan (andil 0,22% mtm), cabai rawit (andil 0,17% mtm), dan daging ayam ras (andil 0,08% mtm). Kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan tren penguatan harga emas global di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan internasional dan pelemahan nilai tukar Rupiah. Sementara itu, kenaikan harga cabai rawit dipengaruhi terbatasnya pasokan akibat curah hujan yang tinggi yang mengganggu distribusi barang pada beberapa daerah sentra produksi. Adapun kenaikan harga daging ayam ras dipicu oleh meningkatnya permintaan masyarakat menjelang periode Ramadan. Di sisi lain, inflasi Februari 2026 tertahan oleh deflasi pada beberapa komoditas pangan dan transportasi, antara lain bayam (andil -0,04% mtm), bawang merah (andil -0,04% mtm), dan sawi hijau (andil -0,02% mtm). Penurunan harga bawang merah dan sawi hijau didukung membaiknya pasokan dari daerah pemasok utama. Sementara itu, penurunan harga bayam dipengaruhi kondisi cuaca yang relatif mendukung produksi sayuran lokal.

Perkembangan Inflasi Periode Maret 2026

Indeks Harga Konsumen Gabungan 3 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara pada Maret 2026 tercatat inflasi sebesar 0,57% (mtm), meningkat dibandingkan Februari 2026 yang tercatat 0,47% (mtm). Kenaikan inflasi bulanan tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat selama periode Ramadan dan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri. Secara bulanan, inflasi Maret 2026 terutama disebabkan oleh kenaikan harga pada komoditas cabai rawit (andil 0,24% mtm), daging ayam ras (andil 0,13% mtm), dan angkutan udara (andil 0,10% mtm). Kenaikan harga cabai rawit dipengaruhi terbatasnya pasokan akibat gangguan cuaca dan distribusi dari

Tabel II.2. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan Gabungan 3 Kab/Kota Kaltara selama Triwulan I 2026 (mtm)

Januari 2026			Februari 2026			Maret 2026		
Komoditas	mtm	Andil	Komoditas	mtm	Andil	Komoditas	mtm	Andil
Emas Perhiasan	9,40	0,18	Emas Perhiasan	10,33	0,22	Cabai Rawit	28,01	0,24
Ikan Layang/ Ikan Benggol	3,45	0,05	Cabai Rawit	24,11	0,17	Daging Ayam Ras	6,54	0,13
Angkutan Laut	8,33	0,04	Daging Ayam Ras	3,96	0,08	Angkutan Udara	9,35	0,10
Sepeda Motor	2,72	0,04	Ikan Bandeng/Ikan Bolu	3,65	0,04	Ikan Bandeng/Ikan Bolu	4,91	0,05
Bayam	11,36	0,03	Tomat	9,41	0,03	Telur Ayam Ras	4,65	0,05
Nasi Dengan Lauk	0,88	0,03	Ikan Bawal	9,77	0,01	Tomat	3,83	0,02
Sawi Hijau	5,67	0,01	Angkutan Laut	1,93	0,01	Bensin	0,28	0,01
Ikan Tongkol/ Ikan Ambu-Ambu	6,17	0,01	Beras	0,22	0,01	Beras	0,28	0,01
Kangkung	3,06	0,01	Telur Ayam Ras	0,93	0,01	Cabai Merah	7,83	0,01
Sewa Rumah	0,44	0,01	Bawang Putih	2,15	0,01	Kue Basah	0,98	0,01

Sumber: BPS, diolah

Tabel II.3. Komoditas Utama Penyumbang Deflasi Bulanan Gabungan 3 Kab/Kota IHK Kaltara selama Triwulan I 2026 (mtm)

Januari 2026			Februari 2026			Maret 2026		
Komoditas	mtm	Andil	Komoditas	mtm	Andil	Komoditas	mtm	Andil
Angkutan Udara	-13,45	-0,17	Bayam	-13,06	-0,04	Emas Perhiasan	-2,51	-0,06
Ikan Bandeng/Ikan Bolu	-5,78	-0,06	Bawang Merah	-5,26	-0,04	Sawi Hijau	-14,52	-0,03
Cabai Rawit	-6,54	-0,05	Sawi Hijau	-8,53	-0,02	Kangkung	-9,64	-0,03
Daging Ayam Ras	-1,64	-0,03	Ikan Layang/ Ikan Benggol	-1,09	-0,02	Angkutan Laut	-5,48	-0,03
Bawang Merah	-3,86	-0,03	Kangkung	-4,08	-0,01	Bayam	-5,00	-0,01
Ikan Kembung/Ikan Gembung/ Ikan Banyar/Ikan Gembolo/ Ikan Aso-aso	-4,41	-0,01	Bensin	-0,30	-0,01	Hand Body Lotion	-2,15	-0,01
Televisi Berwarna	-7,68	-0,01	Sabun Mandi	-3,27	-0,01	Ikan Layang/ Ikan Benggol	-0,28	0,00
Jagung Manis	-4,55	-0,01	Wortel	-4,08	-0,01	Udang Basah	-0,55	0,00
Cabai Merah	-6,48	-0,01	Sabun Detergen Bubuk	-0,73	-0,01	Buncis	-6,08	0,00
Udang Basah	-0,85	-0,01	Ikan Mujair	-4,18	-0,01	Tempe	-0,51	0,00

Sumber: BPS, diolah

daerah sentra produksi. Sementara itu, kenaikan harga daging ayam ras didorong peningkatan konsumsi masyarakat menjelang HBKN Idulfitri. Adapun kenaikan harga angkutan udara dipengaruhi meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode mudik dan libur keagamaan. Di sisi lain, inflasi Maret 2026 tertahan oleh deflasi pada beberapa komoditas, antara lain emas perhiasan (andil -0,06% mtm), sawi hijau (andil -0,03% mtm), dan kangkung (andil -0,03% mtm). Penurunan harga sayuran hijau dipengaruhi membaiknya pasokan lokal seiring mulai masuknya masa panen di beberapa wilayah pemasok. Sementara itu, penurunan harga emas perhiasan dipengaruhi koreksi harga emas global setelah mengalami peningkatan signifikan pada bulan-bulan sebelumnya.

2.3. Inflasi Tahunan (yoy)

Inflasi tahunan gabungan 3 kabupaten/kota IHK Provinsi Kalimantan Utara meningkat pada triwulan I 2026. Inflasi Kalimantan Utara tercatat sebesar 3,12% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2025 sebesar 2,57% (yoy) dan juga meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Tabel II.4). Inflasi pada triwulan laporan terutama didorong oleh kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya serta kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, khususnya bersumber dari kenaikan harga emas perhiasan, tarif listrik, dan tarif air minum PAM yang memberikan andil signifikan. Kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan berlanjutnya ketidakpastian perekonomian global yang mendorong permintaan aset lindung nilai. Sementara itu, efek

basis rendah akibat berakhirnya kebijakan diskon tarif listrik pada awal tahun 2025 dan kenaikan tarif dasar air minum PAM di Kabupaten Bulungan (Tanjung Selor) turut menambah tekanan inflasi. Namun demikian, tekanan inflasi yang lebih tinggi pada triwulan laporan relatif tertahan oleh beberapa komoditas pangan yang mencatatkan deflasi tahunan, terutama pada komoditas cabai rawit, jagung manis, dan sawi hijau.

Komoditas emas perhiasan, tarif listrik, dan tarif air minum PAM menjadi kontributor utama pendorong inflasi tahunan pada triwulan I 2026. Komoditas emas perhiasan tercatat menyumbang andil terbesar dalam inflasi tahunan Provinsi Kalimantan Utara, yaitu sebesar 0,98% (yoy) (Tabel II.5). Kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan penguatan harga emas global yang konsisten sejak awal 2026, didorong oleh meningkatnya preferensi investor terhadap aset safe haven di tengah eskalasi perang dagang dan ketegangan geopolitik. Komoditas tarif listrik menjadi kontributor terbesar kedua dengan andil inflasi tahunan sebesar 0,61% (yoy), namun kenaikan tersebut bersifat sementara dan didominasi oleh low-base effect akibat kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50 persen yang diterapkan pemerintah pada Januari–Februari 2025, Tarif air minum PAM turut memberikan andil inflasi sebesar 0,30% (yoy), sejalan dengan kenaikan tarif dasar air minum PAM di Kabupaten Bulungan (Tanjung Selor) sejumlah wilayah IHK. Tekanan dari sisi pangan juga tercatat pada komoditas daging ayam ras dengan andil 0,18% (yoy), yang meningkat signifikan pada periode Februari hingga Maret seiring lonjakan permintaan

Tabel II.4. Inflasi Umum/Total Tahunan Kaltara 2022-2026 (yoy)

Kelompok Barang	Inflasi %YOY									Arah
	2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	
Umum / Total	2,62	2,39	1,74	1,29	1,24	1,38	2,32	2,57	3,12	▲

Sumber: BPS, diolah

Tabel II.5. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Gabungan Triwulan I 2026 (yoy)

Andil Inflasi		
Komoditas	YOY	%Andil
Emas Perhiasan	73,05	0,98
Tarif Listrik	14,29	0,61
Tarif Air Minum Pam	13,48	0,30
Daging Ayam Ras	9,12	0,18
Tarif Rumah Sakit	30,51	0,17
Beras	3,20	0,14
Ikan Bandeng/Ikan Bolu	13,98	0,14
Nasi Dengan Lauk	3,51	0,11
Telur Ayam Ras	9,97	0,10
Angkutan Udara	5,28	0,06

selama Ramadan dan Idulfitri. Komoditas beras dan ikan bandeng/ikan bolu masing-masing memberikan andil sebesar 0,14% (yoy), dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan dari daerah penghasil serta kendala distribusi melalui jalur laut.

Di sisi lain, komoditas cabai rawit, jagung manis, dan sawi hijau menjadi kontributor utama penahan inflasi tahunan pada triwulan I 2026. Penurunan harga cabai rawit tercatat memberikan andil deflasi sebesar -0,13% (yoy), mencerminkan membaiknya pasokan dari sentra produksi setelah sebelumnya terganggu oleh faktor cuaca. Selain itu, jagung manis dan sawi hijau masing-masing menyumbang andil deflasi sebesar -0,06% (yoy), sejalan dengan normalisasi pasokan hortikultura lokal. Deflasi juga terjadi pada beberapa komoditas lainnya seperti kangkung, bawang putih, dan cabai merah yang turut meredam tekanan harga secara keseluruhan. Adapun 10 (sepuluh) komoditas penyumbang inflasi dan deflasi tahunan terbesar dapat dilihat pada Tabel II.5.

2.4. Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

Berdasarkan kelompok pengeluaran, tekanan inflasi tahunan pada triwulan I 2026 terutama bersumber dari kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya serta kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, sementara tertahan oleh deflasi pada kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga serta kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan. Inflasi pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya tercatat sebesar 14,60% (yoy, andil 1,08%), menjadi penyumbang andil terbesar dalam inflasi tahunan triwulan laporan. Tekanan pada kelompok ini terutama disumbang oleh kenaikan harga emas perhiasan, sejalan dengan penguatan harga emas global yang berlangsung konsisten sepanjang triwulan I 2026 di tengah eskalasi ketidakpastian kebijakan perdagangan global dan tingginya permintaan aset lindung nilai. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga mencatat inflasi sebesar 6,67% (yoy, andil 1,06%),

Andil Deflasi		
Komoditas	YOY	%Andil
Cabai Rawit	-10,57	-0,13
Jagung Manis	-23,47	-0,06
Sawi Hijau	-21,18	-0,06
Kangkung	-12,49	-0,04
Bawang Putih	-11,14	-0,04
Cabai Merah	-19,43	-0,03
Tomat	-6,45	-0,03
Sabun Detergen Bubuk	-3,12	-0,02
Pengharum Cucian/ Pelembut	-6,64	-0,02
Kacang Panjang	-9,51	-0,01

Sumber: BPS, diolah

didorong oleh tingginya inflasi tahunan tarif listrik akibat low-base effect dari kebijakan diskon tarif listrik yang diterapkan pemerintah pada Januari–Februari 2025, serta kenaikan tarif dasar air minum PAM di Kabupaten Bulungan (Tanjung Selor). Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mencatat inflasi sebesar 1,44% (yoy, andil 0,47%), terutama didorong oleh kenaikan harga daging ayam ras, beras, dan ikan bandeng/ikan bolu yang mencerminkan tekanan permintaan musiman selama Ramadan dan Idulfitri serta keterbatasan pasokan melalui jalur distribusi laut. Sementara itu, kelompok Kesehatan mencatat inflasi sebesar 8,01% (yoy, andil 0,19%), terutama disumbang oleh penyesuaian tarif rumah sakit. Namun demikian, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar -0,41% (yoy, andil -0,02%) serta kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar -0,37% (yoy, andil -0,02%), yang secara bersama-sama berkontribusi dalam meredam laju inflasi tahunan secara keseluruhan.

Tabel II.6. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Triwulan I 2026 (yoy)

Inflasi Kelompok		
Komoditas	YOY	Andil
Umum	3,12	3,12
Makanan, Minuman Dan Tembakau	1,44	0,47
Pakaian Dan Alas Kaki	-0,01	0,00
Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar Rt	6,67	1,06
Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rt	-0,41	-0,02
Kesehatan	8,01	0,19
Transportasi	0,87	0,10
Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	-0,37	-0,02
Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya	1,25	0,02
Pendidikan	0,72	0,02
Penyediaan Makanan Dan Minuman/restoran	2,63	0,22
Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	14,60	1,08

Sumber: BPS, diolah

Perkembangan Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Inflasi pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya pada triwulan I 2026 tercatat meningkat dan menjadi penyumbang andil terbesar dalam inflasi tahunan Provinsi Kalimantan Utara (Tabel II.8). Kelompok ini mencatat inflasi sebesar 14,60% (yoy) dengan andil sebesar 1,08% (yoy), melanjutkan tren kenaikan dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 12,95% (yoy). Tekanan inflasi pada kelompok ini secara dominan bersumber dari kenaikan harga emas perhiasan dengan andil sebesar 0,98% (yoy), jauh melampaui komoditas lainnya dalam kelompok yang sama. Kenaikan harga emas perhiasan di Kalimantan Utara sejalan dengan penguatan harga emas global yang berlangsung konsisten sepanjang triwulan I 2026, didorong oleh meningkatnya ketidakpastian kebijakan perdagangan global seiring eskalasi kebijakan tarif Amerika Serikat, ketegangan geopolitik yang berlanjut, serta permintaan aset lindung nilai yang tetap tinggi di pasar internasional. Selain emas perhiasan, tekanan inflasi juga bersumber dari kenaikan harga komoditas krim wajah dengan andil 0,03% (yoy), popok bayi sekali pakai/diapers serta pasta gigi masing-masing dengan andil 0,02% (yoy). Kenaikan harga komoditas tersebut

mencerminkan penyesuaian harga oleh produsen sejalan dengan tren kenaikan biaya input dan distribusi pada level nasional. Di sisi lain, deflasi terjadi pada komoditas sabun mandi dan tisu, meskipun dengan andil yang sangat terbatas dan belum mampu secara signifikan meredakan tekanan inflasi pada kelompok ini. Adapun 10 (sepuluh) komoditas penyumbang inflasi dan deflasi tahunan terbesar pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.8.

Perkembangan Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga

Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga tercatat mengalami inflasi sebesar 6,67% (yoy) dengan andil sebesar 1,06% (yoy) terhadap inflasi tahunan Provinsi Kalimantan Utara, menjadikannya kelompok penyumbang andil terbesar kedua setelah kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (Tabel II.9). Tekanan inflasi pada kelompok ini terutama bersumber dari komoditas tarif listrik yang mencatat inflasi tahunan sebesar 14,29% (yoy) dengan andil 0,61% (yoy). Namun demikian, kenaikan inflasi tahunan tarif listrik tersebut bersifat sementara dan didominasi oleh efek basis rendah (*low-base effect*), sebagai dampak dari kebijakan diskon tarif listrik

Tabel II.7. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Triwulan I 2026 (yoy)

Komoditas	Inflasi	Andil
Emas Perhiasan	73,05	0,98
Krim Wajah	9,21	0,03
Popok Bayi Sekali Pakai/ Diapers	2,13	0,02
Pasta Gigi	3,41	0,02
Deodorant	3,92	0,01
Tarif Gunting Rambut Pria	2,27	0,01
Sabun Wajah	4,40	0,01
Sikat Gigi	5,15	0,01
Pembersih/Penyegar	9,01	0,00
Pembalut Wanita	1,51	0,00

Komoditas	Deflasi	Andil
Sabun Mandi	-1,28	0,00
Tisu	-1,30	0,00
Tisu Basah	-0,10	0,00

Sumber: BPS, diolah

Tabel II.8. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga Triwulan I 2026 (yoy)

Komoditas	Inflasi	Andil
Tarif Listrik	14,29	0,61
Tarif Air Minum Pam	13,48	0,30
Sewa Rumah	2,02	0,05
Kontrak Rumah	2,97	0,04
Batu Bata/Batu Tela	17,80	0,03
Tukang Bukan Mandor	3,92	0,03
Bahan Bakar Rumah Tangga	0,59	0,01
Pasir	4,00	0,01
Keramik	2,65	0,01
Besi Beton	1,46	0,00

Komoditas	Deflasi	Andil
Kayu Balokan	-3,18	-0,01
Seng	-4,74	-0,01
Papan	-1,87	0,00
Kayu Lapis	-0,69	0,00
Paku	-0,28	0,00
Asbes	0,00	0,00

Sumber: BPS, diolah

sebesar 50% yang diterapkan pemerintah pada Januari–Februari 2025. Kebijakan tersebut menekan level IHK tarif listrik pada periode perbandingan, sehingga ketika tarif kembali normal di triwulan I 2026, perbandingan tahunan menunjukkan kenaikan yang signifikan meskipun tidak mencerminkan lonjakan harga aktual. Komoditas tarif air minum PAM menjadi kontributor terbesar kedua dengan andil 0,30% (yoy), sejalan dengan implementasi penyesuaian tarif dasar air minum PAM di Kabupaten Bulungan (Tanjung Selor). Tekanan tambahan juga bersumber dari kenaikan sewa rumah dan kontrak rumah masing-masing dengan andil 0,05% dan 0,04% (yoy), serta kenaikan harga bahan bangunan seperti batu bata/batu tela dan upah tukang bukan mandor yang masing-masing memberikan andil 0,03% (yoy). Di sisi penahan, penurunan harga komoditas bahan bangunan seperti kayu balokan dan seng masing-masing memberikan andil deflasi sebesar -0,01% (yoy), meskipun dengan kontribusi yang terbatas terhadap meredanya tekanan inflasi kelompok ini. Adapun 10 (sepuluh) komoditas penyumbang inflasi dan deflasi tahunan terbesar pada kelompok ini selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.9.

Perkembangan Inflasi Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

Pada Triwulan I 2026, kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga kembali mencatatkan deflasi sebesar -0,41% (yoy) dengan andil -0,02% (yoy) terhadap inflasi tahunan Provinsi Kalimantan Utara, melanjutkan deflasi yang terjadi pada triwulan sebelumnya sebesar -0,64% (yoy). Deflasi pada kelompok ini turut menahan tekanan inflasi yang lebih tinggi pada triwulan laporan. Penurunan harga terutama terjadi pada komoditas produk pembersih dan perawatan rumah tangga, khususnya pengharum cucian/pelembut yang mencatat deflasi -6,64% (yoy) dengan andil -0,02% (yoy), sabun detergen bubuk dengan deflasi -3,12% (yoy) dan andil -0,02% (yoy), serta pembersih lantai dengan deflasi -5,88% (yoy) dan andil -0,01% (yoy). Penurunan harga pada komoditas-komoditas tersebut mencerminkan stabilisasi harga bahan baku dan distribusi di

tingkat nasional serta penyesuaian harga oleh produsen dan ritel modern. Sementara itu, beberapa komoditas dalam kelompok ini masih mencatatkan kenaikan harga terbatas, seperti panci dan upah asisten rumah tangga yang masing-masing memberikan andil inflasi 0,01% (yoy). Namun demikian, kenaikan tersebut belum cukup untuk mendorong kelompok ini kembali ke zona inflasi secara tahunan. Adapun 10 (sepuluh) komoditas penyumbang inflasi dan deflasi tahunan terbesar pada kelompok ini selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.10.

2.5. Upaya Pengendalian Inflasi Daerah

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan TPID kabupaten/kota terus melakukan koordinasi secara intensif untuk menjaga stabilitas inflasi pada triwulan I 2026. Koordinasi, sinergi, dan upaya yang intens dilakukan oleh Kantor Perwakilan Provinsi Kaltara dan TPID di tingkat Provinsi maupun Kota/Kabupaten selama bulan Januari hingga Maret 2026 (Tabel II. 11) dengan fokus memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan bahan pangan strategis, dan kelancaran distribusi melalui rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dilakukan setiap bulan.

Pada triwulan I 2026, TPID Se-Kaltara secara rutin melakukan operasi pasar di sejumlah lokasi strategis di kabupaten/kota untuk menyediakan kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau dan menjamin distribusi pasokan pangan sampai ke daerah terpencil, terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, TPID se-Provinsi Kalimantan Utara secara rutin mengadakan High Level Meeting (HLM) untuk memperkuat sinergi dan inovasi dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan selama triwulan I 2026. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara bersinergi dengan TPID untuk mengembangkan pertanian lokal dengan meningkatkan mekanisasi dan penggunaan teknologi pertanian. Langkah-langkah strategis tersebut diharapkan dapat menjaga ekspektasi inflasi masyarakat melalui ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga yang didukung oleh kelancaran distribusi.

Tabel II.9. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga Triwulan I 2026 (yoy)

Komoditas	Inflasi	Andil
Panci	4,27	0,01
Upah Asisten Rumah Tangga	1,36	0,01
Kipas Angin	1,55	0,00
Kursi	1,86	0,00
Piring	2,57	0,00
Pelicin/ Pewangi Pakaian	7,16	0,00
Service AC	4,91	0,00
Setrika	8,46	0,00
Bola Lampu	0,45	0,00
Pembasmi Nyamuk Spray	1,42	0,00

Komoditas	Deflasi	Andil
Sabun Detergen Bubuk	-3,12	-0,02
Pengharum Cucian/ Pelembut	-6,64	-0,02
Pembersih Lantai	-5,88	-0,01
Sabun Cair/cuci Piring	-0,93	0,00
Air Conditioner (AC)	-2,59	0,00
Alat-alat Listrik	-5,22	0,00
Penyegar Ruangan	-1,67	0,00
Detergen Cair	-2,14	0,00
Spring Bed	-0,72	0,00
Kulkas/Lemari Es	-0,24	0,00

Sumber: BPS, diolah

Tabel II.10. Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah selama Triwulan I 2026

Tanggal	Kegiatan	Hasil Kegiatan / Deskripsi Kegiatan	Penyelenggara
12, 19, 27 Januari 2026	Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Mingguan	Evaluasi Pelaksanaan TPID setiap minggunya	Kemendagri
27 Januari 2026	Mini Distribution Center (MDC) Terminal Bom Panjang Kota Tarakan	Penguatan operasional Kios HIBOT sebagai instrumen stabilisasi harga komoditas	BI, Pemkot Tarakan & Bulog
9, 18, 23 Februari 2026	Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Mingguan	Evaluasi Pelaksanaan TPID setiap minggunya	Kemendagri
4 Februari 2026	Gerakan Pangan Murah (GPM) Desa Salimbatu dan Desa Mara Hilir Kabupaten Bulungan	Menyediakan bahan pangan pokok dengan harga di bawah HET kepada masyarakat guna menjaga keterjangkauan harga menjelang Ramadan	DPKP, Bulog & Pemkab Bulungan
9, 11 Februari 2026	GPM Desa Tanakucing, Desa Sambungan, Desa Tana Merah, Desa Tana Merah Barat, Desa Sambungan Selatan Kabupaten Tana Tidung	Menyediakan bahan pangan pokok dengan harga di bawah HET kepada masyarakat guna menjaga keterjangkauan harga menjelang Ramadan	Pemkab Tana Tidung, DPKP & Bapanas
12 Februari 2026	GPM Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan	Menyediakan bahan pangan pokok dengan harga di bawah HET kepada masyarakat	Pemkab Bulungan, Bulog & Bapanas
12 Februari 2026	GPM Jelang Ramadan di Halaman Masjid Al-Maarif Kota Tarakan	Menyediakan kebutuhan pokok di bawah HET termasuk telur, gula, minyak goreng, dan bawang merah guna menjaga daya beli masyarakat menjelang Ramadan 1447 H	Bulog, DPKP, DKUKMP, Bapanas, Pemkot Tarakan & TPID Kota Tarakan
13 Februari 2026	GPM Serentak Nasional di Lapangan Agathis, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan	Menyediakan kebutuhan pokok dengan harga di bawah HET dalam rangka GPM serentak nasional menjelang Ramadan 1447 H	DPKP, Bapanas, Bulog, Polri, Pemkab Bulungan & TPID Kab. Bulungan
14 Februari 2026	Pasar murah UKM Center Tanah Merah Kabupaten Nunukan	Menyediakan bahan pangan pokok dengan harga di bawah HET kepada masyarakat guna menjaga stabilitas harga dan daya beli menjelang Ramadan	TPID Kab. Nunukan, Pemkab Nunukan & Disperindagkop
20 Februari 2026	GPM Sinergi dengan Bulog Kelurahan Pamusian Kota Tarakan	Menyediakan beras SPHP dan bahan pokok lainnya dengan harga di bawah HET dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga menjelang Ramadan	Bulog & TPID Kabupaten Tana Tidung
23, 25, 28 Februari 2026	GPM Desa Menjelutung, Desa Sengkong, Desa Bandan Bikis, Desa Bebatu, Desa Seludau, Desa Sesayap Selor Kabupaten Tana Tidung	Menyediakan bahan pangan pokok dengan harga di bawah HET kepada masyarakat guna menjaga keterjangkauan harga selama Ramadan	Pemkab Tana Tidung, DPKP & Bapanas
27 Februari 2026	Toko Murah Benuanta Pasar Induk Tanjung Selor Kabupaten Bulungan	Penyediaan bahan pangan pokok secara rutin dengan harga terjangkau guna menjaga stabilitas harga dan meningkatkan optimisme masyarakat terhadap inflasi	Pemkab Bulungan & TPID Kab. Bulungan
3, 9, 16 Maret 2026	Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Mingguan	Evaluasi Pelaksanaan TPID setiap minggunya	Kemendagri
2 Maret 2026	GPM Desa Sepala Dalung dan Desa Sesayap Kabupaten Tana Tidung	Menyediakan bahan pangan pokok dengan harga di bawah HET kepada masyarakat guna menjaga keterjangkauan harga selama Ramadan	Pemkab Tana Tidung, DPKP & Bapanas
2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 25, 27, 30 Maret 2026	Toko Murah Benuanta Pasar Induk Tanjung Selor Kabupaten Bulungan	Penyediaan bahan pangan pokok secara rutin dengan harga terjangkau	Pemkab Bulungan & TPID Kab. Bulungan
3 Maret 2026	GPM Posyandu Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan	Menyediakan bahan pangan pokok dengan harga di bawah HET kepada masyarakat	Bulog, Bapanas, dan TPID Kabupaten Bulungan
4 Maret 2026	GPM Desa Buong Baru, Desa Kujau, Desa Maning Kabupaten Tana Tidung	Menyediakan bahan pangan pokok dengan harga di bawah HET kepada masyarakat	Pemkab Tana Tidung, DPKP & Bapanas
4 Maret 2026	GPM Desa Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan	Menyediakan bahan pangan pokok dengan harga di bawah HET kepada masyarakat	Pemkab Bulungan, Bulog & Bapanas

5 Maret 2026	GPM Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan	Menyediakan bahan pangan pokok dengan harga di bawah HET kepada masyarakat	Pemkab Bulungan, Bulog & Bapanas
5, 7 Maret 2026	GPM Kelurahan Kampung 6, Kota Tarakan	Menyediakan beras SPHP dan bahan pokok lainnya dengan harga di bawah HET dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga menjelang Idulfitri	Bulog & TPID Kota Tarakan
6 Maret 2026	GPM Kelurahan Pamusian, Kota Tarakan	Menyediakan beras SPHP dan bahan pokok lainnya dengan harga di bawah HET dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga menjelang Idulfitri	Bulog & TPID Kota Tarakan
7 Maret 2026	GPM Desa Tideng Pale, Kabupaten Tana Tidung	Menyediakan bahan pangan pokok dengan harga di bawah HET kepada masyarakat	Pemkab Tana Tidung, DPKP & Bapanas
8 Maret 2026	GPM Sinergi BI dengan Bulog Gita Jalatama Kota Tarakan	Menyediakan bahan pangan pokok dengan harga di bawah HET melalui kolaborasi KPw BI Kaltara dan Bulog guna mendukung stabilitas harga dan meningkatkan optimisme masyarakat menjelang Idulfitri	BI, Bulog, dan TPID Kota Tarakan
10 Maret 2026	Pasar Murah Kolaborasi dengan Kejjaksanaan Negeri di Alun-Alun Nunukan Depan Tugu Dwikora Kabupaten Nunukan	Menyediakan bahan pangan dengan harga terjangkau melalui kolaborasi lintas institusi	Kejari Nunukan, TPID Kab. Nunukan & Pemkab Nunukan
10 Maret 2026	Pasar Murah Disperindagkop Provinsi Kalimantan Utara di Lapangan Agathis, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan	Menyediakan bahan pangan pokok dengan harga di bawah HET kepada masyarakat	Disperindagkop Prov. Kaltara & Pemprov Kaltara
10 Maret 2026	GPM Desa Wonomulyo, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan	Menyediakan bahan pangan pokok dengan harga di bawah HET kepada masyarakat	Pemkab Bulungan, Bulog & Bapanas
11 Maret 2026	GPM Halaman Perumda Intimung Kabupaten Malinau	Menyediakan bahan pangan pokok dengan harga di bawah HET kepada masyarakat	Bulog & Bapanas
11 Maret 2026	Operasi Pasar Murah BUMDES Tideng Pale Timur, Kabupaten Tana Tidung	Menyediakan bahan pangan dengan harga terjangkau melalui peran BUMDES sebagai agen distribusi pangan lokal guna menjaga keterjangkauan harga menjelang Idulfitri	BUMDES Tideng Pale Timur & Bapanas
11 Maret 2026	GPM Desa Salimbatu, Kabupaten Bulungan	Menyediakan bahan pangan pokok dengan harga di bawah HET kepada masyarakat	Pemkab Bulungan, Bulog & Bapanas
12 Maret 2026	GPM Halaman Masjid Al-Maarif Kota Tarakan	Menyediakan bahan pangan melalui kerja sama Bulog guna menjaga keterjangkauan harga menjelang Idulfitri	Bulog, Dinas Perikanan, DKUKMP, DPKP & Bapanas

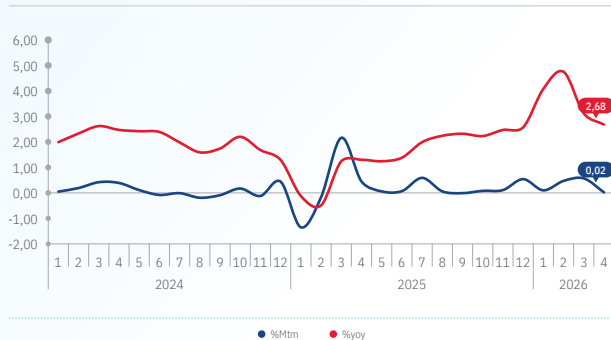
2.6. Tracking Inflasi Triwulan II 2026

Inflasi tahunan gabungan 3 kabupaten/kota IHK Kalimantan Utara pada triwulan II 2026 (realisasi hingga April 2026) tercatat berada di atas sasaran inflasi nasional dan menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada bulan April 2026, IHK gabungan 3 kabupaten/kota menunjukkan inflasi sebesar 0,02% (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,56% (mtm) (Grafik II.3). Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan Kalimantan Utara pada April 2026 mengalami inflasi sebesar 2,68% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,42% (yoy).

Peningkatan inflasi tahunan tersebut terutama dipengaruhi oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, khususnya komoditas emas perhiasan. Secara bulanan, inflasi April 2026 terutama disumbang oleh meningkatnya harga

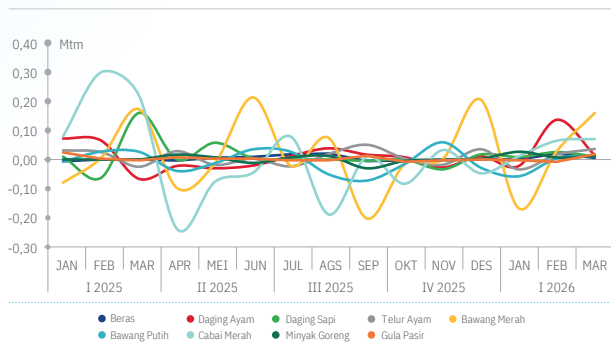
komoditas tomat (andil 0,10% mtm), angkutan udara (andil 0,08% mtm), dan bawang merah (andil 0,04% mtm). Kenaikan harga tomat sejalan dengan pasokan dari sejumlah daerah pemasok utama yang masih terbatas, khususnya dari wilayah Sulawesi, akibat kondisi cuaca yang kurang kondusif dan berdampak pada penurunan produksi. Sementara itu, tarif angkutan udara meningkat sejalan dengan penyesuaian biaya operasional penerbangan, terutama akibat kenaikan harga avtur. Di sisi lain, terbatasnya frekuensi penerbangan pada beberapa rute turut memengaruhi ketersediaan layanan di tengah permintaan masyarakat yang masih tinggi. Adapun harga bawang merah mengalami kenaikan seiring terbatasnya pasokan dari daerah sentra produksi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh penurunan produksi domestik, khususnya dari daerah penghasil di Sulawesi.

Grafik II.3. Perkembangan Inflasi Bulanan Kalimantan Utara



Sumber: BPS, diolah

Grafik II.4. Perkembangan Harga Bulanan Pangan Strategis Kalimantan Utara



Sumber: PIHPS, diolah

Di sisi lain, inflasi bulanan Provinsi Kalimantan Utara pada April 2026 yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga cabai rawit (andil 0,16% mtm), daging ayam ras (andil 0,10% mtm), dan emas perhiasan (andil 0,10% mtm). Penurunan harga cabai rawit dipengaruhi membaiknya kelancaran distribusi pasca-Idulfritri, termasuk normalisasi layanan angkutan laut yang mendukung pasokan antarwilayah. Sementara itu, penurunan

harga daging ayam ras didukung oleh normalisasi permintaan pasca-Idulfritri. Lebih lanjut, harga emas perhiasan mengalami penurunan sejalan dengan koreksi harga emas global. Perkembangan ini dipengaruhi oleh dinamika pasar keuangan global, termasuk ekspektasi suku bunga global yang masih tinggi sehingga menahan permintaan terhadap aset lindung nilai.

2.7. Prakiraan Inflasi Triwulan II 2026

Inflasi Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan II 2026 diperkirakan menurun dibandingkan triwulan sebelumnya dan tetap berada di kisaran inflasi nasional $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Penurunan tersebut dipengaruhi oleh tekanan pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang melambat seiring membaiknya pasokan hortikultura akibat cuaca yang relatif lebih kondusif menjelang pertengahan tahun 2026. Tekanan pada Kelompok Perawatan Pribadi dan jasa lainnya juga diperkirakan melambat sejalan dengan harga emas perhiasan yang mulai stabil. Namun demikian, melambatnya tekanan inflasi diperkirakan tertahan oleh kenaikan harga pada kelompok Transportasi, khususnya tarif angkutan udara atas dampak kenaikan harga avtur dan kebijakan pemerintah menaikkan Tarif Batas Atas (TBA) yang ditetapkan maskapai. Menghadapi berbagai risiko inflasi tersebut, KPwBI Provinsi Kalimantan Utara bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah secara konsisten memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam menjaga stabilitas harga, khususnya pada komoditas pangan strategis. Upaya tersebut dilaksanakan melalui penguatan strategi 4K serta dukungan terhadap efektivitas Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) guna memastikan inflasi tetap terkendali sepanjang triwulan II 2026.

BOKS 2

Launching Mini Distribution Center (MDC) : Inovasi Pengendalian Inflasi Menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru 2026

Sebagai bagian dari penguatan upaya pengendalian inflasi daerah, KPwBI Provinsi Kalimantan Utara bersama dengan Pemerintah Kota Tarakan telah melaksanakan *Launching Mini Distribution Center (MDC)* di Pasar Tenguyun Kota Tarakan. Kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat instrumen stabilisasi harga melalui intervensi sisi pasokan dan distribusi komoditas pangan strategis.

Program MDC merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, Pemerintah Kota Tarakan, dan Perum Bulog. Kolaborasi ini mencerminkan penguatan koordinasi dalam kerangka Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), khususnya pada aspek Ketersediaan Pasokan dan Kelancaran Distribusi (4K). Dengan adanya MDC, diharapkan respons intervensi dapat dilakukan secara lebih cepat dan terarah apabila terjadi lonjakan harga komoditas tertentu di tingkat pasar.

MDC dirancang sebagai simpul distribusi yang berfungsi untuk mendekatkan pasokan komoditas kepada pedagang dan konsumen secara lebih cepat dan efisien. Kehadiran MDC diharapkan mampu memotong rantai distribusi yang panjang, mengurangi potensi biaya tambahan di tingkat

perantara, serta menekan volatilitas harga di pasar, khususnya pada periode dengan potensi tekanan inflasi yang meningkat seperti Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan momentum musiman lainnya.

Selain sebagai instrumen stabilisasi, MDC juga berperan sebagai mekanisme *early response* terhadap potensi gangguan distribusi, mengingat sebagian besar pasokan pangan Kota Tarakan masih bergantung pada jalur distribusi dari luar daerah. Dengan sistem distribusi yang lebih terorganisir, MDC diharapkan dapat memperkuat ketahanan pasokan lokal serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan operasi pasar dan program stabilisasi lainnya.

Ke depan, program MDC akan terus dievaluasi dan dioptimalkan agar dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata terhadap stabilitas harga di Kota Tarakan. Inisiatif ini juga berpotensi menjadi model penguatan distribusi pangan yang dapat direplikasi pada pasar lain di wilayah Kalimantan Utara sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi yang lebih terstruktur dan terintegrasi.



Gambar Boks V.2.1 Pelaksanaan Launching MDC di Pasar Tenguyun Kota Tarakan



Pembiayaan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)



Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara didukung oleh intermediasi perbankan. Penyaluran kredit tumbuh di atas level regional Kalimantan dan Nasional. Penyaluran kredit dalam bentuk kredit konsumsi dan modal kerja masing-masing tumbuh 7,04 % (yoy) dan 35,39% (yoy). Meningkatnya investasi sejalan dengan optimisme pelaku usaha terhadap pemulihan ekonomi nasional dan Kaltara serta akselerasi beberapa proyek strategis. Realisasi investasi yang sudah dilakukan selama triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar Rp11 Triliun atau 56,01 % dari target investasi 2026 yang ditetapkan sebesar Rp30,55 Triliun. Meningkatnya kredit modal kerja terjadi seiring optimisme masyarakat terhadap perekonomian, terutama pada sektor bisnis.

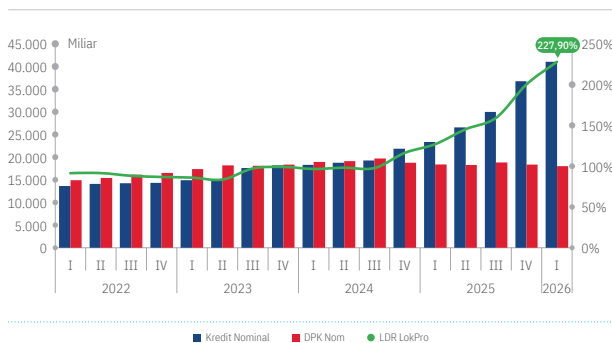
3.1. Intermediasi dan Pertumbuhan Aset Perbankan

Intermediasi perbankan Kalimantan Utara meningkat. Rasio *Loan to Deposit* (LDR) berdasarkan lokasi proyek mencapai 227,90%, lebih tinggi dari periode sebelumnya sebesar 200,24%. Kondisi ini menggambarkan aktivitas penyaluran kredit perbankan melampaui dana simpanan hal ini dilakukan guna mendorong pertumbuhan perekonomian di Provinsi Kalimantan Utara (Grafik III.1). Peningkatan ini didorong oleh peningkatan pembiayaan pada sektor industri pengolahan dan pertambangan, seiring meningkatnya aktivitas usaha dan realisasi proyek di Kalimantan Utara.

Total aset perbankan pada triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp22,56 Triliun tumbuh positif sebesar 16,66% (yoy). Pertumbuhan aset perbankan di wilayah Kalimantan Utara sejalan dengan akselerasi penyaluran kredit. Kinerja aset perbankan di wilayah Kalimantan dan Nasional juga tetap tumbuh positif, masing-masing tumbuh sebesar 2,47% (yoy) dan 10,79% (yoy) (Grafik III.2).

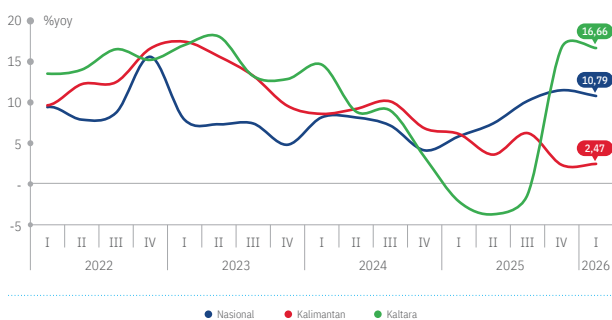
Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) masih mengalami kontraksi sebesar 1,99% (yoy), namun membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi lebih dalam sebesar 2,22% (yoy) sebagaimana ditunjukkan pada Grafik III.3. Penurunan DPK terutama dipengaruhi oleh kontraksi DPK Pemerintah sebesar 24,33% (yoy), sejalan dengan

Grafik III.1. Perkembangan Intermediasi Perbankan



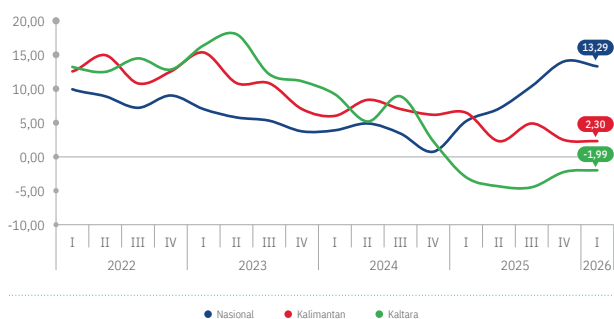
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik III.2. Perkembangan Pertumbuhan Aset Perbankan Kaltara, Kalimantan, dan Nasional



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik III.3. Perkembangan Pertumbuhan DPK Perbankan Kaltara, Kalimantan, dan Nasional

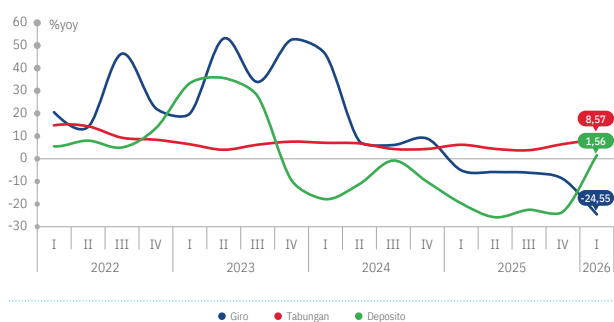


Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

meningkatnya realisasi anggaran, termasuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN, sehingga saldo dana pemerintah di perbankan menurun. Sementara itu, DPK korporasi dan perorangan masih mencatatkan pertumbuhan positif masing-masing sebesar 2,90% (yoy) dan 1,63% (yoy).

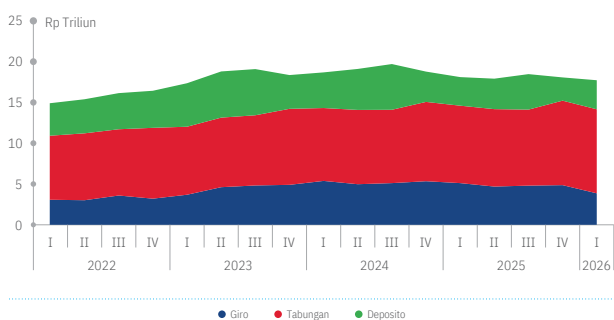
Secara nominal, total DPK mencapai Rp17,72 Triliun, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar Rp18,06 Triliun. DPK Giro masih terkontraksi sebesar 24,55% (yoy). Sementara itu, DPK Tabungan dan DPK Deposito masing-masing tumbuh sebesar 8,57% (yoy) dan 1,56% (yoy) (Grafik III.4). Hal ini sesuai dengan peralihan instrumen investasi

Grafik III.4. Perkembangan Pertumbuhan Komponen DPK Perbankan Kaltara

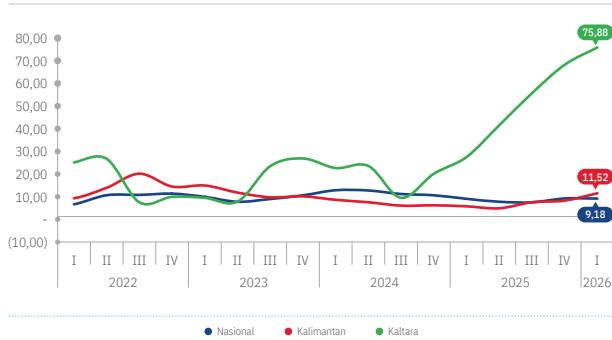


Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

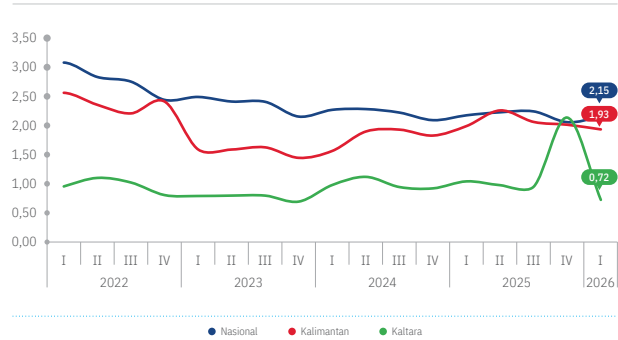
Grafik III.5. Perkembangan Komponen DPK Perbankan Kaltara



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik III.6. Perkembangan Pertumbuhan Kredit Kaltara, Kalimantan, dan Nasional

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik III.7. Perkembangan NPL Kredit Kaltara, Kalimantan, dan Nasional

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Tabel III.1. Perkembangan DPK secara spasial

Kabupaten/Kota	Nominal DPK (Miliar Rp)	Pangsa (%)	Pertumbuhan (% ,yoy)	
			IV 2025	I 2026
Prov. Kaltara	18.008	100,00%	-2,22	-1,99
Bulungan	3.463	19,23%	-2,92	-0,98
Nunukan	3.173	17,62%	5,21	2,74
Malinau	2.091	11,61%	-8,63	-11,83
Tana Tidung	418	2,32%	-13,87	-48,88
Tarakan	8.863	49,22%	-1,86	3,06

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

masyarakat dari instrumen transaksional, seperti giro ke instrumen produk simpanan bank, seperti tabungan dan deposito.

Berdasarkan jenisnya, tabungan masih menjadi pilihan utama simpanan nasabah dengan pangsa mencapai 58,14%, diikuti oleh simpanan giro sebesar 21,74% dan deposito dengan pangsa sebesar 20,12% (Grafik III.5). Secara spasial, pangsa DPK terbesar berasal dari Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Nunukan, masing-masing sebesar 49,22%, 19,23%, dan 17,62%. Pertumbuhan DPK kabupaten/kota secara keseluruhan mengalami penurunan, namun Kota Tarakan mengalami pertumbuhan tertinggi dibanding Kab/Kota lainnya sebesar 3,06%, yoy, sedangkan terendah di Kabupaten Tana Tidung mengalami kontraksi sebesar 48,88%, yoy (Tabel III. 1).

Kredit perbankan tumbuh terakselerasi sebesar 75,88% (yoy). Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit terutama didorong oleh kredit investasi (xx%,yoy) dan kredit modal kerja (xx%,yoy). Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan kredit terjadi hampir di seluruh sektor terutama LU LU Listrik, Gas dan Air sebesar 296,31% (yoy), diikuti LU Pertambangan sebesar 209,73% (yoy) dan LU Pertambangan sebesar 191,39% (yoy). Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) KIH di Kab. Bulungan mempercepat transformasi ekonomi hijau di Kalimantan Utara. Proyek ini menciptakan lingkungan yang sangat kondusif untuk penyaluran kredit perbankan mulai dari

Tabel III.2. Perkembangan Kredit Secara Spasial

Kabupaten/Kota	Nominal DPK (Miliar Rp)	Pangsa (%)	Pertumbuhan (% ,yoy)	
			IV 2025	I 2026
Prov. Kaltara	41.040	100,00%	68,24	75,88
Bulungan	18.815	45,85%	88,64	100,83
Nunukan	4.010	9,77%	-1,22	-11,95
Malinau	1.555	3,79%	2,26	2,22
Tana Tidung	443	1,08%	7,86	9,37
Tarakan	16.219	39,52%	107,89	116,62

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

investasi, modal kerja dan konsumsi. Pertumbuhan kredit secara nominal mencapai Rp41,04 Triliun lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar Rp36,75 Triliun.

Di tengah meningkatnya pertumbuhan kredit, risiko kredit tetap terjaga tercermin dari Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) sebesar 0,72%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 2,14%. NPL Kaltara pada periode triwulan I 2026 lebih rendah dibandingkan dengan wilayah Kalimantan dan nasional masing-masing sebesar 1,93% dan 2,15% (Grafik IV.7). Penurunan rasio NPL perbankan di Kalimantan Utara pada triwulan I 2026 terutama dipengaruhi oleh membaiknya kualitas kredit seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang masih tinggi sejalan dengan kegiatan industrialisasi. Pertumbuhan ekonomi Kaltara yang positif turut menopang pendapatan pelaku usaha dan rumah tangga, sehingga kapasitas pembayaran kewajiban debitur relatif tetap terjaga.

Secara spasial pangsa penyaluran kredit terbesar berasal dari Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, dan Kabupaten Nunukan masing-masing sebesar 45,85%, 39,52%, dan 9,77%. Kredit di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan mengalami kenaikan masing-masing sebesar 116,62% (yoy) dan 100,83% (yoy). Di sisi lain, kredit di Kabupaten Nunukan masih mengalami kontraksi sebesar 11,95% (yoy) (Tabel IV. 2). Peningkatan penyaluran kredit di Kota Tarakan didorong oleh ekspansi sektor industri pengolahan, khususnya pada pabrik pengolahan kayu menjadi kertas.

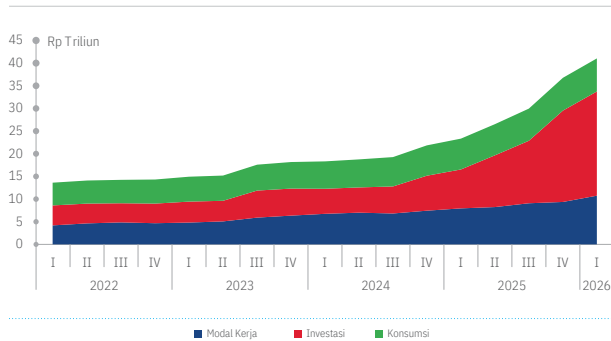
3.2. Pembiayaan Daerah

Berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan penyaluran kredit berasal dari peningkatan Kredit Investasi menjadi sebesar 168,02% (yoy) pada triwulan I 2026, lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2025 sebesar 162,05% (yoy) (Grafik IV. 9). Hal ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas LU Listrik, Gas dan Air (LGA), LU Pertambangan dan LU Industri Pengolahan masing-masing sebesar 296,31% (yoy), 209,73% (yoy), dan 191,39% (yoy). Peningkatan LU LGA ini sejalan dengan PSN KIH yang ada di Kaltara sehingga memicu investasi konstruksi pembangkit listrik. Kemudian, adanya pembangunan industri pengolahan SDA di KIH memberi dampak pada peningkatan pembiayaan di sektor industri pengolahan utamanya manufaktur. Berdasarkan komposisinya, Kredit Investasi memiliki pangsa terbesar mencapai 56,04%, disusul oleh Kredit Modal kerja dan Kredit Konsumsi masing-masing sebesar 26,18% dan 17,78%. (Grafik III. 8)

Secara nominal, penyaluran kredit didominasi oleh kredit di atas Rp5 miliar dan Rp100Jt-Rp500Jt. Pangsa kredit terbesar adalah kredit di atas Rp5 miliar sebesar 72,68%, naik dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 67,22%. Pangsa penyaluran kredit dengan nilai Rp100Jt-Rp500Jt mengalami penurunan menjadi sebesar 15,19% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 18,29%. Jika dilihat berdasarkan jumlah rekening, penyaluran kredit mayoritas diberikan kepada debitur dengan nominal kredit Rp100 juta ke bawah dengan pangsa sebesar 84,93% (Tabel III. 3).

Secara sektoral, pangsa penyaluran kredit didominasi oleh LU Industri Pengolahan yang mencapai 44,19% dibandingkan periode sebelumnya yang hanya 40,12% didukung oleh adanya pembangunan industri manufaktur PSN KIH di Tanah Kuning. Pangsa kredit terbesar selanjutnya yaitu LU Listrik, Gas, dan Air sebesar 14,41% lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya sebesar 11,80%. LU Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 7,73%, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar 8,74%. (Grafik IV.10).

Grafik III.8. Perkembangan Kredit Jenis Penggunaan Kaltara



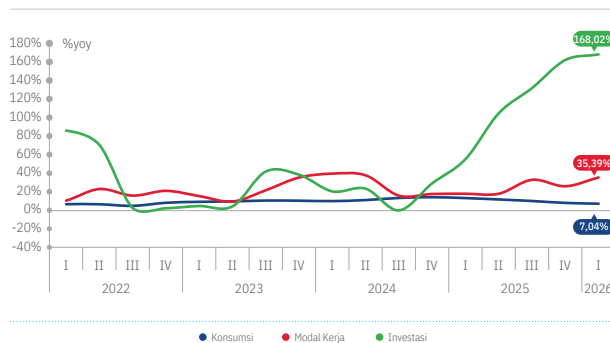
Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Tabel III.3. Klasifikasi Penyaluran Kredit Kaltara Berdasarkan Nilai

Kredit	Nominal Kredit (Milyar)	% Nominal	Jumlah Rekening	% Rekening
<100 JT	2.520,11	5,70%	211.865	84,93%
>100JT - 500JT	6.714,65	15,19%	34.441	13,81%
>500JT - 1 M	1.061,56	2,40%	1.911	0,77%
1M-5M	1.778,39	4,02%	1.020	0,41%
>5M	32.124,45	72,68%	214	0,09%
Total	44.199,16	100,00%	249.451	100,00%

Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

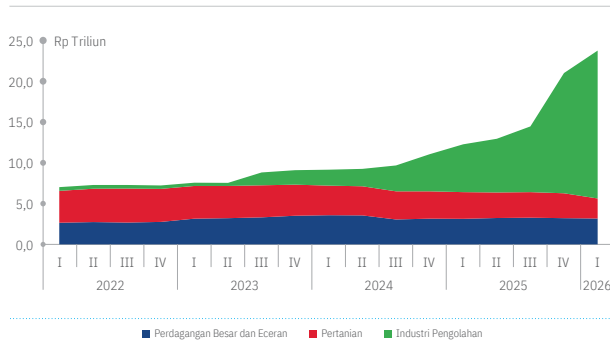
Grafik III.9. Perkembangan Pertumbuhan Kredit Jenis Penggunaan Kaltara



Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Pertumbuhan kredit pada periode berjalan terutama didorong oleh peningkatan penyaluran kredit pada LU Listrik, Gas, dan Air serta LU Industri Pengolahan yang masing-masing tumbuh sebesar 296,31% (yoy) dan 209,73% (yoy). Akselerasi kredit pada sektor tersebut sejalan dengan berlanjutnya pembangunan proyek strategis di Provinsi Kalimantan Utara, khususnya Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIH) di Tanah Kuning, yang saat ini telah memasuki tahap awal operasional produksi serta pengembangan infrastruktur pendukung, termasuk fokus pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Tahap pembangunan tersebut mendorong peningkatan kebutuhan pembiayaan, terutama untuk pengadaan konstruksi, mesin, logistik, serta penyediaan akses energi. Di tengah peningkatan penyaluran kredit tersebut, risiko kredit pada sektor terkait tetap

Grafik III.10. Perkembangan Kredit Kaltara Berdasarkan Lapangan Usaha



Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

rendah dan terkendali, tercermin dari rasio NPL LU Listrik, Gas, dan Air serta LU Industri Pengolahan yang masing-masing berada pada level 0,00% dan 0,02%.

3.3. Pembiayaan Sektor Korporasi

Pembiayaan korporasi triwulan I 2026 naik menjadi sebesar 128,26% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 115,88%. (Grafik III.11). Akselerasi kredit korporasi terjadi seiring dengan meningkatnya penyaluran kredit ke LU Industri Pengolahan serta LU Listrik, Gas, dan Air. Akselerasi kredit pada LU Industri Pengolahan khususnya terjadi pada subsektor kayu olahan sejalan dengan pengembangan pabrik kertas di Kaltara. Sementara itu, akselerasi penyaluran kredit pada LU listrik, gas, dan air utamanya terjadi pada subsektor listrik yakni proses Pembangunan KIHI di Tanah Kuning dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) serta adanya Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Tanjung Selor untuk memperkuat sistem kelistrikan di Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan strukturnya, mayoritas Kredit Korporasi ditujukan kepada LU Industri Pengolahan (6063,87%); diikuti dengan sektor Listrik, Gas dan Air (LGA) (18,68%); dan sektor Pertanian dan Perikanan (7,53%) (Grafik III.12).

Risiko kredit korporasi Kaltara terkendali dan berada pada level yang masih aman. Hal tersebut tercermin Pada triwulan IV 2025, NPL korporasi hanya sebesar 0,36%. *Non Performing Loan*

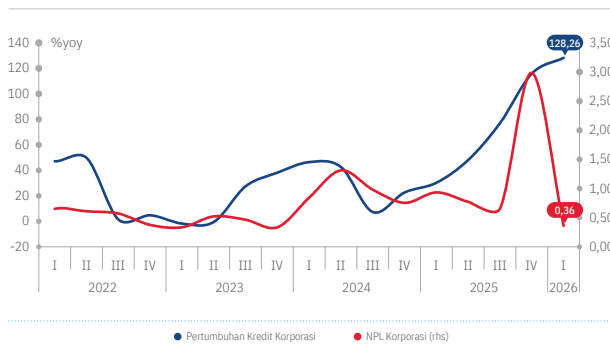
korporasi pada sejumlah sektor utama yaitu Konstruksi mengalami peningkatan menjadi sebesar 19,10%, lebih tinggi daripada periode sebelumnya sebesar 11,10%. Melambatnya kredit konstruksi sejalan dengan finalisasi proyek konstruksi bernilai besar di Kaltara, antara lain Proyek Pembangkit Listrik dan Industri Pengolahan.

Sejalan dengan kredit kepada korporasi yang menunjukkan peningkatan, kinerja korporasi terpantau membaik. Berdasarkan hasil liaison Bank Indonesia, secara agregat Likert Scale (LS) kapasitas utilisasi dan permintaan domestik relatif stabil di tengah harga batu bara yang fluktuatif (Grafik III.13 dan III.14).

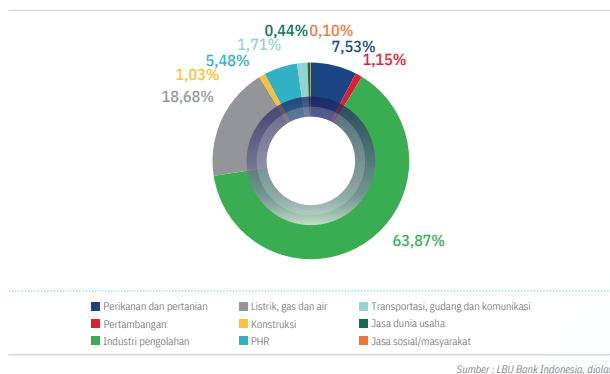
3.4. Pembiayaan Sektor Rumah Tangga

Kredit Konsumsi (KK) kepada rumah tangga tumbuh sebesar 8,33% (yoy), sejalan dengan masih terjaganya konsumsi rumah tangga pada periode HBKN. Kredit Properti secara nominal masih mencatatkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, meskipun laju pertumbuhan tahunannya tidak setinggi triwulan sebelumnya, yaitu sebesar 8,72% (yoy). Selain itu, Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) masih mengalami kontraksi sebesar 13,88% (yoy). Di sisi lain, Kredit Multiguna mencatatkan peningkatan pertumbuhan menjadi sebesar 8,57% (yoy), dari triwulan sebelumnya sebesar 7,83% (yoy), sehingga turut menopang kinerja Kredit Konsumsi rumah

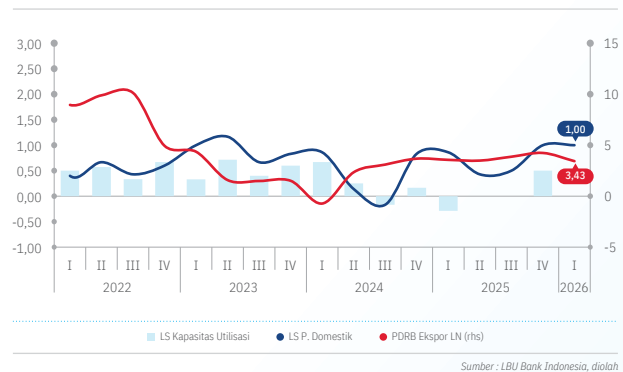
Grafik III.11. Perkembangan Kredit Korporasi Kaltara



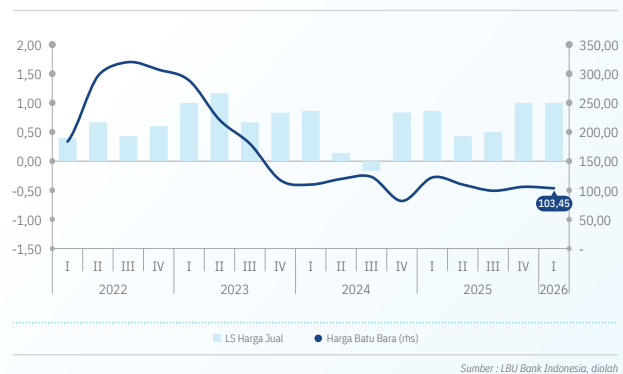
Grafik III.12. Pangsa Kredit Korporasi



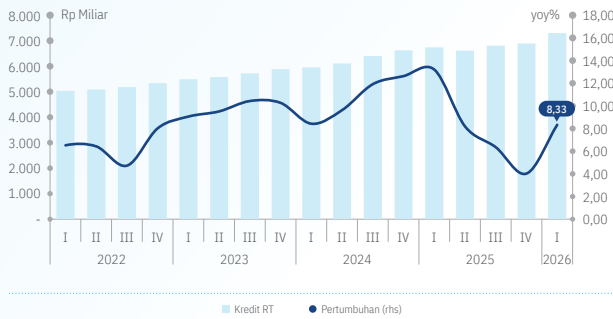
Grafik III.13. LS Kap. Utilisasi, LS P. Domestik dan PDRB Ekspor LN (RHS)



Grafik III.14. LS Harga Jual dan Harga Batu bara

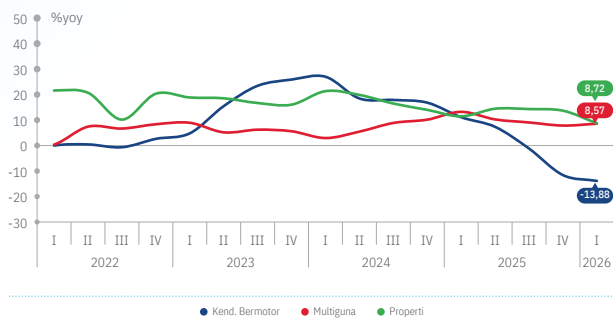


Grafik III.15. Perkembangan Kredit Rumah Tangga Kaltara



Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik III.16. Perkembangan Kredit Rumah Tangga Kaltara Berdasarkan Jenisnya

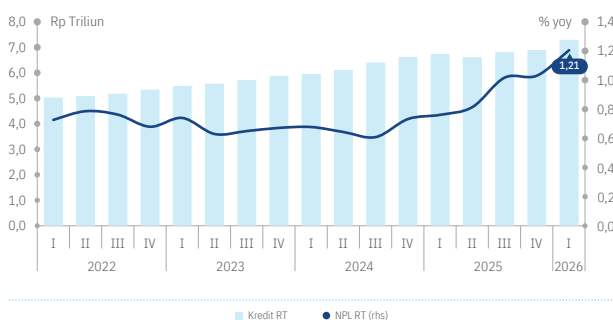


Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

tangga. Berdasarkan komposisinya, Kredit Rumah Tangga pada triwulan laporan masih didominasi oleh Kredit Multiguna dengan pangsa sebesar 72,83%, diikuti oleh Kredit Properti sebesar 15,69%, dan KKB sebesar 3,07%.

Meskipun kredit terus tumbuh akseleratif, namun rasio NPL kredit Rumah tangga di Kaltara terjaga di level yang rendah. Rasio NPL kredit Rumah Tangga masih berada pada level yang rendah dan tercatat sebesar 1,21%, sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,03% namun masih jauh bawah ambang batas risiko (*threshold*) kredit sebesar 5%. (Grafik III.17). Cukup stabilnya NPL rumah tangga pada level rendah didukung oleh kemampuan bayar RT Kaltara yang masih cukup baik, hal ini terindikasi dari NTP yang masih terjaga pada level tinggi, yakni sebesar 117,12 pada Maret 2026.

Grafik III.17. Perkembangan Kredit Rumah Tangga dan NPL RT Kaltara



Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

3.5. Pengembangan Akses Keuangan UMKM

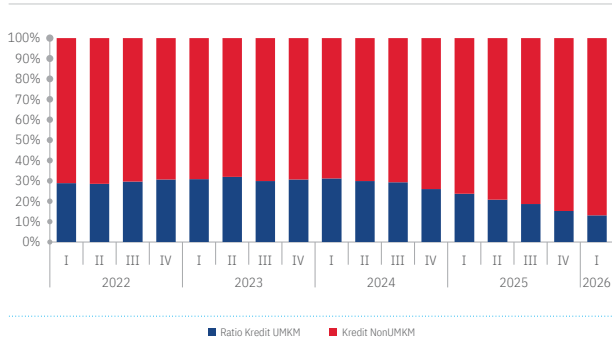
Rasio kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap total pembiayaan triwulan I 2026 mengalami perlambatan menjadi sebesar 13,07%, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2025 sebesar 15,20% (Grafik III.18). Penyaluran kredit UMKM pada triwulan I 2026 mengalami kontraksi utamanya dari jenis kredit investasi. Pertumbuhan penyaluran kredit UMKM terkontraksi sebesar 3,03% (yoy) (Grafik IV.19), dimana Kredit modal kerja dan kredit investasi terkontraksi masing-masing sebesar 2,90% (yoy) dan 3,34% (yoy) Grafik III. 20).

Berdasarkan pangsa jenis penggunaannya, pangsa Kredit UMKM masih didominasi Kredit Modal Kerja yaitu sebesar 69,75% sedangkan investasi sebesar 30,25% (Grafik IV.21). Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan pembiayaan UMKM masih didominasi oleh keperluan operasional. UMKM yang baru beroperasi 1-2 tahun umumnya memfokuskan pembiayaan pada kebutuhan operasional harian, seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, ongkos distribusi, dan sewa tempat usaha. Sementara itu, kebutuhan pembiayaan untuk investasi umumnya masih dipenuhi melalui modal sendiri maupun pinjaman dari lembaga keuangan non-bank dan pihak non-lembaga keuangan. Jika berdasarkan Lapangan Usaha (LU), kredit UMKM paling besar disalurkan ke LU Perdagangan Hotel Restoran (PHR) mencapai 50,64% dari total kredit UMKM, diikuti oleh LU Pertanian dan LU Perikanan yang mencapai 25,39% dari total kredit UMKM. (Grafik III.22)

Penurunan penyaluran kredit kepada UMKM sejalan dengan melambatnya kredit UMKM pada LU Pertanian, yang tumbuh sebesar 5,14% (yoy) pada triwulan I 2026, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2025 sebesar 5,71% (yoy). Meskipun secara total kredit UMKM mengalami penurunan, beberapa lapangan usaha masih mencatatkan peningkatan pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan signifikan terutama terjadi pada kredit UMKM sektor Industri yang tumbuh sebesar 17,59% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 12,52% (yoy). Selain itu, kredit UMKM pada LU Pertambangan juga tumbuh meningkat sebesar 3,14% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,03% (yoy).

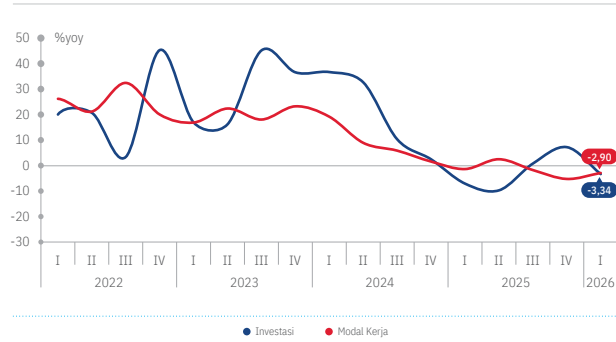
Risiko kredit UMKM pada triwulan I 2026 menunjukkan perbaikan, tercermin dari penurunan rasio NPL kredit UMKM menjadi sebesar 3,81%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,28%. Perbaikan tersebut mengindikasikan penurunan risiko kredit UMKM secara agregat, meskipun masih terdapat tekanan pada Kredit Investasi. Rasio NPL Kredit Investasi tercatat meningkat menjadi sebesar 10,54%, dari triwulan sebelumnya sebesar 7,92%. Namun demikian, secara nominal NPL Kredit Investasi UMKM tercatat relatif terkendali, yaitu sebesar Rp33 miliar dari total kredit sebesar Rp1.622 miliar, sehingga kualitas Kredit Investasi

Grafik III.18. Perkembangan Rasio Kredit UMKM Terhadap Total Kredit Kaltara



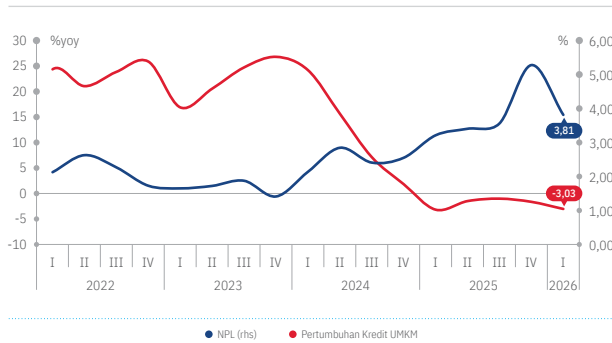
Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik III.20. Perkembangan Kredit UMKM Kaltara Berdasarkan Jenisnya



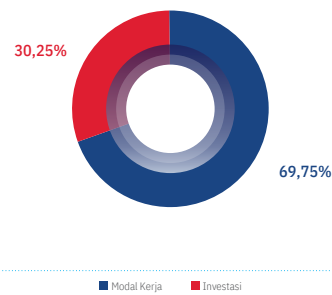
Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik III.19. Perkembangan Kredit UMKM Kaltara



Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik III.21. Komposisi Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Penggunaan Kaltara



Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

UMKM masih relatif terjaga. Sementara itu, NPL Kredit Modal Kerja tercatat sebesar 4,57%. Berdasarkan lapangan usaha, perbaikan kualitas kredit juga tercermin dari penurunan NPL pada LU Pertanian dan LU Jasa Keuangan, yang masing-masing tercatat sebesar 4,01% dan 5,78%. Dengan demikian, meskipun risiko kredit UMKM secara keseluruhan menurun, tekanan pada Kredit Investasi masih perlu menjadi perhatian karena mencatatkan peningkatan rasio NPL pada triwulan laporan.

Bank Indonesia terus mendorong penguatan penyaluran kredit kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11

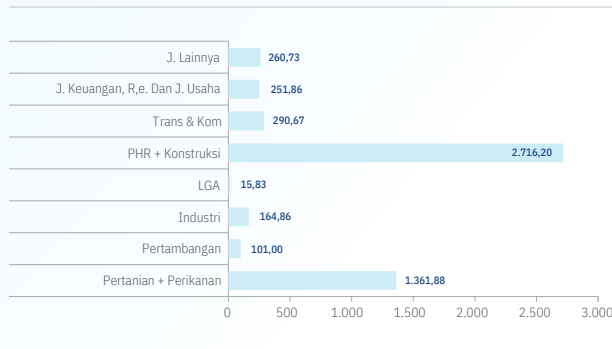
Tahun 2023 tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial. Kebijakan tersebut mengatur pemberian insentif likuiditas kepada bank yang menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas yang ditetapkan Bank Indonesia, termasuk pembiayaan inklusif yang diukur melalui pencapaian Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) serta pembiayaan kepada Usaha Ultra Mikro (UMi). Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat peran perbankan dalam mendukung pembiayaan sektor produktif, khususnya perluasan akses pembiayaan bagi pelaku UMi di berbagai daerah.

Tabel III.4. Akses Keuangan UMKM Binaan dan Mitra KPw BI Provinsi Kalimantan Utara

Jenis Usaha	Wilayah	Jumlah Usaha Binaan BI		Pinjaman (Rupiah)		Keterangan
		IV 2025	I 2026	IV 2025	I 2026	
Non Pertanian	Kota Tarakan	6	6	Rp748.415.000	Rp1.350.000.000	Perbankan
	Kabupaten Bulungan	2	2	Rp166.500.000	Rp400.000.000	Perbankan
	Kabupaten Malinau	3	3	Rp368.000.000	Rp500.000.000	Perbankan
Pertanian	Kota Tarakan	4	4	Rp50.000.000	Rp200.000	Perbankan
	Kabupaten Bulungan	3	3	Rp-	Rp-	
	Kabupaten Malinau	1	1	Rp23.500.000	Rp23.500.000	Perbankan
Total		19	19	Rp1.356.415.000	Rp2.273.700.000	

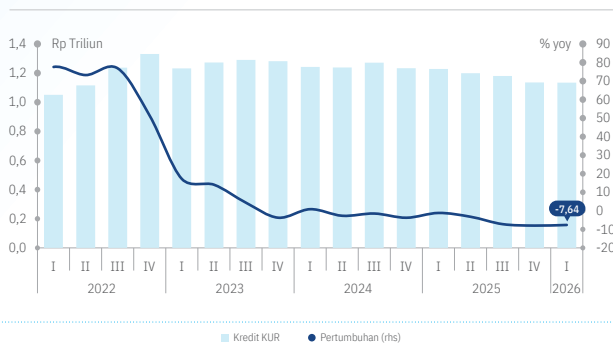
Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik III.22. Komposisi Kredit UMKM Berdasarkan Lapangan Usaha Kaltara



Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik III.23. KUR Kaltara



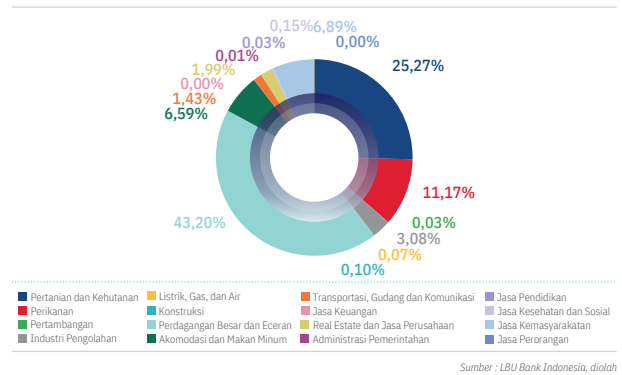
Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh perbankan berkontraksi sebesar 7,64% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 7,98% (yoy). Nominal penyaluran KUR mencapai sebesar Rp1,134 Triliun, lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada triwulan IV 2025 sebesar Rp1,135 Triliun. (Grafik III.23).

Berdasarkan komposisi, sektor terbesar penerima KUR adalah perdagangan besar dan eceran dengan pangsa mencapai 43,20% diikuti oleh sektor pertanian dan kehutanan sebesar 25,27% dan perikanan sebesar 11,17% (Grafik III.24). Secara spasial, pangsa penyaluran KUR terbesar berada di Kabupaten Nunukan yang mencapai 39,12%, diikuti oleh Kota Tarakan yang mencapai 29,27%, dan Kabupaten Bulungan mencapai 21,28%. (Grafik III.25)

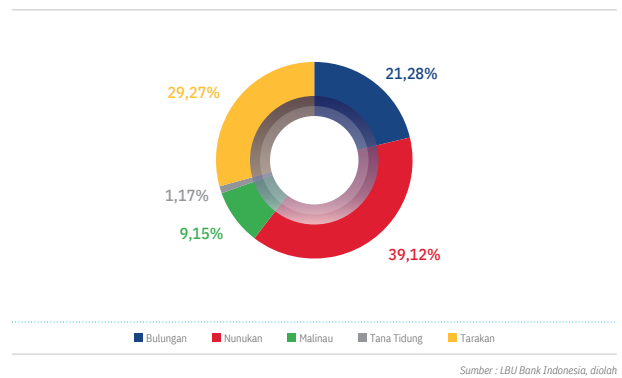
Dalam upaya mendorong UMKM berbasis ekonomi lokal agar menjadi kekuatan baru bagi perekonomian daerah, Bank Indonesia menerapkan strategi pengembangan UMKM secara *end-to-end* melalui percepatan pemanfaatan teknologi digital serta perluasan akses UMKM terhadap ekosistem ekonomi dan keuangan. Strategi tersebut dilaksanakan dengan berlandaskan pada tiga pilar utama Strategi Nasional Pengembangan UMKM, yakni korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan perluasan akses pembiayaan.

Grafik III.24. Komposisi KUR Berdasarkan Lapangan Usaha Kaltara



Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik III.25. Komposisi KUR Berdasarkan Kab/Kota di Kaltara



Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Terdapat 19 usaha yang terdaftar menjadi UMKM binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara yang terbagi menjadi 11 usaha non pertanian dan 8 usaha pertanian. Jumlah pembiayaan yang didapatkan oleh UMKM binaan dan mitra Bank Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 45,16% dengan nominal Rp2,47 miliar dari sebelumnya Rp1,36 miliar. Secara spasial, pembiayaan UMKM binaan Bank Indonesia terbesar di Kota Tarakan sebesar Rp1,55 miliar, diikuti Kabupaten Malinau sebesar Rp523,5 juta, dan Kabupaten Bulungan sebesar Rp400 juta. (Tabel III.4).

BOKS 3

Akselerasi Ekonomi Syariah Kaltara: Road to KASHAFA 2026 Bangun Ekosistem Halal yang Inklusif

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah global terus menunjukkan tren yang menjanjikan. Berdasarkan data Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2025, belanja konsumen muslim dunia diperkirakan akan melonjak hingga 3,36 triliun USD pada tahun 2028. Di tengah besarnya permintaan global tersebut, Indonesia berhasil menempati peringkat ketiga dunia dalam *State of the Global Islamic Economy* (SGIE) Indicator 2024/2025. Kekuatan ini tercermin dari sektor unggulan *Halal Value Chain* (HVC) yang mampu menyumbang lebih dari 27% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2025. Bagi Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), besarnya potensi pasar ini merupakan peluang strategis untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam rangka mengorkestrasi potensi tersebut, Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan rangkaian Road to Kaltara Sharia Festival (KASHAFA) 2026. Mengusung tema "**Berkah Ramadhan sebagai Penggerak Perekonomian Masyarakat**", program ini merupakan langkah inisiasi sekaligus pembuka menuju Puncak KASHAFA 2026 yang akan diselenggarakan pada bulan April mendatang. *Road to KASHAFA* dirancang sebagai wadah strategis yang mengintegrasikan berbagai inisiatif pengembangan ekonomi syariah, mulai dari peningkatan literasi, edukasi ZISWAF, pemberdayaan UMKM lokal, hingga penguatan ekosistem produk halal di tingkat daerah.

Pelaksanaan *Road to KASHAFA 2026* secara umum terbagi ke dalam tiga agenda pilar utama, yakni *Fair*, *Forum*, dan *Competition*. Pada agenda *Fair*, *showcase* UMKM diwujudkan



melalui Pameran/Bazaar UMKM Halal yang berkolaborasi dengan BAZNAS Kota Tarakan. Agenda ini melibatkan 42 UMKM unggulan daerah pada sektor halal *food*, *modest fashion* syariah, dan kriya. Guna akselerasi ekosistem digital, seluruh transaksi diwajibkan menggunakan QRIS. Selain itu, pilar ini juga menghadirkan Pasar Murah sebagai langkah pengendalian inflasi menjelang Idulfitri hasil kolaborasi bersama TPID dan Bulog, serta peluncuran Program Wakaf Produktif bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk pemanfaatan ekosistem produktif *Masjid Islamic Center* Kota Tarakan.

Guna akselerasi peningkatan kapasitas pelaku usaha dan literasi masyarakat, agenda *Forum* menghadirkan serangkaian program edukasi dan sertifikasi yang terukur. Pertama, sebagai dukungan terhadap program Wajib Halal Oktober (WHO) 2026, dilaksanakan Pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH) kepada 120 UMKM di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan. Kedua, guna memperkuat hulu



Gambar 1. Kegiatan Bazaar UMKM Halal Road to Kashafa 2026

BOKS 3

industri halal, diselenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Juru Sembelih Halal (JULEHA) Berbasis SKKNI pada 6-8 April 2026 yang bersinergi dengan BNSP, MUI, dan instansi terkait untuk mencetak praktisi yang mampu menjamin standar kelayakan syariah serta keamanan pangan (ASUH). Ketiga, edukasi publik berupa Kajian Inspiratif di Tarakan Art Convention Center (TACC) bersama Ustadz Hanan Attaki yang pendaftarannya diintegrasikan penuh dengan transaksi QRIS untuk mengakselerasi user experience pembayaran digital.

Sementara itu, agenda *Competition* diselenggarakan sebagai wadah penjangkaran talenta muda sekaligus sarana strategis menggaungkan nilai-nilai eksyar. Berbagai perlombaan digelar mencakup lomba dai cilik, adzan, nasyid, cerdas cermat Islami, festival bedug sahur, festival musik jalanan, hingga *fashion show* anak. Tahapan pada *Road to KASHAFA* ini ditujukan untuk menyeleksi Top 5 peserta terbaik dari tiap kategori, yang selanjutnya akan dipertandingkan kembali pada grand final di Puncak KASHAFA 2026.

Penyelenggaraan *Road to KASHAFA 2026* mencetak *output* dan *outcome* yang sangat positif. Dari sisi keterlibatan pelaku usaha, kegiatan ini berhasil memfasilitasi 42 UMKM di area bazaar dan memberikan pelatihan jaminan halal bagi 120 UMKM dengan target penerbitan sertifikat pada akhir triwulan II 2026. Selama 15 hari penyelenggaraannya, aktivitas *showcase offline* sukses mencatatkan *outcome* akumulasi transaksi menembus angka Rp100 juta. Angka ini menjadi milestone krusial untuk mengejar target total transaksi UMKM sebesar Rp3 miliar pada Puncak KASHAFA 2026 nanti (meningkat dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,60 miliar). Sebagai bentuk pendorong digitalisasi sistem pembayaran, Bank Indonesia juga memberikan apresiasi khusus bagi Top 5 *tenant* dengan frekuensi penggunaan QRIS tertinggi, yang diharapkan semakin memperkokoh ekosistem ekonomi syariah dan digitalisasi inklusif di Kalimantan Utara.



Gambar 2. Kegiatan Pelatihan & Sertifikasi Juru Sembelih Halal dan Sistem Jaminan Produk Halal



Gambar 3. Kegiatan Perlombaan Selama *Road to Kashafa 2026*





Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

➤ Penyelenggaraan sistem pembayaran tunai maupun nontunai melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) pada Triwulan I 2026 menunjukkan kinerja yang relatif terjaga. Transaksi SKNBI mengalami kontraksi baik dari sisi nominal maupun volume, sejalan pergeseran preferensi masyarakat dan pelaku usaha ke instrumen pembayaran digital yang lebih cepat dan efisien. Sementara itu, transaksi BI-RTGS tetap mencatat pertumbuhan positif baik dari sisi nominal maupun volume, mencerminkan masih kuatnya aktivitas transaksi bernilai besar. Dari sisi pengelolaan uang Rupiah, aliran uang kartal mencatatkan net inflow seiring meningkatnya setoran uang kartal pasca periode kebutuhan uang tunai akhir tahun. Distribusi Uang Layak Edar (ULE) tetap didominasi oleh pecahan besar, sementara proses penarikan dan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) terus dilakukan sebagai bagian dari implementasi Clean Money Policy (CMP), yang disertai edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah kepada masyarakat. Pada sisi digitalisasi sistem pembayaran, jumlah pengguna dan merchant QRIS terus meningkat dengan dominasi pada segmen Usaha Mikro dan penyebaran yang semakin luas di seluruh wilayah Kalimantan Utara. Selain itu, kinerja Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tetap solid, tercermin dari seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Utara yang masih berada pada tahap Digital.

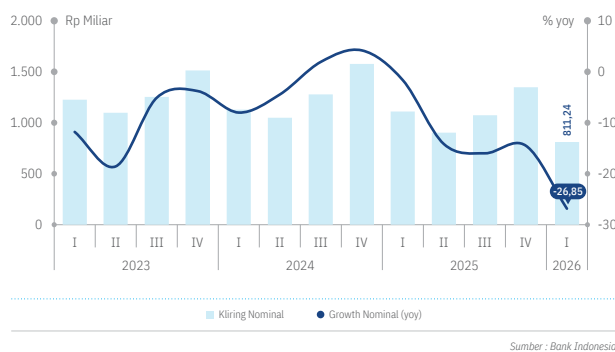
4.1 Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Non Tunai

Volume transaksi SKNBI di Kalimantan Utara pada triwulan I 2026 tercatat mengalami kontraksi sebesar -27,43% (yoy), menurun dari 19.434 transaksi pada triwulan I 2025 menjadi 14.104 transaksi. Selain mengalami perlambatan secara tahunan, secara triwulanan volume transaksi juga menurun sebesar 48,57% (qtq) dari 27.425 transaksi pada triwulan IV 2025 menjadi 14.104 transaksi pada triwulan I 2026 (Grafik IV.2).

Sementara itu, nominal transaksi SKNBI pada triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp811,24 miliar, atau terkontraksi sebesar 26,85% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan tersebut lebih dalam dibandingkan triwulan IV 2025 yang mengalami kontraksi sebesar 4,50% (yoy). Secara triwulanan, nominal transaksi juga menurun dibandingkan triwulan IV 2025 yang mencapai Rp1,35 triliun (Grafik VI.1). Perlambatan tersebut sejalan dengan berlanjutnya pergeseran preferensi masyarakat dan pelaku usaha ke instrumen pembayaran digital yang lebih cepat dan efisien, seperti khususnya melalui BI-FAST dan kanal transfer perbankan berbasis digital, sehingga penggunaan layanan transfer berbasis kliring melalui SKNBI relatif menurun.

Pada triwulan I 2026, transaksi BI-RTGS di Provinsi Kalimantan Utara masih menunjukkan pertumbuhan positif baik dari sisi nominal maupun volume. Nominal transaksi tercatat sebesar

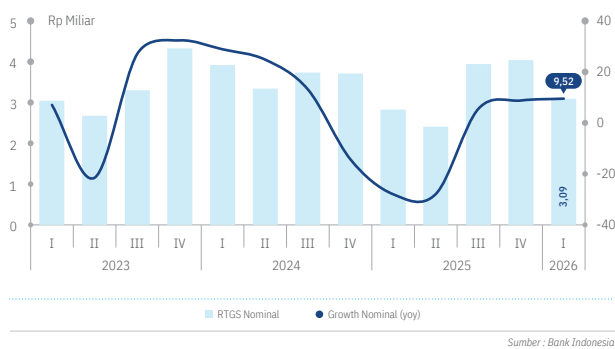
Grafik IV.1. Perkembangan Nominal Transaksi Kliring Kaltara



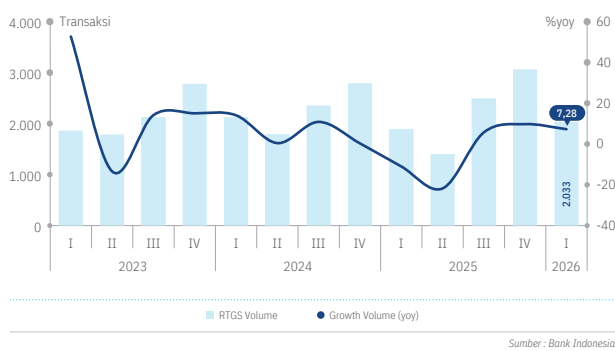
Grafik IV.2. Perkembangan Volume Transaksi Kliring Kaltara



Grafik IV.3. Perkembangan Nominal BI-RTGS Kaltara



Grafik IV.4. Perkembangan Volume BI-RTGS Kaltara



Rp3,09 triliun, tumbuh 9,52% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sejalan dengan itu, volume transaksi juga meningkat menjadi 2.033 transaksi atau tumbuh 7,28% (yoy). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas transaksi bernilai besar melalui BI-RTGS mengalami peningkatan, terutama untuk memenuhi kebutuhan transaksi korporasi, rumah tangga, dan pemerintah yang memerlukan penyelesaian (*settlement*) secara *real time* dan bernilai besar.

4.2 Pengelolaan Uang Rupiah

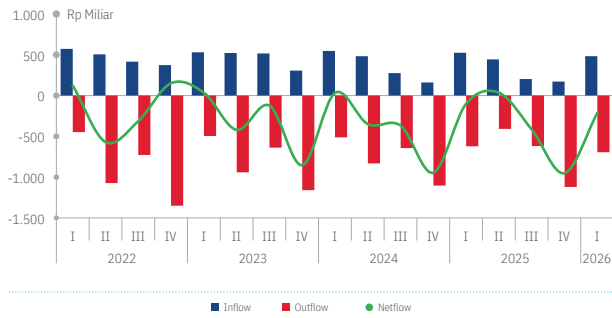
Aliran Uang Masuk/Keluar (*Outflow/Inflow*)

Transaksi perkasan Bank Indonesia pada triwulan I 2026 tercatat net outflow sebesar Rp212.985 miliar. Perkembangan ini sama dengan kondisi triwulan sebelumnya yang mengalami *net outflow*. *Net outflow* tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan uang kartal di masyarakat.

Uang Pecahan Besar (UPB) yaitu pecahan Rp100.000 dan Rp50.000, menjadi denominasi yang paling dominan dalam aliran uang kartal di KPwBI Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan I 2026, baik dari sisi outflow maupun *inflow*.

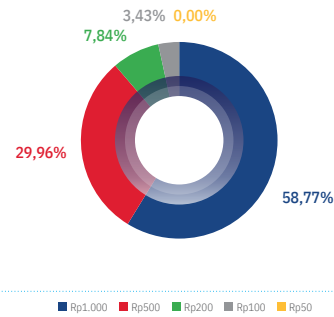
Dari sisi *outflow* uang kertas pada triwulan I 2026, pecahan Rp100.000 kembali menjadi pecahan dengan distribusi terbesar, mencapai Rp432,17 miliar. Pecahan Rp50.000 juga mencatat kontribusi signifikan dengan nilai Rp228,83 miliar, diikuti pecahan Rp20.000 sebesar Rp13,40 miliar dan

Grafik IV.5. Perkembangan Aliran Uang Keluar/Masuk



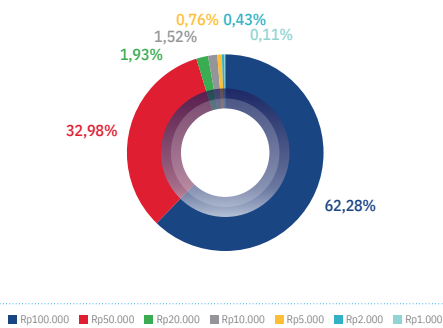
Sumber Bank Indonesia

Grafik IV.7. Denominasi Outflow Uang Logam Kaltara Triwulan I 2026



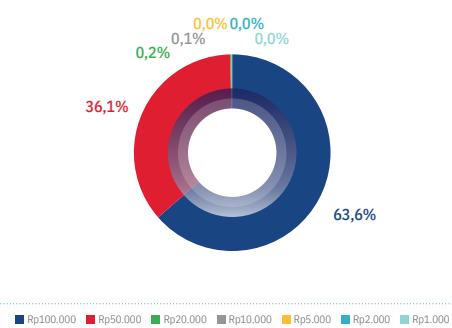
Sumber Bank Indonesia

Grafik IV.6. Denominasi Outflow Uang Kartal Kaltara Triwulan I 2026



Sumber Bank Indonesia

Grafik IV.8. Denominasi Inflow Uang Kartal Kaltara Triwulan I 2026



Sumber Bank Indonesia

Rp10.000 sebesar Rp10,53 miliar. Sementara itu, pecahan Rp5.000, Rp2.000, dan Rp1.000 masing-masing berkontribusi relatif kecil terhadap total *outflow* uang kertas. Dengan demikian, distribusi uang kartal masih didominasi oleh pecahan besar yang umumnya digunakan untuk kebutuhan transaksi bernilai tinggi.

Dari sisi inflow, pecahan besar juga masih mendominasi. Pecahan Rp100.000 tercatat dengan nilai Rp359,42 miliar, diikuti pecahan Rp50.000 sebesar Rp204,05 miliar. Pecahan lainnya, yaitu Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, dan Rp1.000, memberikan kontribusi yang jauh lebih kecil terhadap total *inflow* uang kertas pada triwulan I 2026 (Grafik IV.8).

Khusus untuk uang logam (UL), pecahan Rp1.000 tetap mendominasi arus *outflow* dengan nilai Rp120 juta. *Outflow* pecahan Rp500 tercatat sebesar Rp61 juta, diikuti pecahan Rp200 sebesar Rp16 juta dan Rp100 sebesar Rp7 juta, sementara pecahan Rp50 tidak mencatat *outflow* pada periode ini. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan uang logam di masyarakat masih terkonsentrasi pada pecahan terbesar (Grafik IV.7).

Penyediaan Uang Rupiah Layak Edar (ULE)

Dalam rangka mengendalikan peredaran uang kartal serta memastikan uang yang beredar di masyarakat berada dalam kondisi baik dan cukup, KPwBI Provinsi Kaltara terus melakukan

penyediaan Uang Layak Edar (ULE) melalui perbankan di seluruh Provinsi Kalimantan utara. Selain itu, KPwBI Kaltara juga melakukan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) dari masyarakat. Beberapa kegiatan pendukung Penyediaan Uang Rupiah Layak Edar di antaranya melalui kegiatan Kas Keliling dan Kas Titipan yang tersebar hampir di seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Utara.

Kas Keliling

Salah satu layanan kas luar kantor yang dilakukan oleh KPwBI Kaltara adalah Kas Keliling yaitu kegiatan penukaran uang oleh unit kerja operasional kas kepada masyarakat, bank, atau pihak lain dengan menggunakan sarana angkutan. Kas keliling dibagi menjadi 2 (dua) layanan yaitu kas keliling dalam kota dan kas keliling luar kota. Kas keliling dalam kota merupakan kegiatan layanan kas luar kantor untuk melayani penukaran kepada masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi oleh bank umum.

Kas Keliling Dalam Kota (KKDK)

Kegiatan Kas Keliling Dalam Kota (KKDK) di Kota Tarakan sepanjang triwulan I 2026 di sebaran titik lokasi empat wilayah kecamatan utama. Wilayah kegiatan KKDK mencakup Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Timur, Tarakan Tengah, dan Tarakan Utara.

Kas Keliling Luar Kota (KKLK)

Layanan kas keliling turut juga dilakukan di luar kota dengan tujuan menjangkau masyarakat Provinsi Kaltara yang berada di luar wilayah Kota Tarakan seperti wilayah Kecamatan Sebatik dan Seimenggaris.

Kas Titipan

KPwBI Provinsi Kaltara memiliki 3 (tiga) Kas Titipan yang berlokasi di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Pengelolaan kas titipan (Kastip) tersebut dilakukan oleh kantor cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Kalimantan Utara (BPD Kaltimara). Untuk Kastip di Tanjung Selor, BPD Kaltimara cabang Tanjung Selor bekerjasama dengan 6 (enam) bank peserta lainnya (Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Syariah Indonesia, dan Bank Danamon) mengedarkan Uang Layak Edar (ULE) hingga daerah terpencil. Sementara itu, untuk Kastip di Kab. Malinau, BPD Kaltimara cabang Malinau mengelola kas titipan Bank Indonesia bersama dengan 3 (tiga) bank peserta yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Negara Indonesia. Untuk Kastip di Kab. Nunukan, BPD Kaltimara cabang Nunukan bekerja sama dengan 4 (empat) bank peserta mengelola kas titipan Bank Indonesia yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia dan Bank Syariah Indonesia.

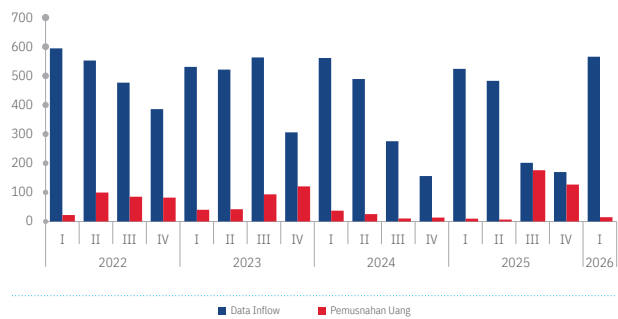
Selama triwulan I 2026, KPwBI Provinsi Kaltara telah melakukan kegiatan dropping ke Kas Titipan Bank Indonesia pada tiga wilayah, yaitu Tanjung Selor, Malinau, dan Nunukan, dengan total nominal sebesar Rp193,42 miliar, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp435,58 miliar.

Penarikan Uang Tidak Layak Edar dan Pemusnahan Uang Rupiah

Selain memenuhi kebutuhan penukaran Uang Layak Edar (ULE), uang yang ditukarkan oleh masyarakat di KPwBI Provinsi Kalimantan Utara juga mencakup Uang Tidak Layak Edar (UTLE), meliputi uang rusak, lusuh, cacat, serta uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran. Dalam rangka menjaga kualitas uang beredar (*clean money policy*), KPwBI Provinsi Kaltara secara rutin melakukan pemusnahan UTLE yang diterima dari perbankan maupun masyarakat umum melalui layanan penukaran dan kas keliling.

Pada triwulan I 2026, nilai UTLE yang dimusnahkan tercatat sebesar Rp14,52 miliar, menurun signifikan dibandingkan triwulan IV 2025 yang sebesar Rp127,01 miliar (qtr). Penurunan tersebut sejalan dengan berkurangnya *inflow* UTLE pada periode yang sama, di mana nilai *inflow* menurun dari Rp169,74 miliar pada triwulan IV 2025 menjadi Rp565,36 miliar pada triwulan I 2026, dengan rasio pemusnahan terhadap *inflow* tercatat sebesar 2,57%.

Grafik IV.9. Penyediaan Uang Rupiah Layak Edar (ULE)



Sumber Bank Indonesia

Rasio pemusnahan UTLE terhadap inflow pada triwulan I 2026 berada jauh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 74,83%. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar uang tidak layak edar yang diterima pada periode ini masih berada dalam proses sortir dan pengolahan. Melalui proses penarikan dan pemusnahan UTLE yang dilakukan secara berkelanjutan, Bank Indonesia terus menjaga kualitas uang kartal yang beredar agar masyarakat tetap memperoleh uang Rupiah yang layak edar untuk mendukung kelancaran transaksi tunai.

Temuan Uang Palsu (UPAL)

Selama periode triwulan I 2026, terdapat temuan Uang Palsu (UPAL) pada pecahan Rp100.000 dan Rp50.000. Upaya tersebut juga ditopang melalui peningkatan edukasi CBP Rupiah kepada masyarakat serta penguatan kerja sama dengan perbankan, Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal), perangkat masyarakat di daerah, dan stakeholders terkait lainnya.

Cinta, Bangga, Paham Rupiah

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap rupiah, KPwBI Provinsi Kaltara senantiasa melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan yang terdiri dari lembaga pendidikan, komunitas, perangkat kecamatan/kelurahan/desa dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait ciri-ciri keaslian Uang Rupiah dengan slogan Cinta, Bangga, Paham Rupiah. KPwBI Provinsi Kaltara telah melaksanakan berbagai sosialisasi dan edukasi mengenai CBP Rupiah kepada berbagai lapisan masyarakat yang terdiri dari sektor pendidikan, sektor masyarakat, hingga sektor komunitas strategis. Melalui berbagai kegiatan tersebut diharapkan pengetahuan mengenai CBP Rupiah, mulai dari pengenalan ciri keaslian Rupiah hingga mekanisme penukaran uang rusak dapat semakin dipahami oleh masyarakat.

4.3 Perkembangan QRIS

Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai salah satu kanal pembayaran non tunai di wilayah Kalimantan Utara terus menunjukkan peningkatan seiring dengan perluasan ekosistem dan edukasi transaksi digital. Hingga triwulan I 2026, jumlah penduduk Kaltara yang telah menggunakan QRIS mencapai 137.513 pengguna, meningkat dari 131.252 pengguna pada triwulan IV 2025 atau bertambah sebanyak 6.261 pengguna atau 4,77% (qtq). Peningkatan ini mencerminkan semakin besarnya ketertarikan masyarakat dalam memanfaatkan QRIS sebagai kanal pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal untuk mendukung berbagai aktivitas transaksi sehari-hari.

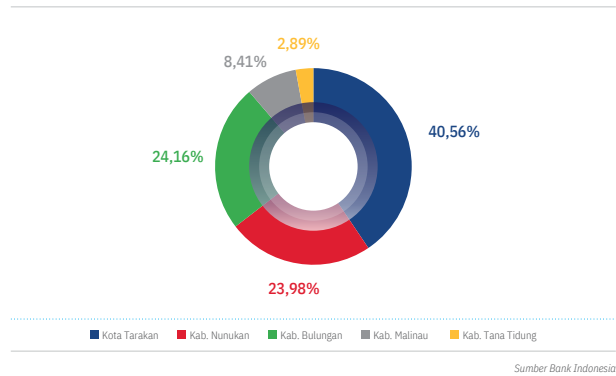
Dalam rangka memperluas penggunaan QRIS secara merata, KPwBI Kaltara melakukan upaya perluasan edukasi penggunaan QRIS ke berbagai lapisan masyarakat melalui berbagai program maupun kolaborasi kegiatan dengan stakeholders lainnya.

Peningkatan jumlah pengguna QRIS di wilayah Kaltara diikuti oleh perkembangan jumlah *merchant* QRIS yang tercermin pada kenaikan *National Merchant Repository* (NMR) pada triwulan I 2026. Hingga Maret 2026, jumlah *merchant* QRIS di Kaltara tercatat sebanyak 116.472 *merchant*, dengan total penambahan 3.646 *merchant* sejak awal tahun, menunjukkan masih berlanjutnya perluasan akseptasi QRIS di berbagai sektor usaha.

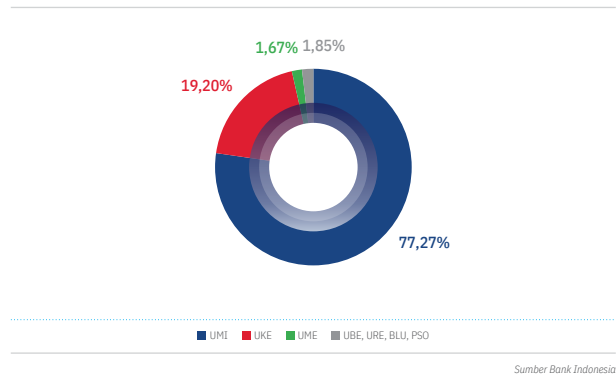
Distribusi *merchant* QRIS di Kalimantan Utara pada triwulan I 2026 masih terpusat di Kota Tarakan dengan jumlah *merchant* sebesar 47.239 atau 40,56% dari total *merchant*. Kabupaten Bulungan dan Nunukan menyusul dengan pangsa masing-masing sebesar 24,16% dan 23,98%, mencerminkan konsentrasi aktivitas ekonomi dan perdagangan di wilayah tersebut.

Sementara itu, Kabupaten Malinau dan Tana Tidung mencatat pangsa yang lebih kecil, masing-masing sebesar 8,41% dan 2,89%. Meskipun kontribusinya relatif lebih rendah, kedua kabupaten tersebut tetap menunjukkan penambahan *merchant*

Grafik IV.10. Kontribusi *Merchant* QRIS berdasarkan wilayah di Provinsi Kalimantan Utara



Grafik IV.11. Kontribusi *Merchant* QRIS berdasarkan Kategori di Provinsi Kalimantan Utara



sepanjang triwulan I 2026, sejalan dengan upaya KPwBI Kaltara dalam memperluas akseptasi pembayaran digital hingga ke wilayah perbatasan dan pedesaan.

Selain itu, *merchant* QRIS kategori Usaha Mikro (UMI) masih mendominasi dengan pangsa sebesar 77,27%. Adapun *merchant* kategori Usaha Kecil (UKE) berkontribusi sebesar 19,20%, diikuti kategori Usaha Menengah (UME) sebesar 1,67% serta kategori lainnya (UBE, URE, BLU, dan PSO) sebesar 1,85%. Komposisi ini menunjukkan bahwa QRIS berperan penting dalam mendukung digitalisasi transaksi pada segmen usaha mikro dan kecil di Kalimantan Utara.

Tabel IV.1. Perkembangan NMR Provinsi Kaltara

Wilayah	NMR Selama 2023 (Jan-Des 2023)	NMR Selama 2024 (Jan-Des 2024)*	NMR Kumulatif 2025 (Jan-Des 2025)	NMR Kumulatif (Jan-Mar 2026)	NMR Kumulatif 2019-2026*	Share Prov (Per 2026*)
Kota Tarakan	8.668	7.666	1.423	2.169	47.239	40,56%
Kab. Nunukan	6.289	3.634	5.614	-85	27.932	23,98%
Kab. Bulungan	6.465	4.362	7.338	1.003	28.139	24,16%
Kab. Malinau	2.585	1.079	2.324	261	9.793	8,41%
Kab. Tana Tidung	500	512	758	298	3.369	2,89%
Total Prov. Kaltara	24.507	17.253	17.457	3.646	116.472	100,00%

Sumber : Bank Indonesia

4.4 Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Provinsi Kalimantan Utara

Perluasan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) merupakan salah satu program yang bertujuan untuk mendorong penggunaan transaksi elektronik di lingkungan pemerintah daerah. Menindaklanjuti Nota Kesepahaman tersebut, melalui Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD), Presiden mewajibkan Pemda untuk membentuk TP2DD. Tim ini merupakan forum koordinasi untuk mengakselerasi perluasan ETPD, baik di sisi pendapatan maupun belanja daerah.

Berdasarkan data Indeks ETPD Semester II Tahun 2025, seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Utara kembali menunjukkan kinerja yang solid dalam percepatan transformasi digital (Tabel IV.2). Seluruh pemerintah daerah mencatat skor pada rentang 93,3% hingga 97,8%, dan seluruhnya telah berada pada tahap Digital. Capaian ini mencerminkan komitmen konsisten dari Pemerintah Daerah di Kalimantan Utara dalam memperluas dan meningkatkan implementasi ETPD di daerah, sekaligus kesinambungan kinerja dibandingkan periode sebelumnya.

Tabel IV.2. Perkembangan Indeks ETPD Provinsi Kalimantan Utara

Pemerintah Daerah	SM-I 2025		SM-II 2025	
	Skor	Tahap	Skor	Tahap
Provinsi Kalimantan Utara	97,80%	Digital	97,80%	Digital
Kota Tarakan	95,80%	Digital	95,50%	Digital
Kabupaten Bulungan	95,00%	Digital	93,50%	Digital
Kabupaten Malinau	93,30%	Digital	94,40%	Digital
Kabupaten Nunukan	83,60%	Digital	94,30%	Digital
Kabupaten Tana Tidung	94,80%	Digital	93,30%	Digital

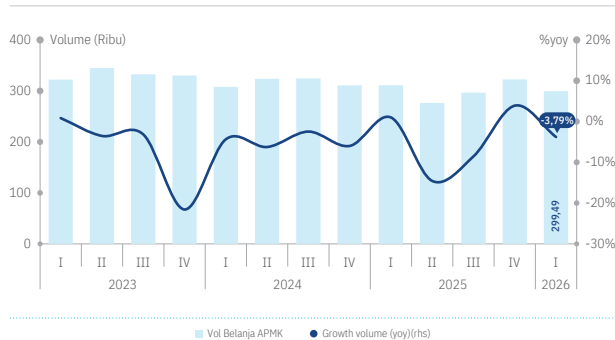
Sumber: Bank Indonesia

4.5 Perkembangan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

Penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) di Kalimantan Utara pada triwulan I 2026 menunjukkan penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Volume transaksi APMK tercatat sebesar 299,49 ribu transaksi atau turun sebesar 3,79% (yoy) dibandingkan triwulan I 2025 (Grafik IV.13).

Penurunan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan instrumen berbasis kartu mulai mengalami pergeseran seiring semakin berkembangnya preferensi masyarakat terhadap instrumen pembayaran digital nonkartu seperti mobile banking, dompet elektronik, dan QRIS yang semakin dominan dalam ekosistem pembayaran ritel.

Grafik IV.12. Perkembangan APMK



Sumber: Bank Indonesia

BOKS 4.1

Ramadhan SIAP QRIS Tahun 1447 H

Dalam menyemarakkan bulan suci Ramadhan, KPwBI Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan program kampanye “Ramadhan SIAP QRIS Tahun 1447 H” dengan menghadirkan kajian dan buka puasa bersama Ustadz Hanan Attaki, Lc. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan literasi dan akseptasi digital di masyarakat, melalui pendekatan edukatif dan keagamaan, sekaligus mendorong perluasan penggunaan transaksi non-tunai melalui QRIS serta memperkuat pemahaman masyarakat mengenai program Pelindungan Konsumen Bank Indonesia. Program Ramadhan SIAP QRIS tahun 1447 H juga merupakan bagian dari rangkaian *Road to Kaltara Sharia Festival 2026 dalam rangka meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah di Kalimantan Utara*.

Sekitar 4.000 jamaah yang menghadiri kajian mendapatkan tiket dengan melakukan donasi dengan QRIS sebagai bentuk implementasi kampanye Ramadhan SIAP QRIS sekaligus edukasi dan *live experience* transaksi pembayaran digital. Dari pembayaran tiket menggunakan QRIS tersebut, telah

terkumpul infaq dan sedekah sejumlah Rp.50.680.236,00 (lima puluh juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) yang disalurkan kepada anak yatim, fakir miskin, sektor pendidikan, operasional masjid, dan wakaf produktif. Selain mendorong pemanfaatan QRIS sebagai kanal pembayaran digital, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk memperkuat literasi masyarakat mengenai pentingnya bertransaksi secara bijak dan aman di tengah perkembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang semakin pesat.

Ustadz Hanan Attaki, Lc menyampaikan bahwa perkembangan era digital juga berpotensi menimbulkan tekanan dan distraksi yang membuat masyarakat kehilangan ruang untuk refleksi diri. Dalam konteks tersebut, bulan Ramadhan menjadi momentum untuk berhenti sejenak, melakukan muhasabah, serta memperbaiki kualitas diri dan hubungan dengan sesama. Sejalan dengan pesan tersebut, kegiatan kajian juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sikap bijak dan kehati-



Gambar Boks IV.1.2 Foto saat Kegiatan Kajian dan Buka Besama dengan Ustadz Hanan Attaki



Gambar Boks IV.1.2 Foto saat Kegiatan Layanan Penukaran, Edukasi, dan Layanan Kesehatan

BOKS 4.1

hatian dalam beraktivitas di era digital, selaras dengan *tagline* Pelindungan Konsumen Bank Indonesia, yaitu “Kalau Ragu, Stop Dulu”. Masyarakat diharapkan dapat lebih cermat dalam menyikapi berbagai informasi, transaksi, dan aktivitas digital guna menghindari risiko penipuan, kejahatan siber, maupun penyalahgunaan layanan keuangan digital.

Melalui penyelenggaraan Ramadhan SIAP QRIS Tahun 1447 H, KPwBI Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan bahwa digitalisasi Sistem Pembayaran dapat diakselerasi melalui pendekatan yang dekat dengan masyarakat, termasuk melalui kegiatan keagamaan dan sosial. Integrasi antara edukasi, inklusi keuangan, dan pemanfaatan QRIS dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat terhadap manfaat transaksi digital sekaligus mendukung pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Kalimantan Utara.

BOKS 4.2

Ekspedisi Rupiah Kalimantan 2026

Sungai di Kalimantan memiliki kekhasan geografis yang tidak sekadar berfungsi sebagai jalur transportasi, melainkan berperan vital sebagai urat nadi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Dalam rangka menjaga kedaulatan negara, Bank Indonesia memiliki mandat krusial untuk memastikan ketersediaan serta kualitas uang Rupiah hingga ke wilayah perairan dan pelosok sungai. Sebagai respons atas kebutuhan tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Selatan menggagas program Ekspedisi Rupiah Kalimantan (ERK). Program ini dilaksanakan secara serentak pada tanggal 27–30 April 2026 oleh seluruh KPwBI di wilayah Kalimantan, yang bersinergi erat dengan jajaran Pangkalan TNI Angkatan Laut se-Kalimantan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan distribusi Uang Layak Edar (ULE) dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di wilayah perairan guna mendukung kelancaran aktivitas ekonomi.

Pelaksanaan kick-off ERK untuk Provinsi Kalimantan Utara diselenggarakan pada tanggal 27 April 2026 berlokasi di Markas Satuan Kapal Patroli (SATROL) Kodaeral XIII. Acara peresmian ini dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan strategis, meliputi Wakil Komandan Kodaeral XIII, Kepala Perwakilan KPwBI Provinsi Kalimantan Utara, pimpinan perbankan BPD Kaltimara, serta perwakilan Dinas Pendidikan Cabang Provinsi Kalimantan Utara. Pelaksanaan *kick-off* ini dilakukan secara estafet (*relay*) dari acara seremonial utama di KPwBI Provinsi Kalimantan Selatan

yang dihadiri langsung oleh Komandan Kodaeral XIII. Pembukaan kegiatan ditandai secara simbolis melalui penyematan topi ERK kepada Tim *Onboard*, yang merefleksikan soliditas koordinasi kelembagaan. Implementasi kegiatan ERK di Kalimantan Utara didukung penuh oleh Kodaeral XIII melalui pengerahan Kapal PATKAMLA NAYAKA-07. Ekspedisi berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 27 hingga 29 April 2026, dengan menysasar masyarakat susur Sungai Kayan Tanjung Palas di Desa Gunung Putih dan Desa Salimbatu.

Di samping penyediaan ULE untuk masyarakat, program ERK juga dilengkapi dengan perluasan edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah serta program "BI Mengajar". Selain dari sisi uang tunai, edukasi ini turut mencakup edukasi non-tunai dengan perluasan sistem pembayaran digital QRIS, dan juga PeKA (Peduli, Kenali, Adukan) untuk perlindungan konsumen sebagai mitigasi risiko untuk melindungi masyarakat dari kejahatan digital. Selain edukasi, terdapat juga Layanan Kesehatan Masyarakat Sebagai bentuk nyata sinergi sosial, dari Kodaeral XIII bersama Puskesmas Desa Salimbatu menggelar penyuluhan kesehatan mengenai pola hidup sehat dan pencegahan penyakit. Kegiatan ini dibarengi dengan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat dan kelompok lansia yang mencakup pengecekan tekanan darah, kolesterol, dan gula darah, serta penyediaan obat-obatan secara cuma-cuma bagi warga yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Gambar Boks IV.2.1 Foto Bersama *Kick-Off* Ekspedisi Rupiah Kalimantan

BOKS 4.1

Program Ekspedisi Rupiah Kalimantan di wilayah Kalimantan Utara telah terbukti mampu memberikan dampak yang holistik bagi masyarakat pesisir dan susur sungai. Melalui distribusi uang Rupiah yang dikelola secara optimal serta perluasan literasi keuangan dan layanan sosial, Bank Indonesia memastikan bahwa kedaulatan ekonomi serta kesejahteraan sosial dapat terdistribusi secara merata, menjangkau seluruh pelosok negeri.





Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan



Perkembangan ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Kalimantan Utara pada triwulan IV 2025 tetap menunjukkan kondisi yang terjaga. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 tercatat sebesar 3,85%, menurun dibandingkan 3,90% pada Agustus 2024. Penurunan ini mengindikasikan perbaikan berkelanjutan di pasar tenaga kerja, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk bekerja serta membaiknya serapan tenaga kerja pada berbagai lapangan usaha. Kualitas hidup masyarakat juga terus meningkat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Utara pada tahun 2025 tercatat sebesar 74,04, meningkat dibandingkan 73,41 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak masyarakat. Sementara itu, tingkat ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan. Gini Ratio Kalimantan Utara pada September 2025 tercatat sebesar 0,251, menurun dibandingkan 0,261 pada Maret 2025. Penurunan ini didukung oleh membaiknya distribusi pengeluaran masyarakat, tercermin dari meningkatnya porsi pengeluaran kelompok 40% terbawah menjadi 24,89%, yang menunjukkan ketimpangan tetap berada pada kategori rendah. Secara keseluruhan, kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Kalimantan Utara pada triwulan I 2026 tetap solid, ditopang oleh penurunan tingkat pengangguran, peningkatan kualitas pembangunan manusia, serta ketimpangan pendapatan yang relatif rendah dan semakin membaik.

5.1. Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia, persepsi responden di Kalimantan Utara terhadap kondisi pasar kerja pada triwulan I 2026 menunjukkan perbaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Indeks ketersediaan lapangan kerja enam bulan yang lalu tercatat sebesar 113,89, meningkat 6,92% (yoy) dibandingkan 106,52 pada triwulan I 2025 (Grafik V.1).

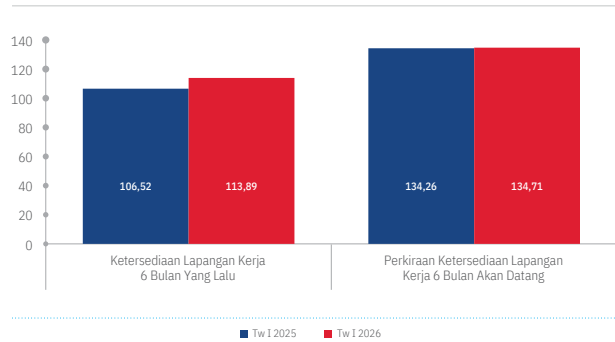
Sementara itu, ekspektasi masyarakat terhadap kondisi pasar kerja ke depan tetap berada pada level optimis. Indeks perkiraan ketersediaan lapangan kerja dalam enam bulan mendatang tercatat sebesar 134,71, sedikit lebih tinggi dibandingkan 134,26 pada periode yang sama tahun sebelumnya atau meningkat 0,34% (yoy). Indeks yang tetap berada di atas level 100 mengindikasikan bahwa masyarakat secara umum masih optimis terhadap prospek perbaikan kondisi pasar kerja dalam enam bulan ke depan (Grafik V.1).

Berdasarkan data BPS per Februari 2026, kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Utara relatif stabil dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah angkatan kerja meningkat sebesar 2.800 orang, dari 390.745 orang pada Februari 2025 menjadi 393.545 orang pada Februari 2026. Peningkatan tersebut diikuti oleh bertambahnya jumlah penduduk bekerja sebanyak 2.683 orang, dari 375.513 orang menjadi 378.196 orang.

Di sisi lain, jumlah pengangguran tercatat meningkat terbatas sebesar 117 orang, dari 15.232 orang pada Februari 2025 menjadi 15.349 orang pada Februari 2026. Sejalan dengan perkembangan tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat tetap berada pada level 3,90%, menunjukkan bahwa kondisi pasar tenaga kerja masih relatif terjaga di tengah peningkatan jumlah angkatan kerja.

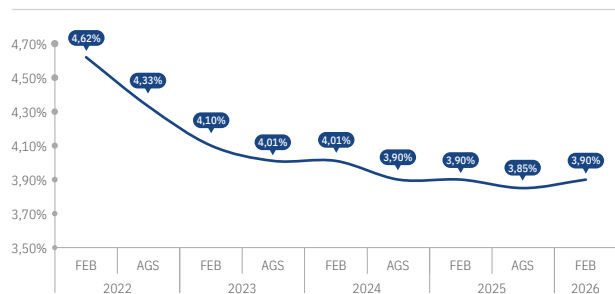
Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat menurun sebesar 0,56%, dari 69,19% pada Februari 2025 menjadi 68,63% pada Februari 2026. Penurunan tersebut

Grafik V.1. Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja



Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

Grafik V.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kaltara



Sumber: BPS, diolah

sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk bukan angkatan kerja sebanyak 5.874 orang atau tumbuh 3,38% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Tabel V.1).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Utara dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kondisi yang relatif terjaga. Pada Februari 2026, TPT tercatat sebesar 3,90%, sama dengan capaian Februari 2025. Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa kapasitas penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Utara masih cukup baik dalam menjaga stabilitas pasar tenaga kerja daerah (Grafik V.2).

Menurut lapangan usaha utama, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan

Tabel V.1. Angkatan Kerja dan Pengangguran Provinsi Kaltara

Kondisi Ketenagakerjaan	2025	2026	Pertumbuhan	
	FEB	FEB	Orang	%
Jumlah Penduduk 15+ (orang)	564.734	573.408	8.674	1,54
Jumlah Angkatan Kerja (orang)	390.745	393.545	2.800	0,72
Jumlah Bekerja (orang)	375.513	378.196	2.683	0,71
Jumlah Penganggur (orang)	15.232	15.349	117	0,77
Bukan Angkatan Kerja (orang)	173.989	179.863	5.874	3,38
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK, %)	69,19	68,63	-0,56	
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,90	3,90	0,00	

Sumber: BPS, diolah

Tabel V.2. Persentase Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha Provinsi Kaltara

Lapangan Pekerjaan Utama	Februari 2025		Growth (yoy)	Februari 2026		Growth (yoy)
	Jumlah	Pangsa		Jumlah	Pangsa	
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	136.264	36.29%	26.28%	139.293	36.83%	2.22%
Pertambangan dan Penggalian	8.713	2.32%	23.34%	14.749	3.90%	69.28%
Industri Pengolahan	21.769	5.80%	-20.37%	24.141	6.38%	10.90%
Penyediaan Listrik dan Gas	2.443	0.65%	1242.31%	1.038	0.27%	-57.51%
Penyediaan Air dan Pengelolaan Limbah	703	0.19%	11.59%	1.854	0.49%	163.73%
Konstruksi	17.982	4.79%	-21.95%	18.772	4.96%	4.39%
Perdagangan Besar dan Eceran	51.926	13.83%	-7.33%	47.476	12.55%	-8.57%
Transportasi dan Pergudangan	14.674	3.91%	17.91%	20.013	5.29%	36.38%
Akomodasi dan Makan Minum	19.461	5.18%	36.25%	24.847	6.57%	27.68%
Informasi dan Komunikasi	1.145	0.30%	-69.00%	2.003	0.53%	74.93%
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.386	0.64%	-54.14%	2.617	0.69%	9.68%
Jasa Real Estat	537	0.14%	-5.95%	3.902	1.03%	626.63%
Jasa Perusahaan	2.632	0.70%	-39.00%	5.861	1.55%	122.68%
Administrasi Pemerintahan	46.651	12.42%	10.53%	36.652	9.69%	-21.43%
Jasa Pendidikan	25.873	6.89%	49.14%	17.299	4.57%	-33.14%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13.340	3.55%	59.57%	6.102	1.61%	-54.26%
Jasa Lainnya	9.014	2.40%	-32.97%	11.577	3.06%	28.43%
Total	375.513	100.0%	9.14%	378.196	100.0%	0.71%

Sumber: BPS, diolah

tenaga kerja di Kalimantan Utara. Pada Februari 2026, sektor ini menyerap 139.293 orang atau 36,83% dari total tenaga kerja, meningkat 2,22% (yoy) dibandingkan Februari 2025 yang mencapai 136.264 orang atau 36,29% (Tabel V.2). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor primer masih menjadi penopang utama struktur ketenagakerjaan di Kalimantan Utara.

Selain itu, beberapa sektor mencatat pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi. Sektor Pertambangan dan Penggalian tumbuh signifikan sebesar 69,28% (yoy), sejalan dengan meningkatnya aktivitas sektor pertambangan dan hilirisasi mineral. Sektor Informasi dan Komunikasi juga mengalami pertumbuhan tinggi sebesar 74,93% (yoy), mencerminkan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja berbasis digital dan teknologi informasi. Pertumbuhan kuat turut terjadi pada sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 36,38% (yoy) serta sektor Akomodasi dan Makan Minum yang meningkat 27,68% (yoy), didukung oleh meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas perdagangan jasa. Sementara itu, sektor Jasa Real Estat dan Jasa Perusahaan masing-masing tumbuh sebesar 626,63% (yoy) dan 122,68% (yoy), meskipun dengan pangsa yang relatif kecil terhadap total tenaga kerja (Tabel V.2).

Di sisi lain, beberapa sektor mengalami kontraksi. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran turun sebesar 8,57% (yoy), sementara sektor Administrasi Pemerintahan terkontraksi

sebesar 21,43% (yoy). Penurunan yang lebih dalam terjadi pada sektor Jasa Pendidikan sebesar 33,14% (yoy) serta sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang turun 54,26% (yoy). Adapun sektor Penyediaan Listrik dan Gas mengalami kontraksi sebesar 57,51% (yoy), mencerminkan adanya penyesuaian kebutuhan tenaga kerja pada beberapa sektor jasa dan utilitas (Tabel V.2).

Berdasarkan status pekerjaan, penduduk bekerja di Provinsi Kalimantan Utara pada Februari 2026 masih didominasi oleh kelompok Buruh/Karyawan/Pegawai, yang mencapai 178.378 orang atau 47,17% dari total tenaga kerja. Jumlah tersebut meningkat sebesar 0,64% (yoy) dibandingkan Februari 2025 yang tercatat sebanyak 177.250 orang, mencerminkan masih terjaganya penyerapan tenaga kerja pada sektor formal (Tabel V.3).

Peningkatan cukup tinggi terjadi pada kelompok Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap, yang tumbuh sebesar 30,23% (yoy) menjadi 51.926 orang. Selain itu, kelompok Pekerja Bebas di Nonpertanian juga meningkat sebesar 39,31% (yoy) menjadi 8.842 orang, sementara kelompok Berusaha Dibantu Buruh Tetap tumbuh sebesar 4,55% (yoy) menjadi 17.040 orang.

Di sisi lain, beberapa kelompok pekerjaan mengalami penurunan. Kelompok Berusaha Sendiri turun sebesar 17,16% (yoy) menjadi 52.269 orang, sementara Pekerja Bebas di Pertanian menurun sebesar 12,96% (yoy) menjadi 16.572

Tabel V.3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan

Status Pekerjaan Utama	Februari 2025		Growth (yoy)	Februari 2026		Growth (yoy)
	Jumlah	Pangsa		Jumlah	Pangsa	
Berusaha sendiri	63.098	16.80%	-15.11%	52.269	13.82%	-17.16%
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	39.874	10.62%	10.29%	51.926	13.73%	30.23%
Berusaha dibantu buruh tetap	16.298	4.34%	12.84%	17.040	4.51%	4.55%
Buruh/karyawan/pegawai	177.250	47.20%	9.52%	178.378	47.17%	0.64%
Pekerja bebas di pertanian	19.040	5.07%	174.63%	16.572	4.38%	-12.96%
Pekerja bebas di nonpertanian	6.347	1.69%	23.10%	8.842	2.34%	39.31%
Pekerja keluarga/tak dibayar	53.606	14.28%	18.59%	53.169	14.06%	-0.82%
Total	375.513	100%	9.14%	378.196	100%	0.71%

Sumber: BPS, diolah

Tabel V.4. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Penduduk Yang Bekerja Menurut Pendidikan	Februari 2025		Growth (yoy)	Februari 2026		Growth (yoy)
	Jumlah	Pangsa		Jumlah	Pangsa	
SD ke Bawah	111.862	29.79%	0.91%	122.950	32.51%	9.91%
Sekolah Menengah Pertama	55.422	14.76%	13.98%	55.791	14.75%	0.67%
Sekolah Menengah Atas	97.519	25.97%	22.25%	91.906	24.30%	-5.76%
Sekolah Menengah Kejuruan	32.593	8.68%	7.51%	34.655	9.16%	6.33%
Perguruan Tinggi	78.117	20.80%	4.86%	72.894	19.27%	-6.69%
Total	375.513	100%	9.14%	378.196	100%	0.71%

Sumber: BPS, diolah

orang. Adapun kelompok Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar tercatat sedikit menurun sebesar 0,82% (yoy) menjadi 53.169 orang, mengindikasikan adanya pergeseran tenaga kerja menuju pekerjaan dengan pendapatan yang lebih stabil dan produktif (Tabel V.3).

Berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk bekerja di Provinsi Kalimantan Utara pada Februari 2026 masih didominasi oleh lulusan SD ke bawah, dengan jumlah 122.950 orang atau 32,51% dari total tenaga kerja. Jumlah tersebut meningkat sebesar 9,91% (yoy) dibandingkan Februari 2025, dan tetap menjadi kelompok dengan pangsa terbesar dalam struktur ketenagakerjaan daerah (Tabel V.4).

Peningkatan juga terjadi pada kelompok lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tumbuh sebesar 6,33% (yoy) menjadi 34.655 orang, dengan pangsa sebesar 9,16%. Selain itu, lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tercatat meningkat sebesar 0,67% (yoy) menjadi 55.791 orang, dengan pangsa sebesar 14,75% dari total tenaga kerja.

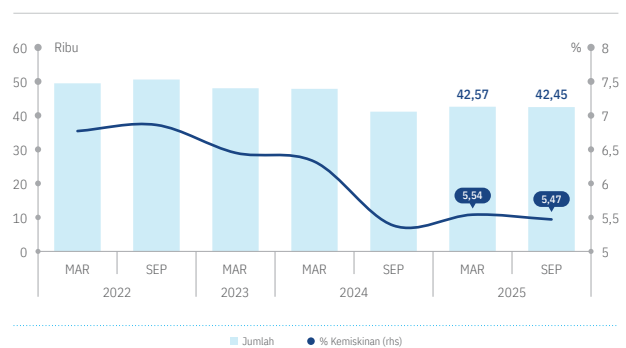
Di sisi lain, beberapa kelompok pendidikan mengalami penurunan. Kelompok lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) menurun sebesar 5,76% (yoy) menjadi 91.906 orang, meskipun masih memiliki pangsa yang cukup besar yaitu 24,30%. Penurunan juga terjadi pada lulusan Perguruan Tinggi yang turun sebesar 6,69% (yoy) menjadi 72.894 orang atau 19,27% dari total tenaga kerja (Tabel V.4).

5.2. Kesejahteraan

5.2.1. Kemiskinan

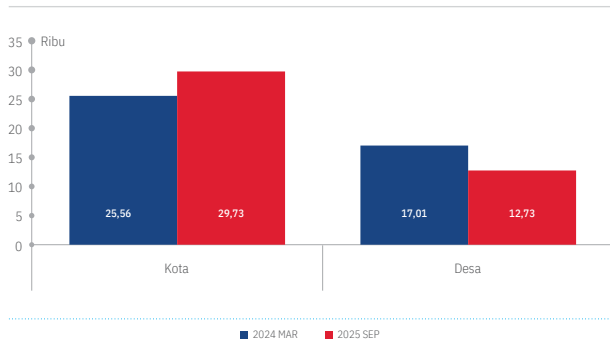
Berdasarkan data BPS per September 2025, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara tercatat sebesar 42,45 ribu jiwa atau 5,47% dari total penduduk. Angka ini menurun tipis dibandingkan kondisi Maret 2025 yang sebesar 42,57 ribu jiwa atau 5,54%, sehingga terjadi penurunan sebanyak 0,12 ribu jiwa secara absolut dan 0,07 persen poin secara persentase. Perkembangan ini menunjukkan perbaikan setelah peningkatan kemiskinan yang terjadi pada periode September 2024 hingga Maret 2025.

Secara spasial, perkembangan kemiskinan menunjukkan dinamika yang berbeda antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Di daerah perkotaan, jumlah penduduk miskin

Grafik V.3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kaltara periode 2022 – 2025

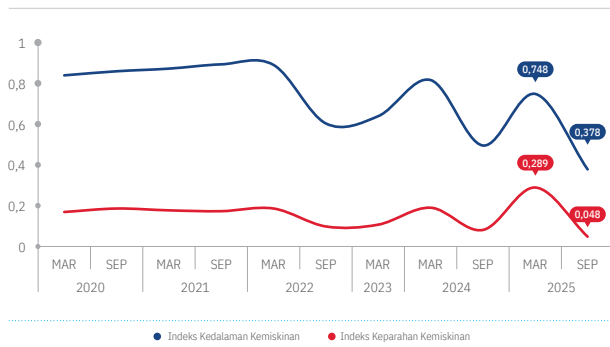
Sumber: BPS, diolah

Grafik V.4. Perkembangan Penduduk Miskin Kaltara di Perkotaan dan Desa periode 2024 dan 2025



Sumber: BPS, diolah

Grafik V.5. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Periode 2020-2025



Sumber: BPS, diolah

meningkat dari 25,56 ribu orang pada Maret 2025 menjadi 29,73 ribu orang pada September 2025. Sebaliknya, di daerah perdesaan jumlah penduduk miskin menurun dari 17,01 ribu orang menjadi 12,73 ribu orang. Dengan demikian, perbaikan tingkat kemiskinan secara agregat terutama ditopang oleh penurunan jumlah penduduk miskin di wilayah perdesaan, meskipun tekanan kemiskinan di wilayah perkotaan meningkat (Grafik V.4).

Struktur garis kemiskinan di Kalimantan Utara masih didominasi oleh komponen konsumsi makanan, dengan kontribusi yang cukup besar terhadap total pengeluaran minimum. Pada September 2025, pola komoditas penyumbang garis kemiskinan makanan menunjukkan perbedaan antara perkotaan dan perdesaan. Di perkotaan, lima komoditas utama penyumbang garis kemiskinan makanan adalah beras, rokok kretek/filter, telur ayam ras, daging ayam ras, dan bandeng. Di perdesaan, susunannya sedikit berbeda yaitu beras, rokok kretek/filter, telur ayam ras, daging ayam ras, dan gula pasir. Komoditas beras tetap menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi sebesar 24,26% di perkotaan dan 29,70% di perdesaan, menegaskan pentingnya stabilisasi harga pangan pokok, khususnya beras, sebagai bagian dari strategi pengendalian kemiskinan.

Sementara itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada September 2025 tercatat sebesar 0,378, mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi Maret 2025 yang sebesar 0,748. Penurunan ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Sejalan dengan itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan, dari 0,289 pada Maret 2025 menjadi 0,048 pada September 2025. Penurunan P2 ini mencerminkan bahwa ketimpangan di antara kelompok penduduk miskin semakin membaik, di mana beban kemiskinan tidak hanya menurun secara umum, tetapi juga semakin merata antar individu dalam kelompok miskin tersebut.

5.2.2 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Utara pada Maret 2026 tercatat sebesar 117,12, menurun sebesar 4,17% (yoy) dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 122,22. Penurunan NTP tersebut disebabkan oleh menurunnya Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 2,32% (yoy), dari 139,74 menjadi 136,50. Di sisi lain, Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) justru meningkat sebesar 1,92% (yoy), dari 114,34 menjadi 116,54, mencerminkan masih meningkatnya biaya konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi petani. Secara lebih rinci, Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) meningkat sebesar 1,48% (yoy), sementara Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) tumbuh sebesar 2,85% (yoy) (Tabel V.5).

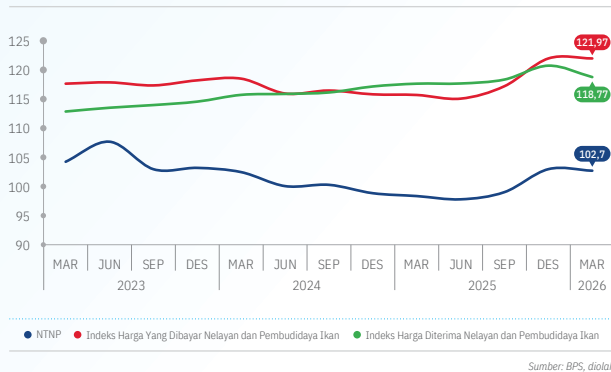
Secara sektoral, peningkatan indeks tertinggi terjadi pada subsektor perikanan yang tumbuh sebesar 4,42% (yoy). Selain itu, subsektor peternakan dan tanaman perkebunan rakyat juga mencatat pertumbuhan positif masing-masing sebesar 0,87% (yoy) dan 0,65% (yoy). Subsektor tanaman pangan dan hortikultura turut mengalami peningkatan terbatas masing-masing sebesar 0,29% (yoy) dan 0,22% (yoy). Meskipun

Tabel V.5. Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kaltara

Indeks	2025	2026	Growth (yoy)
	Maret	Maret	
Tanaman Pangan	102.49	102.79	0.29%
Hortikultura	102.97	103.2	0.22%
Tanaman Perkebunan Rakyat	199.29	200.58	0.65%
Peternakan	101.88	102.77	0.87%
Perikanan	98.35	102.7	4.42%
Gabungan			
NTP	122.22	117.12	-4.17%
Indeks Harga yg Diterima Petani (%)	139.74	136.5	-2.32%
Indeks Harga yg Dibayar Petani (%)	114.34	116.54	1.92%
a. Indeks Konsumsi RT	116.01	117.73	1.48%
b. Indeks BPPBM	108.21	111.29	2.85%

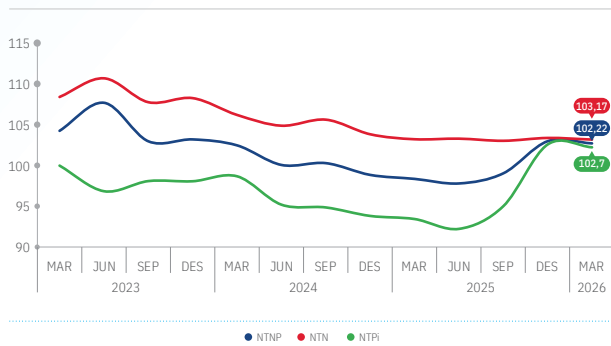
Sumber: BPS, diolah

Grafik V.6. NTNP, Indeks Harga yang Diterima dan Dibayar Nelayan dan Pembudidaya Ikan



Sumber: BPS, diolah

Grafik V.7. NTNP, NTN, dan NTPI



Sumber: BPS, diolah

sebagian besar subsektor mencatat pertumbuhan positif, penurunan NTP secara keseluruhan menunjukkan bahwa peningkatan harga yang diterima petani masih belum mampu mengimbangi kenaikan biaya yang dibayar petani (Tabel V.5).

Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP) di Provinsi Kalimantan Utara pada Maret 2026 tercatat sebesar 102,70, meningkat sebesar 4,42% (yoy) dibandingkan posisi Maret 2025 yang sebesar 98,35. Peningkatan NTNP tersebut mencerminkan membaiknya daya beli nelayan dan pembudidaya ikan, seiring dengan kenaikan harga hasil tangkapan dan komoditas budidaya yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan biaya konsumsi dan biaya produksi yang mereka tanggung.

Secara rinci, Indeks Harga yang Diterima Nelayan dan Pembudidaya Ikan (It) pada Maret 2026 tercatat sebesar 121,97, meningkat sebesar 5,42% (yoy) dibandingkan 115,70 pada Maret 2025. Di sisi lain, Indeks Harga yang Dibayar (Ib) juga mengalami peningkatan sebesar 0,96% (yoy), dari 117,64 menjadi 118,77. Dengan demikian, pertumbuhan It yang lebih tinggi dibandingkan Ib menjadi faktor utama peningkatan NTNP pada Maret 2026, mengindikasikan bahwa kenaikan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan relatif mampu mengimbangi tekanan biaya konsumsi dan produksi.

Dari sisi nelayan tangkap, Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada Maret 2026 tercatat sebesar 103,17 atau relatif stabil dengan kontraksi kecil sebesar 0,04% (yoy) dibandingkan posisi Maret 2025 yang sebesar 103,21. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kenaikan harga yang diterima nelayan tangkap relatif sejalan dengan peningkatan biaya yang mereka tanggung.

Sementara itu, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) berada pada level 102,22 atau meningkat sebesar 9,41% (yoy) dibandingkan 93,43 pada Maret 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan membaiknya daya beli pembudidaya ikan, seiring dengan perbaikan harga komoditas budidaya yang relatif lebih tinggi dibandingkan kenaikan biaya produksi dan konsumsi yang mereka tanggung (Grafik V.7).

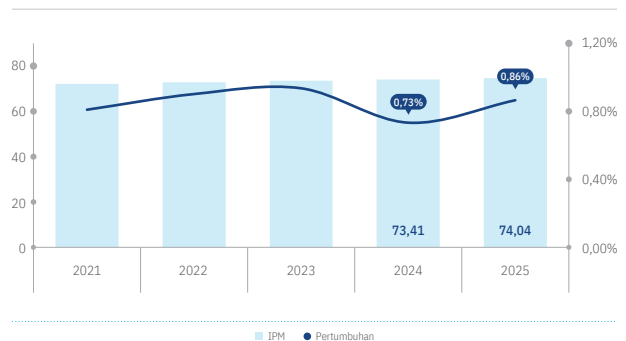
5.2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. IPM tercatat sebesar 71,57 pada 2021, meningkat menjadi 72,21 pada 2022, dan 72,88 pada 2023. Tren positif tersebut berlanjut pada 2024 dengan capaian 73,41, serta kembali meningkat pada 2025 menjadi 74,04, atau tumbuh 0,86% dibandingkan tahun sebelumnya (Grafik V.8). Peningkatan ini mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam kualitas hidup masyarakat di Kalimantan Utara.

Peningkatan IPM pada tahun 2025 didukung oleh perbaikan pada seluruh dimensi penyusunnya. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) meningkat dari 73,57 tahun pada 2024 menjadi 73,68 tahun pada 2025. Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) naik dari 13,21 tahun menjadi 13,31 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 9,35 tahun menjadi 9,44 tahun.

Sementara itu, dimensi standar hidup layak juga menunjukkan penguatan yang tercermin dari meningkatnya pengeluaran per kapita yang disesuaikan dari Rp10.197 ribu pada 2024 menjadi

Grafik V.8. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kaltara



Sumber: BPS, diolah

Tabel V.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Utara Menurut Dimensi Penyusunnya

Dimensi	2021	2022	2023	2024	2025
Umur Panjang dan Hidup Sehat					
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	72,65	73,51	73,54	73,57	73,68
Pengetahuan					
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,94	13,06	13,20	13,21	13,31
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,11	9,27	9,34	9,35	9,44
Standar Hidup Layak					
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rp)	9.075	9.350	9.734	10.197	10.568

Sumber: Bank Indonesia

Tabel V.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Regional se Kalimantan

Provinsi	2025			Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp) 2025	IPM 2025		
	UHH	HLS	RLS		Nilai	Pertumbuhan	Nasional
Kalimantan Barat	74,28	12,69	8,07	10.689	72,09	0,9	32
Kalimantan Tengah	74,01	12,78	8,96	12.612	74,86	0,58	20
Kalimantan Selatan	74,49	13,12	8,81	13.757	76,1	0,91	13
Kalimantan Timur	75,28	14,04	10,1	14.254	79,39	0,6	4
Kalimantan Utara	73,68	13,31	9,44	10.568	74,04	0,63	26
Indonesia	74,47	13,3	9,07	12.341	75,9	0,88	-

Sumber: BPS, diolah

Rp10.568 ribu pada 2025. Kenaikan pada seluruh dimensi tersebut mengindikasikan perbaikan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta peningkatan kemampuan ekonomi.

Secara keseluruhan, capaian IPM Kalimantan Utara pada tahun 2025 menunjukkan keberlanjutan proses pembangunan manusia yang inklusif. Meskipun laju pertumbuhan relatif moderat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, peningkatan yang konsisten di seluruh indikator utama mencerminkan terjaganya momentum pembangunan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Berdasarkan perbandingan secara regional Kalimantan pada tahun 2025, IPM Kalimantan Utara menempati peringkat kelima di wilayah Kalimantan dengan nilai 74,04, berada di bawah Kalimantan Timur (79,39), Kalimantan Selatan (76,10), Kalimantan Tengah (74,86), dan Kalimantan Barat (72,09), serta berada pada peringkat ke-26 secara nasional.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Utara diharapkan mampu mendukung kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang, seiring dengan pengembangan berbagai proyek strategis di wilayah tersebut, termasuk Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning–Mangkupadi yang berpotensi menciptakan lapangan kerja dan mendorong transformasi ekonomi daerah.

5.2.4 GINI Ratio

Berdasarkan data BPS per September 2025, Gini Ratio Provinsi Kalimantan Utara tercatat sebesar 0,251, menurun dibandingkan dengan Maret 2025 yang sebesar 0,261. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Secara spasial, Gini Ratio di wilayah perkotaan turun dari 0,262 pada Maret 2025 menjadi 0,255 pada September 2025, sementara di wilayah perdesaan juga menurun dari 0,253 menjadi 0,242. Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa perbaikan ketimpangan terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan (Tabel V.8).

Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan yang umum digunakan adalah persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah. Indikator ini mengukur distribusi pengeluaran kelompok masyarakat berpendapatan rendah terhadap total pengeluaran penduduk, di mana semakin tinggi angkanya

Tabel V.8. GINI Ratio Penduduk di Kaltara Menurut Daerah

Ukuran Ketimpangan	Mar 2024			Sep 2025		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
Gini Ratio	0,262	0,253	0,261	0,255	0,242	0,251
Bank Dunia 40% Terbawah	24,47	24,98	24,64	24,84	24,42	24,89

Sumber: BPS, diolah

Tabel V.9. Perbandingan GINI Ratio Se-Kalimantan

Provinsi	2024		2025		Posisi Nasional (Gini Ratio terendah)	September Mar-Sep 2025 (yoy)
	MAR	SEP	MAR	SEP		
Kalimantan Barat	0,310	0,314	0,316	0,308	15	-2,53%
Kalimantan Tengah	0,301	0,304	0,292	0,284	10	-2,74%
Kalimantan Selatan	0,302	0,298	0,287	0,281	8	-2,09%
Kalimantan Timur	0,321	0,31	0,312	0,31	17	-0,64%
Kalimantan Utara	0,264	0,259	0,261	0,251	2	-3,83%

Sumber: BPS, diolah

menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah. Menurut klasifikasi Bank Dunia, ketimpangan dikategorikan rendah apabila angka pengeluaran 40% terbawah berada di atas 17 persen.

Pada September 2025, distribusi pengeluaran penduduk 40% terbawah di Kalimantan Utara tercatat sebesar 24,89%, meningkat dibandingkan 24,64% pada Maret 2025. Kenaikan ini menunjukkan perbaikan distribusi pengeluaran di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dan memperkuat indikasi menurunnya ketimpangan pendapatan secara keseluruhan.

Secara nasional, Kalimantan Utara tetap termasuk provinsi dengan tingkat ketimpangan yang relatif rendah. Capaian ini masih lebih baik dibandingkan sebagian provinsi lain di Kalimantan, seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat, yang umumnya memiliki Gini Ratio lebih tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan di Kalimantan Utara secara relatif masih lebih baik dibandingkan wilayah Kalimantan lainnya (Tabel V.9).





Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Prov. Kaltara 2026 diperkirakan tumbuh lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi 2025, yaitu dalam kisaran 5,0%-5,5% (yoy). Proyeksi tersebut terutama didorong oleh kinerja LU Perdagangan, LU Industri Pengolahan, dan LU Konstruksi. LU Perdagangan diperkirakan akan memiliki andil besar dalam PDRB 2026 sejalan dengan peningkatan aktivitas perdagangan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan di Prov. Kaltara serta adanya komoditas ekspor baru yaitu aluminium. LU Industri Pengolahan diperkirakan tumbuh meningkat sejalan dengan realisasi investasi dan operasi smelter aluminium, produksi pabrik kertas di Kota Tarakan, dan peningkatan target produksi CPO oleh beberapa perusahaan kelapa sawit. LU Konstruksi juga diperkirakan akan tetap tumbuh positif didukung oleh finalisasi pembangunan kawasan KIH dan berlanjutnya konstruksi beberapa proyek strategis di Prov. Kaltara lainnya. Namun demikian, LU dengan pangsa terbesar di Prov. Kaltara, yaitu LU Pertambangan diperkirakan tumbuh terbatas akibat perlambatan permintaan energi dari negara besar pengguna batu bara (a.l Tiongkok, India, dan beberapa negara di Asia Tenggara) dan penurunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 di tengah perlambatan prospek ekonomi akibat perang tarif dagang, pengembangan sumber energi terbarukan serta upaya pemenuhan sumber energi secara domestik.

Dari sisi harga, inflasi Prov. Kaltara 2026 diperkirakan berada di dalam target inflasi nasional yaitu $2,5 \pm 1\%$. Prov. Kaltara diperkirakan dapat mengalami tekanan harga yang lebih tinggi pada 2026, sejalan dengan berlanjutnya kenaikan harga komoditas global seperti emas, potensi kenaikan harga minyak, berkurangnya subsidi ongkos angkut akibat efisiensi anggaran, dan peningkatan permintaan komoditas pangan di tengah pelaksanaan program MBG. Ke depan, sinergi pengendalian inflasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan akan konsisten dilakukan guna menjaga stabilitas harga serta mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.

6.1 Prospek Perekonomian Global

Perang di Timur Tengah makin memperburuk kondisi dan prospek perekonomian dunia. Harga minyak dan komoditas dunia meningkat tinggi dan diikuti dengan disrupsi rantai pasok perdagangan antarnegara yang makin dalam. International Monetary Fund (IMF) memperkirakan perekonomian global tumbuh 3,1% (yoy) pada 2026, menurun dari prakiraan sebelumnya sebesar 3,4% (yoy) terdampak pecahnya perang di Timur Tengah. Ekonomi negara maju diperkirakan tumbuh sebesar 1,8% (yoy) pada 2026, sedikit menurun dari pertumbuhan ekonomi negara maju 2025 sebesar 1,9% (yoy). Sementara itu, negara berkembang diperkirakan tumbuh 3,9% (yoy), menurun dari pertumbuhan 2025 sebesar 4,4% (yoy).

Perekonomian Amerika Serikat (AS) diperkirakan tumbuh 2,3% (yoy) pada 2026, meningkat dari 2,1% (yoy) pada 2025. Peningkatan pertumbuhan ekonomi AS tersebut didukung oleh kebijakan fiskal dan suku bunga kebijakan yang lebih rendah di tengah dampak dari peningkatan hambatan perdagangan yang secara bertahap mereda. Ekonomi Euro Area diperkirakan tumbuh melambat yaitu sebesar 1,1% (yoy), dari pertumbuhan 2025 sebesar 1,4% (yoy) terdampak oleh konflik di Timur Tengah yang menambah tekanan pada sektor manufaktur. Ekonomi Jepang diproyeksikan tumbuh sebesar 0,7% (yoy) pada 2026, menurun dari 1,2% (yoy) pada 2025 akibat pelemahan permintaan eksternal dan dampak konflik Timur Tengah terhadap perekonomian global. Di Inggris, perang dan perlambatan pelonggaran kebijakan moneter menyebabkan pertumbuhan ekonomi diproyeksikan turun dari 1,3% (yoy) pada 2025 menjadi 0,8% (yoy) pada 2026. Lebih lanjut, ekonomi Tiongkok diperkirakan tumbuh 4,4% (yoy) pada 2026, melambat dari tahun 2025 sebesar 5,0% (yoy), terdampak perang Timur Tengah dan beberapa permasalahan struktural seperti pelemahan berkepanjangan sektor properti, menurunnya jumlah tenaga kerja, dan berkurangnya tingkat pengembalian investasi (Tabel VI.1).

Disinflasi global terindikasi akan terjadi pada 2026. Inflasi global diproyeksikan meningkat dari 4,1% (yoy) pada 2025 menjadi 4,4% (yoy) pada 2026, sebelum kembali menurun menjadi 3,7% (yoy) pada 2027. Peningkatan perkiraan inflasi tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya harga energi dan pangan di tingkat global. Sejalan dengan hal tersebut, inflasi negara maju diperkirakan sebesar 2,8% (yoy) pada 2026, meningkat dari inflasi 2025 sebesar 2,5% (yoy), dan inflasi negara berkembang diperkirakan sebesar 5,5% (yoy) pada 2026, meningkat dari inflasi 2025 sebesar 5,2% (yoy).

Volume perdagangan global 2026 diproyeksikan menurun sejalan dengan pemberlakuan tarif dagang AS dan ketegangan konflik Timur Tengah. IMF memproyeksikan bahwa

Tabel VII.1. Perbandingan Ekonomi Negara Lain

Indikator	%yoy			
	2024	2025	2026	2027
PDB Global	3,3	3,4	3,1	3,2
Negara Maju	1,8	1,9	1,8	1,7
AS	2,8	2,1	2,3	2,1
Euro Area	0,9	1,4	1,1	1,2
Jerman	-0,5	0,8	1,2	1,5
Prancis	1,1	0,9	0,9	0,9
Italia	0,7	0,5	0,5	0,5
Spanyol	3,5	2,8	2,1	1,8
Jepang	-0,2	1,2	0,7	0,6
Inggris	1,1	1,3	0,8	1,3
Negara Berkembang	4,3	4,4	3,9	4,2
Tiongkok	5,0	5,0	4,4	4,0
India	6,5	7,6	6,5	6,5
Rusia	4,3	1,0	1,1	1,1
Brazil	3,4	2,3	1,9	2,0
Afrika Selatan	0,5	1,1	1,0	1,3
Inflasi Global	5,8	4,1	4,4	3,7
Negara Maju	2,6	2,5	2,8	2,2
Negara Berkembang	7,9	5,2	5,5	4,6
Volume Perdagangan Global (Barang & Jasa)	3,6	5,1	2,8	3,8

Sumber: IMF-World Economic Outlook Update, April 2026, diolah

volume perdagangan (barang dan jasa) global pada 2026 tumbuh sebesar 2,8% (yoy), lebih rendah dibandingkan 2025 sebesar 5,1% (yoy). Prakiraan tersebut sejalan dengan penyesuaian arus perdagangan terhadap kebijakan dagang global terkini. Ke depan, eskalasi perang tarif dan konflik geopolitik yang berkepanjangan diperkirakan akan memberikan dampak lebih lanjut pada aktivitas perdagangan yang mempengaruhi jalur dan/atau rantai pasok, terutama pada negara yang berorientasi ekspor.

Kebijakan moneter dan fiskal 2026 diperkirakan beragam di berbagai negara. Perbedaan arah kebijakan moneter di negara-negara utama dunia diperkirakan akan terus berlanjut. Federal Reserve diperkirakan akan melanjutkan penurunan suku bunga kebijakan secara bertahap hingga akhir 2027. Sementara itu, European Central Bank diperkirakan akan meningkatkan suku bunga kebijakan sebesar 50 basis poin sepanjang 2026 dan Bank of Japan akan meningkatkan suku bunga kebijakan menuju level 1,5%. Di sisi lain, kebijakan fiskal di negara maju secara umum diperkirakan bersifat netral pada 2026 dan mulai lebih ketat pada tahun berikutnya meskipun dengan defisit fiskal yang diperkirakan melebar di beberapa negara utama. Sementara itu, kebijakan fiskal di negara berkembang secara rata-rata diperkirakan akan semakin ketat secara bertahap.

6.2 Prospek Perekonomian Indonesia

Momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu terus dipertahankan. Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61% (yoy) pada triwulan I 2026, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan sebelumnya sebesar 5,39% (yoy). Konsumsi rumah tangga meningkat didorong kenaikan mobilitas masyarakat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan dampak positif berbagai stimulus Pemerintah. Konsumsi Pemerintah tumbuh tinggi didorong belanja program prioritas Pemerintah, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG), serta peningkatan belanja pegawai melalui gaji ke-14 atau Tunjangan Hari Raya (THR). Investasi khususnya investasi bangunan meningkat dipengaruhi oleh Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Sementara itu, ekspor turun dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Ke depan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap baik ditopang oleh optimalisasi belanja Pemerintah yang bersinergi dengan bauran kebijakan Bank Indonesia termasuk pelonggaran kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran untuk turut mendukung kegiatan ekonomi digital dan keuangan inklusif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 diperkirakan berada dalam kisaran 4,9–5,7% (yoy).

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2026 diperkirakan tetap terjaga rendah dalam kisaran sasaran. Pada April 2026, IHK tercatat mengalami inflasi sebesar 0,13% (mtm), sehingga secara tahunan IHK mengalami inflasi sebesar 2,42% (yoy) atau lebih rendah dari realisasi pada bulan sebelumnya sebesar 3,48% (yoy). Inflasi yang tetap terjaga dalam kisaran sasarnya ini merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) serta penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1% pada 2026 dan 2027.

Kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk tetap memperkuat stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 19-20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 50 bps menjadi 5,25%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 50 bps menjadi 4,25%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 50 bps menjadi 6,00%. Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah serta sebagai langkah *pre-emptive* untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% yang ditetapkan Pemerintah. Keputusan ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter pada stabilitas (*“pro-stability”*) untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak gejolak global.

Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan (*“pro-growth”*). Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit/pembiayaan ke sektor riil dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi digital dan keuangan inklusif melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran.

6.3 Prospek Pertumbuhan Ekonomi Kaltara

Perekonomian Prov. Kaltara 2026 diperkirakan tumbuh lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi 2025, yaitu dalam kisaran 5,0%-5,5% (yoy). Proyeksi tersebut terutama didorong oleh kinerja LU Perdagangan, LU Industri Pengolahan, dan LU Konstruksi. LU Perdagangan diperkirakan akan memiliki andil besar dalam PDRB 2026 sejalan dengan peningkatan aktivitas perdagangan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan di Prov. Kaltara serta adanya komoditas ekspor baru yaitu aluminium. LU Industri Pengolahan diperkirakan tumbuh meningkat sejalan dengan realisasi investasi dan operasi *smelter* aluminium, produksi pabrik kertas di Kota Tarakan, dan peningkatan target produksi CPO oleh beberapa perusahaan kelapa sawit. LU Konstruksi juga diperkirakan akan tetap tumbuh positif didukung oleh finalisasi pembangunan kawasan KIH dan berlanjutnya konstruksi beberapa proyek strategis di Prov. Kaltara lainnya. Sementara itu, LU dengan pangsa terbesar di Prov. Kaltara, yaitu LU Pertambangan diperkirakan tumbuh terbatas akibat perlambatan permintaan energi dari negara besar pengguna batu bara (a.l Tiongkok, India, dan beberapa negara di Asia Tenggara) dan penurunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 di tengah perlambatan prospek ekonomi akibat perang tarif dagang, pengembangan sumber energi terbarukan serta upaya pemenuhan sumber energi secara domestik.

LU Industri Pengolahan diperkirakan tumbuh lebih tinggi pada 2026 dibandingkan dengan realisasi 2025 sebesar 8,99% (yoy). Kondisi ini terutama didorong oleh beroperasinya *smelter* aluminium dengan kapasitas produksi yang meningkat secara bertahap sejak Desember 2025. Selain itu, industri pengolahan kelapa sawit juga diperkirakan meningkat sejalan dengan produksi CPO yang lebih tinggi di tengah harga yang semakin kompetitif. Aktivitas produksi olahan kayu seperti bubur kertas dan *plywood* juga diperkirakan meningkat pada 2026 seiring meningkatnya permintaan produk olahan kayu didukung oleh kenaikan produksi kayu di tengah kondisi cuaca yang lebih baik.

LU Perdagangan diperkirakan menunjukkan kinerja yang lebih tinggi pada 2026 jika dibandingkan realisasi 2025 sebesar 9,84% (yoy). LU Perdagangan berpotensi meningkat sejalan aktivitas ekonomi baru di Prov. Kaltara yaitu beroperasinya industri pengolahan aluminium. Selain itu, berlanjutnya kebutuhan pembelian barang modal, khususnya untuk mendukung operasional kawasan industri dan proyek strategis daerah/program belanja APBN, juga diperkirakan tetap tumbuh positif. Kondisi tersebut juga didukung oleh optimisme konsumen yang tercermin dari IKK tetap berada di level yang tinggi, pertumbuhan kredit yang tetap tinggi, serta meningkatnya aktivitas LU Pertanian dan produksi LU Industri Pengolahan selama periode 2026.

LU Konstruksi diperkirakan tetap tumbuh positif pada 2026, meski sedikit lebih rendah dibandingkan dengan realisasi 2025 yang tumbuh 11,17% (yoy). Kondisi ini didorong oleh pembangunan sejumlah proyek strategis seperti finalisasi konstruksi fasilitas *smelter* aluminium di KIHI, pembangunan PLTA Sei Mentarang, dan pembangunan tahap kedua pabrik kertas. Adapun pertumbuhan LU Konstruksi yang lebih tinggi tertahan oleh penundaan proyek infrastruktur pemerintah akibat anggaran yang terbatas. Meski demikian, masih terdapat peluang proyek konstruksi pemerintah lainnya yang dapat direalisasikan pada periode mendatang. RPJMD Provinsi Kaltara mencatat bahwa pemerintah daerah mencanangkan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan konektivitas jalan Malinau - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Nawang.

LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan diperkirakan tumbuh lebih tinggi pada 2026 dibandingkan dengan realisasi 2025 yang tercatat tumbuh 2,60% (yoy). Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan akan berlanjut meningkat pada 2026. Pertumbuhan sektor pertanian akan didukung oleh optimisme peningkatan produksi TBS di tengah berlanjutnya kenaikan harga TBS, serta peningkatan produksi padi sejalan dengan perluasan operasi lahan GERINA pada 2025. Sektor perikanan juga diperkirakan meningkat pada 2026, sejalan dengan optimisme kenaikan harga komoditas perikanan pada 2026 serta didorong oleh fokus pembudidaya perikanan untuk meningkatkan produksi di tengah potensi peningkatan permintaan pada sektor perikanan. Selain itu, produksi komoditas rumput laut diperkirakan lebih tinggi sejalan dengan tren permintaan dan harga yang berlanjut meningkat sejak 2024.

Kinerja LU Pertambangan pada 2026 diperkirakan lebih rendah dari realisasi tahun 2025 yang tercatat berkontraksi sebesar -1,09% (yoy). LU Pertambangan diperkirakan tumbuh lebih rendah pada 2026 jika dibandingkan dengan tahun 2025. Prakiraan pertumbuhan tersebut disebabkan potensi penurunan target produksi batu bara pada Rencana Kerja dan Anggaran

Biaya (RKAB) 2026 yang dicanangkan oleh pemerintah. Adapun kebijakan pemerintah tersebut bertujuan untuk menjaga harga batu bara global, menjaga pasokan, dan cadangan nasional. Selain itu, kinerja LU Pertambangan yang terbatas tersebut juga terdampak penurunan permintaan batu bara global akibat pelemahan permintaan terdampak perang tarif dagang dan fokus pengembangan sumber energi terbarukan di negara tujuan ekspor utama.

Dari sisi permintaan, perekonomian Prov. Kaltara 2026 diperkirakan tetap melanjutkan tren positif. Peningkatan pertumbuhan ini didorong oleh kinerja positif hampir seluruh komponen sisi permintaan. Konsumsi RT Prov. Kaltara diperkirakan akan tetap tumbuh positif sejalan dengan aktivitas ekonomi baru seperti beroperasinya *smelter* aluminium, kenaikan UMP dan UMK 2026, meningkatnya jumlah pekerja, dan ekspektasi masyarakat yang terjaga pada level optimis. Konsumsi Pemerintah diperkirakan akan tumbuh pada 2026, didorong percepatan belanja anggaran pemerintah pusat di Kaltara seperti pelaksanaan MBG dan Koperasi Merah Putih, serta potensi pendapatan daerah yang lebih tinggi dibandingkan dengan 2025. Investasi diperkirakan akan berlanjut tumbuh namun terbatas pada 2026 sejalan dengan tahap finalisasi aktivitas konstruksi di KIHI dan penundaan proyek infrastruktur pemerintah. Kegiatan ekspor dan impor pada keseluruhan 2026 diperkirakan akan tumbuh positif sejalan dengan pertumbuhan LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan, dan LU Konstruksi.

Terdapat sejumlah potensi risiko yang dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi Prov. Kaltara ke depan. Perkembangan ekonomi Prov. Kaltara dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal dan internal. Beberapa faktor eksternal adalah terkait dengan (i) meningkatnya konflik geopolitik seperti perang di Timur Tengah dan Rusia-Ukraina yang dapat berdampak pada terganggunya rantai pasok global; (ii) perkembangan perekonomian negara tujuan ekspor utama, diantaranya perlambatan ekonomi Tiongkok yang berdampak pada melambatnya permintaan ekspor sejumlah komoditas utama batu bara dan produk perikanan; (iii) ketidakpastian perang tarif AS dengan negara lain; serta (iv) menurunnya permintaan batu bara global sejalan dengan maraknya penggunaan *renewable energy*. Sementara itu, dari sisi internal, beberapa potensi risiko yang perlu diperhatikan adalah faktor cuaca buruk yang dapat berdampak pada produktivitas hasil panen pertanian, ikan tangkap, dan hasil tambang serta terganggunya distribusi pasokan; dan tertundanya belanja dan/atau program strategis pemerintah yang berdampak pada rendahnya realisasi dan efek pengganda belanja pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, perekonomian Prov. Kaltara pada 2026 diprakirakan melanjutkan pertumbuhan yang lebih tinggi.

Prakiraan tersebut didorong oleh aktivitas ekonomi baru di Kaltara yang diikuti dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja pada 2026. Ekspor aluminium KIH yang ditargetkan pada 2026 dan berlanjutnya pembangunan energi terbarukan seperti PLTA Sei Mentarang berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap struktur perekonomian Prov. Kaltara. Selain itu, permintaan produk dan peningkatan produksi hasil sektor perkebunan seperti TBS dan sektor industri pengolahan seperti CPO, serta peningkatan produksi industri pengolahan pabrik kertas juga berpotensi meningkat pada 2026, didukung perkembangan tren harga yang meningkat.

6.4 Prospek Inflasi Kalimantan Utara

Inflasi Prov. Kaltara 2026 diprakirakan berada di dalam target inflasi nasional yaitu $2,5 \pm 1\%$. Prov. Kaltara diprakirakan mengalami tekanan harga yang lebih tinggi pada 2026, sejalan dengan kenaikan harga komoditas global seperti minyak dunia dan emas terdampak memanasnya perang Timur Tengah, berkurangnya subsidi ongkos angkut akibat efisiensi anggaran, dan peningkatan permintaan komoditas pangan di tengah pelaksanaan program MBG. Namun demikian, inflasi inti Prov. Kaltara diprakirakan tetap terjaga pada 2026 seiring mulai turunnya harga emas perhiasan sejalan dengan koreksi harga emas global atas respons ekspektasi potensi suku bunga The Fed yang tertahan tinggi. Inflasi komoditas yang diatur pemerintah berpotensi lebih tinggi dari tahun sebelumnya terutama disumbang oleh komoditas tarif angkutan udara, bensin, dan bahan bakar rumah tangga seiring dengan kenaikan harga avtur serta penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) nonsubsidi. Sementara itu, inflasi komoditas pangan diprakirakan relatif sama dengan tahun sebelumnya, didorong oleh fokus pemerintah untuk menciptakan kondisi pasokan yang terjaga. Meski demikian, perlu diwaspadai peningkatan harga pangan utama seperti beras, aneka cabai, bawang merah, dan daging ayam yang secara historis terjadi di akhir tahun. Selain itu, pemulihan ekonomi dan mobilitas masyarakat yang terus meningkat juga berpotensi meningkatkan permintaan komoditas makanan dari sektor hotel, restoran, dan catering (horeca).

Sejumlah potensi risiko kenaikan inflasi yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya perlu diwaspadai. Risiko inflasi Prov. Kaltara pada 2026 terutama bersumber dari melonjak tingginya harga minyak dan kenaikan harga komoditas lainnya akibat gejolak global yang dapat berdampak pada perkembangan harga domestik. Tekanan inflasi juga berasal dari kenaikan harga komoditas yang diatur pemerintah, seperti kenaikan harga energi nonsubsidi dan tarif angkutan udara. Lebih lanjut, perang

Timur Tengah dan ketegangan geopolitik Russia-Ukraina yang meningkat dan meluas, serta perang tarif impor Amerika Serikat yang berlanjut berpotensi mengganggu produksi dan alur distribusi pangan, energi, serta pupuk sehingga memberikan tekanan harga yang lebih tinggi terhadap harga komoditas bahan baku dan energi.

Berdasarkan sejumlah risiko inflasi tersebut, berbagai program dan langkah koordinasi pengendalian inflasi melalui TPID semakin diperkuat. TPID Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Prov. Kaltara telah menyusun sejumlah program kerja strategis dalam pengendalian inflasi berdasarkan kerangka 4K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif. Selain itu, koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah daerah lain untuk mendukung terpenuhinya pasokan komoditas pangan strategis juga terus dilakukan terutama pada momen menjelang HBKN yang secara historis memiliki risiko inflasi lebih tinggi ataupun ketika terjadi tekanan harga pada komoditas tertentu. Berbagai program unggulan yang dilakukan, seperti (i) Melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan *Mini Distribution Center* (MDC) di dekat pasar dengan menyediakan bapokting dengan harga terjangkau guna menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pangan strategis; (ii) Memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha dalam program Tol Laut. Pengawasan dilakukan dalam aspek ketersediaan stok, kelengkapan izin usaha, dan kesesuaian harga jual; (iii) Melaksanakan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk komoditas strategis seperti daging sapi, cabai, bawang merah, dll; (iv) Menyediakan infrastruktur pendukung untuk memperlancar distribusi seperti pembangunan jembatan dan Jalan Usaha Tani (JUT); (v) Subsidi Ongkos Angkut (SOA) yang diharapkan dapat tetap berlangsung sehingga mampu menekan inflasi khususnya dari sisi biaya distribusi; (vi) Penerapan kebijakan *window scheduling* dan peningkatan kapasitas pelabuhan agar memprioritaskan bongkar muat komoditas bapokting di Pelabuhan Malundung, Tarakan; dan (vii) Berbagai dukungan untuk penguatan produksi dari sisi hulu dan hilir lainnya yang turut diimplementasikan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan Prov. Kaltara.

Daftar Istilah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Berth Occupancy Ratio (BOR)	Perbandingan antara waktu penggunaan dermaga dengan waktu yang tersedia dalam periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase.
Dana Alokasi Khusus (DAK)	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Dana Alokasi Umum (DAU)	Merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Bagi Hasil (DBH)	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Perimbangan	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana yang dihimpun perbankan dari masyarakat, yang berupa giro, tabungan atau deposito.
Dwelling Time	Total waktu yang dibutuhkan peti kemas selama di pelabuhan. Waktu yang dihitung mulai dari suatu petikemas (container) dibongkar dan diangkat (unloading) dari kapal sampai petikemas tersebut meninggalkan terminal pelabuhan melalui pintu utama.
Ekspor-Import	Dalam konteks PDRB adalah mencakup perdagangan barang dan jasa antar negara dan antar provinsi.
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.
Inflasi	Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (persisten).
Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI)	Proyek strategis nasional yang bertujuan untuk mendorong ekonomi hijau dan transisi energi.
Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT)	Laporan yang berisi informasi yang disusun dan disampaikan oleh bank pelapor kepada Bank Indonesia secara terintegrasi dalam format dan definisi yang seragam sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh otoritas.

<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	Adalah rasio antara jumlah kredit yang disalurkan terhadap dana yang dihimpun (giro, tabungan dan deposito).
<i>Month to month (mtm)</i>	Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.
<i>Makanan Bergizi Gratis (MBG)</i>	Program pemerintah untuk memberikan makanan bergizi gratis kepada masyarakat.
<i>Non Performing Loan (NPL)</i>	Kredit/pembiayaan yang bermasalah atau non-lancar yang terdiri dari kredit dengan klasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif.
<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
<i>Pertumbuhan Ekonomi</i>	Perubahan nilai PDRB atas harga konstan dalam suatu periode tertentu (triwulanan atau tahunan).
<i>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</i>	Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.
<i>Purchasing Managers Index (PMI)</i>	Merupakan indeks gabungan dari berbagai indikator bertujuan untuk mengukur tingkat produksi, mendeteksi tekanan inflasi dan aktivitas perindustrian.
<i>Quarter to quarter (qtq)</i>	Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.
<i>Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB)</i>	Rencana kerja dan anggaran biaya pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan.
<i>Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)</i>	Tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi di daerahnya. TPID berfungsi untuk memonitor dan menganalisis pergerakan harga di pasar, serta melakukan tindakan-tindakan preventif dan korektif untuk mengendalikan inflasi
<i>Year on year (yoy)</i>	Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

Tim Penyusun

Pengarah

Hasiando G. Manik

Penanggung Jawab

Reza Hidayat

Koordinator Penyusun & Editor

Gabriel Fedrichson

Tim Penulis

M. Rizki Prasetyo

Rizkyandra Rifandana Hendrawan

Aditya Dwi Rahmadi

Yahya Kurniawan

Fadhali Irfan

Haikal Muhammad

Arfian Saputra Siregar

Haikal Muhammad

Gabriel Fedrichson

Riza Abditya Wijaya



Fungsi Perumusan KEKDA Provinsi
Kantor Perwakilan BankIndonesia Provinsi Kalimantan Utara

Jl. Mulawarman No. 123 Tarakan
KalimantanUtara77117
Telp : 0551 - 3807777, Fax : 0551 - 3803131
www.bi.go.id

